PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS

2020

Data Indikator Tahun 2019

Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS

2020

Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN

Pembangunan ketahanan pangan telah berhasil meningkatkan produksi pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Keberhasilan dari sisi ketersediaan juga diikuti dengan menurunnya prevalensi kekurangan zat gizi/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) dari 12,89% pada tahun 2014 menjadi 7,66% pada tahun 2019 dan menurunnya prevalensi balita *stunting* dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 27,67% pada tahun 2019. Membaiknya situasi ketersediaan dan gizi tersebut mendorong penurunan angka kemiskinan dari 11,25% pada Maret 2014 menjadi 9,41% tahun 2019. Perbaikan indikator ketahanan pangan tersebut turut berkontribusi pada penurunan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan dari 76 kabupaten/kota menjadi 70 kabupaten/kota.

Membaiknya situasi ketahanan pangan dan gizi Indonesia juga mendorong posisi Indonesia pada *Global Food Security Index* (GFSI) dari urutan 74 tahun 2015 menjadi urutan ke 62 pada tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia *is on the right track* dalam komitmennya untuk mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan sebagaimana telah disepakati dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030.

Saya menyadari bahwa wilayah Indonesia yang luas dengan 17.504 pulau menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan ketahanan pangan. Saya juga berkomitmen untuk menjaga agar 267 juta jiwa penduduk Indonesia tidak mengalami kelaparan melalui program-program yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian. Namun penanganan permasalahan kerentanan pangan tidak hanya menjadi domain dari Kementerian Pertanian tetapi juga membutuhkan peran aktif dari kementerian/lembaga lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi terbitnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* - FSVA) 2020 yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan serta karakteristik wilayah rentan rawan pangan sampai dengan level kabupaten. Saya sangat berharap FSVA ini dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam melakukan sinergi program pengentasan daerah rentan rawan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah. Sinergi ini penting dalam mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan stunting untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Pertanian

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan selalu menjadi isu strategis, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif. Badan Ketahanan Pangan (BKP) diberi amanah untuk melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan nasional. Salah satu fokus utama yang harus dilaksanakan BKP adalah pengentasan daerah rentan rawan pangan dengan mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor. Daerah rentan rawan pangan ditargetkan turun dari 18% menjadi 10% pada tahun 2024.

Untuk mengevaluasi pencapaian target ketahanan pangan, BKP menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* - FSVA) yang di-update setiap tahun pada tingkat kabupaten dan kecamatan di seluruh Indonesia. Akurasi peta terus ditingkatkan dengan mendetailkan pemetaan sampai tingkat desa, agar permasalahan dan tantangan yang menyebabkan terjadinya masalah pangan, kemiskinan dan stunting dapat dilakukan intervensi program/kegiatan secara lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Tidak hanya itu, dengan FSVA, pemantauan dini dapat lebih ditingkatkan agar kejadian rawan pangan dapat dideteksi lebih dini.

Berdasarkan FSVA 2020 diketahui bahwa program pembangunan ketahanan pangan selama satu tahun telah berhasil menurunkan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan dari 76 kabupaten/kota pada tahun 2019 turun menjadi 70 kabupaten/kota (terjadi penurunan sebanyak 6 kabupaten/kota) pada tahun 2020. Kabupaten/kota tahan pangan naik dari 438 kabupaten/kota menjadi 444 kabupaten/kota di tahun 2020. Peningkatan status ketahanan pangan di wilayah terjadi karena peningkatan ketersediaan pangan, penurunan angka stunting, dan peningkatan akses air bersih.

Saya berharap, FSVA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten selalu dimutakhirkan agar dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan dan dasar penetapan lokus dan program intervensi pengentasan daerah rentan rawan pangan.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kelompok Kerja FSVA Nasional dari lintas Kementerian dan Lembaga, Perguruan Tinggi dan serta Dinas Ketahanan Pangan serta lembaga/unit kerja ketahanan pangan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten atas kontribusinya dalam penyusunan FSVA 2020 ini. Selanjutnya yang lebih penting adalah sinergi lintas sektor dalam program intervensi kerentanan pangan di daerah prioritas agar seluruh wilayah Indonesia tahan pangan dan setiap individu sehat, cerdas, aktif, dan produktif.

Selamat bekerja.

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN i
KATA PENGANTAR KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR PETA xi
DAFTAR LAMPIRAN xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF xv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi 2
1.3. Metodologi 3
BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN 11
2.1. Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita terhadap Produksi 13
2.2. Capaian Ketersediaan Pangan 16
2.3. Tantangan untuk Ketersediaan Pangan 16
BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN 21
3.1 Akses terhadap Listrik 21
3.2 Kemiskinan 24
3.3 Pangsa Pengeluaran Pangan 28
BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN 33
4.1. Tenaga Kesehatan 33
4.2. Akses ke Air Bersih 37
4.3. Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun 41
4.4. Tantangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan 45
BAB 5 DAMPAK DARI STATUS GIZI DAN KESEHATAN 47
5.1. Dampak dari Status Gizi 47
5.2. Dampak dari Status Kesehatan 52
BAB 6 ANALISIS KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT 55
6.1. Ketahanan Pangan di Indonesia 55
6.2. Perubahan Tingkat Kerentanan terhadap Ketahanan Pangan Kronis Tahun 2019-2020 64
BAB 7 SITUASI PENYEBAB KERENTANAN PANGAN TRANSIEN 69
7.1. Bencana Alam 69
7.2. Variabilitas Iklim 71

7.3. Kehilangan Produksi yang Disebabkan oleh Kekeringan, Banjir dan Organisme Pengganggu Tanaman 73
BAB 8 REKOMENDASI KEBIJAKAN 79
8.1. Wilayah Kabupaten 80
8.2. Wilayah Perkotaan 81
8.3. Kerjasama Lintas Progam dan Lintas Sektor 82
BAB 9 KETAHANAN PANGAN DI MASA PANDEMI COVID – 19 85
9.1. Tantangan Ketahanan Pangan di Masa Pandemi 85
9.2. Dampak Pandemi Terhadap Penyediaan dan Konsumsi Pangan Rumah Tangga 87
9.3. Program Ketahanan Pangan di Era Normal Baru 94
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Indikator FSVA 2020 4
Tabel 1.2 Cut off Point Indikator Individu 6
Tabel 1.3 Bobot Indikator Individu 8
Tabel 1.4 Cut off Point Komposit 9
Tabel 2.1 Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Tahun 2010-2019 11
Tabel 2.2 Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Tahun 2019 12
Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik per Provinsi 2015-2019 21
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan per Provinsi 24
Tabel 3.3 Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% Tahun 2017-2019 28
Tabel 4.1 Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk 2017-2019 33
Tabel 4.2 Sebaran Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk Kota 35
Tabel 4.3 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih 2017 – 2019 37
Tabel 4.4 Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun 2017-2019 41
Tabel 4.5 Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2017-2019 45
Tabel 5.1 Klasifikasi WHO untuk *Underweight*, *Stunting* dan *Wasting* dalam Populasi 48
Tabel 5.2 Hasil SSGBI Tahun 2019 49
Tabel 5.3 Prevalensi Kurang Gizi pada Balita per Provinsi (*Stunting*, *Underweight* dan *Wasting*) Tahun 2019 49
Tabel 5.4 Angka Harapan Hidup Per Provinsi 52
Tabel 6.1 Persentase Kabupaten Berdasarkan Kelompok Prioritas per Provinsi 57
Tabel 6.2 Nilai Rata-Rata Kelompok Kabupaten Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan 59
Tabel 6.3 Persentase Kota Berdasarkan Kelompok Prioritas per Provinsi 60
Tabel 6.4 Nilai Rata-rata Kelompok Kota Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan 61
Tabel 6.5 Sebaran Kabupaten/Kota per Prioritas 2019-2020 64
Tabel 6.6 Perubahan Tingkat Prioritas Kabupaten per Provinsi 2019 – 2020 65
Tabel 6.7 Perubahan Tingkat Prioritas Kota per Provinsi 2019 – 2020 66
Tabel 7.1 Negara yang Mengalami Bencana Alam Terbanyak 2019 69
Tabel 7.2 Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia dan Kerusakannya 2015-2019 70
Tabel 7.3 Perbandingan Area Puso Padi dan Jagung Akibat Banjir, Kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman 2015-2019 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi 3
Gambar 2.1 Sebaran Kelompok Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Bersih Serealia Kabupaten 14
Gambar 2.2 Sebaran Kelompok Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Bersih Serealia Kota 15
Gambar 3.1 Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik Kabupaten 22
Gambar 3.2 Sebaran Kelompok Penduduk Miskin Kabupaten 25
Gambar 3.3 Sebaran Kelompok Penduduk Miskin Kota 26
Gambar 3.4 Sebaran Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% Kabupaten 30
Gambar 3.5 Sebaran Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% Kota 30
Gambar 4.1 Sebaran Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten 34
Gambar 4.2 Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih Kabupaten 38
Gambar 4.3 Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih Kota 39
Gambar 4.4 Sebaran Kelompok Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun Kabupaten 42
Gambar 4.5 Sebaran Kelompok Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun Kota 43
Gambar 5.1 Sebaran Kelompok pada Kabupaten Prioritas Stunting 2019 50
Gambar 5.2 Sebaran Kelompok Angka Harapan Hidup Kabupaten 53
Gambar 5.3 Sebaran Kelompok Angka Harapan Hidup Kota 53
Gambar 6.1 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 1 per Provinsi 56
Gambar 6.2 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 2 per Provinsi 56
Gambar 6.3 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 3 per Provinsi 57
Gambar 7.1 Bencana Alam per Provinsi 2015 – 2019 71
Gambar 8.1 Kerangka Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan 80
Gambar 8.2 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan 81
Gambar 8.3 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan 82
Gambar 8.4 Peran Aktif Pemangku Kepentingan dalam Pengentasan 83
Gambar 9.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 85
Gambar 9.2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin 86
Gambar 9.3 PoU Nasional Tahun 2011-2020 86
Gambar 9.4 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (y-on-y) 87
Gambar 9.5 Pembelian Beras Sebelum dan Saat Pandemi 87
Gambar 9.6 Pembelian Daging Sapi Sebelum dan Saat Pandemi 88
Gambar 9.7 Pembelian Daging Ayam Sebelum dan Saat Pandemi 88
Gambar 9.8 Pembelian Telur Ayam Sebelum dan Saat Pandemi 88
Gambar 9.9 Pembelian Ikan Sebelum dan Saat Pandemi 89
Gambar 9.10 Pembelian Sayur Sebelum dan Saat Pandemi 89
Gambar 9.11 Perbandingan Konsumsi Beras Sebelum dan Saat Pandemi 90
Gambar 9.12 Perbandingan Konsumsi Daging Sapi Sebelum dan Saat Pandemi 90
Gambar 9.13 Perbandingan Konsumsi Daging Ayam Sebelum dan Saat Pandemi 91
Gambar 9.14 Perbandingan Konsumsi Telur Ayam Sebelum dan Saat Pandemi 91
Gambar 9.15 Perbandingan Konsumsi Ikan Sebelum dan Saat Pandemi 92

Gambar 9.16 Perbandingan Konsumsi Sayur Sebelum dan Saat Pandemi 92
Gambar 9.17 Perbandingan Konsumsi Buah Sebelum dan Saat Pandemi 93
Gambar 9.18 Kuantitas Makan Selama Pandemi 93
Gambar 9.19 Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Era Normal Baru 95

DAFTAR PETA

Peta 2.1 Peta Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Bersih Serealia 19
Peta 3.1 Peta Rumah Tangga Tanpa Akses terhadap Listrik 23
Peta 3.2 Peta Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan 27
Peta 3.3 Peta Rumah Tangga dengan Proporsi Pengeluaran untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran 31
Peta 4.1 Peta Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk 36
Peta 4.2 Peta Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih 40
Peta 4.3 Peta Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun 44
Peta 5.1 Peta Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (Stunting) 51
Peta 5.2 Peta Angka Harapan Hidup 54
Peta 6.1 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2020 63
Peta 6.2 Perubahan Status Prioritas Kabupaten/Kota antara FSVA 2019 dan FSVA 2020 68
Peta 7.1 Sifat Hujan Indonesia Tahun 2019 75
Peta 7.2 Prakiraan Sifat Hujan Musim Kemarau Tahun 2020 76
Peta 7.3 Prakiraan Puncak Musim Kemarau Tahun 2020 77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kabupaten ..99
Lampiran 2. Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kota 111

RINGKASAN EKSEKUTIF
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) 2020

1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis berdasarkan 6 kelas status ketahanan pangan yaitu: Prioritas 1 merupakan wilayah sangat rentan, Prioritas 2 merupakan wilayah rentan, Prioritas 3 merupakan wilayah agak rentan, Prioritas 4 merupakan wilayah agak tahan, Prioritas 5 merupakan wilayah tahan, dan Prioritas 6 merupakan wilayah sangat tahan.

2. FSVA Nasional tahun 2020 mencakup 416 kabupaten dan 98 kota. FSVA kabupaten disusun dengan menggunakan 9 indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, sedangkan FSVA perkotaan disusun dengan menggunakan 8 indikator yang mewakili aspek akses pangan dan pemanfaatan pangan. Data indikator yang digunakan dalam analisis adalah data tahun 2019.

3. Situasi ketahanan pangan Indonesia tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun 2019, dimana jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) **turun** dari **76** kabupaten/kota (14,8%) pada tahun 2019 menjadi **70** kabupaten/kota (13,6%) pada tahun 2020, dan jumlah kabupaten/kota tahan pangan **naik** dari 438 kabupaten/kota (85,2%) pada tahun 2019 menjadi 444 kabupaten/kota (86,4%) pada tahun 2020.

4. Kabupaten rentan rawan pangan Prioritas 1-3 berjumlah 66 kabupaten yang terdiri dari 26 kabupaten Prioritas 1; 18 kabupaten Prioritas 2; dan 22 kabupaten Prioritas 3. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua (20 kabupaten), Papua Barat (4 kabupaten), Maluku dan Riau masing-masing satu kabupaten.

5. Kota rentan rawan pangan prioritas 1-3 berjumlah 4 kota yang terdiri dari Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Prioritas 1); Kota Tual, Provinsi Maluku (Prioritas 2); serta Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara (Prioritas 3).

6. Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan ditandai dengan tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, tingginya penduduk miskin, tingginya rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; tingginya prevalensi balita *stunting*, dan tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Sementara itu, karakteristik kota rentan pangan ditandai dengan tingginya prevalensi balita *stunting*, tingginya penduduk miskin, rendahnya angka harapan hidup dan tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih.

7. Berdasarkan karakteristik wilayah rentan rawan pangan, maka fokus pengentasan kerentanan pangan di wilayah kabupaten dan kota diprioritaskan pada:
   a. Kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah Indonesia Timur dengan daerah rentan rawan pangan terbesar
   b. Kabupaten-kabupaten di kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan

c. Kota-kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terutama dalam hal stabilisasi pasokan dan daya beli masyarakat
d. Kota-kota yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang terbatas ataupun karena buruknya sanitasi.

8. Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan sebagai berikut:
   a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mengoptimalkan lahan marginal dan ruang terbuka untuk produksi sesuai potensi sumberdaya lokal
   b. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit) dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan menurunkan kemiskinan
   c. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan
   d. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan sanitasi untuk menurunkan prevalensi *stunting* dan peningkatan gizi masyarakat
   e. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
9. Program-program pengentasan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:
   a. Peningkatan ketersediaan pangan keluarga melalui pengembangan *urban farming*
   b. Penanganan balita *stunting* melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan untuk mendukung kesehatan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diantaranya adalah melalui pemberian vitamin yang dilengkapi zat besi, yodium, asam folat untuk ibu hamil; mendukung pemberian ASI esklusif bayi usia 0-6 bulan; dan pemberian MP ASI untuk anak usia 7-23 bulan. Intervensi gizi sensitif yang diarahkan untuk penyediaan bahan pangan yang cukup dan beragam, akses air bersih, sanitasi, akses layanan kesehatan, pendidikan gizi, jaring pengaman sosial, dan peningkatan pendapatan keluarga
   c. Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
   d. Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli
   e. Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan
   f. Peningkatan akses terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.
10. Sinergi lintas sektor dari pusat dan daerah, swasta dan seluruh lapisan masyakat secara konvergen melalui program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan agar berdampak pada penguatan ketahanan pangan wilayah dan nasional secara berkelanjutan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Oleh karena itu, data dan informasi tentang ketahanan pangan dan gizi yang komprehensif, akurat dan mutakhir dapat menjadi salah satu dasar bagi para pembuat keputusan dalam penetapan kebijakan dan program intervensi serta lokus program, baik di tingkat pusat maupun tingkat wilayah.

Salah satu jenis informasi ketahanan pangan dan gizi yang disediakan oleh Badan Ketahanan Pangan adalah informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dalam bentuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Penyusunan FSVA yang telah dimulai sejak tahun 2002 tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas* - FIA) tahun 2005 dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA) tahun 2009, 2015, 2018 dan 2019.

Hasil penyusunan FSVA memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan. FSVA dijadikan salah satu dasar dalam penetapan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan *stunting*, dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu pada tanggal 30 Oktober 2019 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS): Sinergi Dukungan Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan oleh 8 pihak, yaitu Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian; Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan; Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial; Direktur Jenderal Bina Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan Kepala Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional. Selain itu, juga telah ditanda tangani Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Menteri Dalam Negeri; Menteri Kesehatan; dan Menteri Desa dimana salah satu ruang lingkupnya adalah pengentasan daerah rentan rawan pangan.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama tersebut, Badan Ketahanan Pangan memanfaatkan FSVA sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi Program Pertanian Keluarga (PK), Pekarangan Pangan Lestari (P2L) serta Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU). Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memanfaatkan FSVA sebagai dasar dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan - Penanganan Daerah Tertinggal (PDRT-PDT). Bappenas memanfaatkan hasil FSVA sebagai salah satu dasar Perencanaan Pembangunan Pangan. Lembaga internasional seperti *World Food Programme* (WFP) memanfaatkan FSVA dalam menentukan lokasi intervensi kerentanan pangan. Sementara di tingkat daerah, sebagian pemerintah daerah telah menjadikan hasil rekomendasi FSVA sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program ketahanan pangan dan gizi.

Mengingat pentingnya FSVA sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan dan program ketahanan pangan, maka pemutakhiran FSVA perlu dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan terkini dapat mencerminkan kondisi dan fakta terbaru sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilakukan. Pemutakhiran FSVA tahun 2020 dilaksanakan di tingkat nasional dengan lokus kabupaten, di tingkat provinsi dengan lokus kecamatan, dan di 100 kabupaten/kota dengan lokus desa. Penyusunan FSVA tahun 2020 melibatkan partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait ketahanan pangan di tingkat pusat dan Dinas/Kantor Ketahanan Pangan provinsi di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Pusat.

1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Ketahanan Pangan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kerangka konseptual ketahanan pangan dalam penyusunan FSVA 2020 (Gambar 1.1.) dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan: ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan keamanan pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Pilar **ketersediaan pangan** didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Pilar **akses atau keterjangkauan pangan** didefinisikan sebagai **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Dalam kerangka ketahanan pangan, akses menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan fisik, ekonomi atau sosial.

Pilar pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang

ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

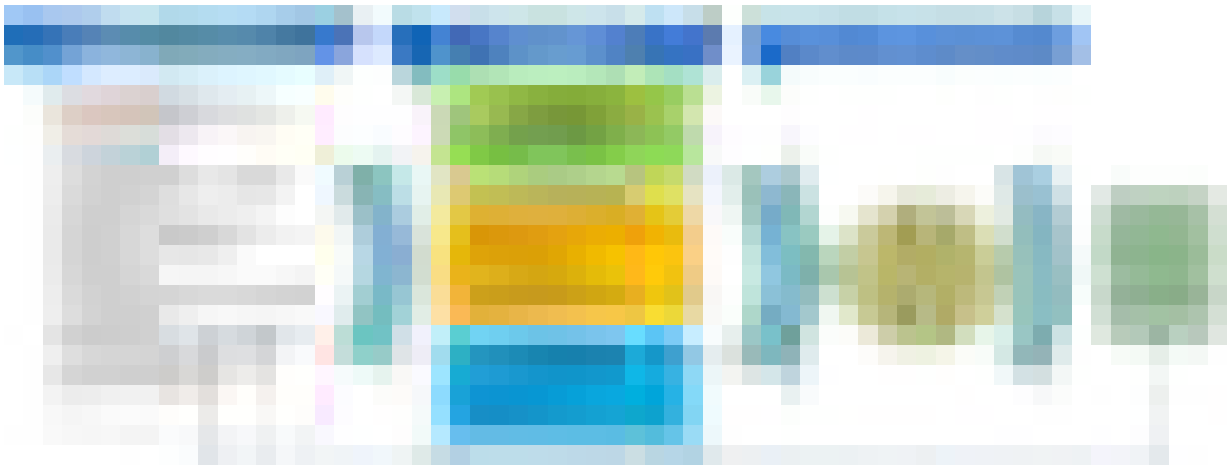

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi

Untuk mendukung berjalannya ketiga pilar tersebut diperlukan sumberdaya dan lingkungan strategis diantaranya situasi politik dan ekonomi makro yang kondusif, perdagangan internasional dan domestik yang berkeadilan bagi produsen dan konsumen, ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, kondisi iklim dan agroekologi serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung peningkatan produksi pangan. Memadainya sumberdaya dan lingkungan strategis akan memudahkan kinerja ketiga pilar ketahanan pangan untuk mewujudkan tujuan akhirnya yaitu meningkatnya status pangan dan gizi rumah tangga maupun nasional. Status pangan dan gizi rumah tangga dan nasional tercermin dari sumberdaya manusianya yang dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

1.3. Metodologi

Indikator

Ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi merupakan permasalahan multi-dimensi yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dari berbagai sektor. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu.

Berdasarkan hasil telaah Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Teknis FSVA, sebanyak 12 indikator digunakan dalam penyusunan FSVA (Tabel 1.1). Kedua belas indikator tersebut terbagi kedalam dua kelompok, yaitu sembilan indikator digunakan untuk mengukur kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis dan tiga indikator digunakan untuk mengukur kerentanan pangan transien. Kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, dan lain-lain.

Indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis, yaitu rasio konsumsi pangan terhadap produksi serealia, persentase penduduk miskin, pangsa pengeluaran pangan rumah tangga terhadap pengeluaran total, infrastruktur listrik, akses terhadap air minum dan fasilitas kesehatan, angka harapan hidup, tingkat pendidikan perempuan dan *stunting* pada balita. Kerentanan terhadap kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat. Indikator yang digunakan meliputi data kejadian bencana alam yang memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, estimasi hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan, serta variabilitas curah hujan. Perubahan faktor dinamis tersebut pada akhirnya mempengaruhi penyediaan, askesibilitas dan pemanfaatan pangan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan, dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data secara berkala.

Tabel 1.1 Ringkasan Indikator FSVA 2020

Indikator	Definisi	Sumber Data
Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dan Gizi Kronis		
Ketersediaan Pangan		
Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia dan umbi-umbian utama (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar). Konsumsi normatif serealia dan umbi-umbian utama adalah 300 gram/kapita/hari.	KSA 2019, Badan Pusat Statistik Kementan, 2019
Akses Pangan		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Dikategorikan miskin jika pengeluaran perkapita sebulan kurang dari garis kemiskinan provinsi (menurut kota dan desa)	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2019, BPS
Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk makanan lebih dari 65% dibandingkan dengan total pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan).	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2019, BPS
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator.	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2019, BPS
Pemanfaatan Pangan		
Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	Rata-rata lama bersekolah (total tahun bersekolah dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki) oleh perempuan berumur 15 tahun ke atas	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2019, BPS

Indikator	Definisi	Sumber Data
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	Persentase rumah tangga dengan sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari sumber tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2019, BPS
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk.	Profil Tenaga Kesehatan 2019, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes
Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar *(stunting)*	Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhada usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005).	Data Survei Status Gizi Balita Indonnesia (SSGBI 2019), Kementerian Kesehatan
Angka harapan hidup pada saat lahir	Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya.	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2019, BPS
Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien		
Bencana alam yang terkait iklim	Bencana alam yang terkait iklim dan perkiraan dampaknya terhadap ketahanan pangan.	Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), 2019
Variabilitas curah hujan	Perubahan curah hujan bulanan yang disebabkan oleh perubahan suhu permukaan laut sebesar satu derajat celcius.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 2019
Kehilangan produksi	Rata-rata hilangnya produksi tanaman pangan akibat banjir, kekeringan dan organisme penganggu tanaman (OPT).	Kementerian Pertanian, 2019

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris atau mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, pengelompokan delapan indikator dilakukan dengan mengikuti pola sebaran empiris, sedangkan pengelompokan satu indikator yaitu persentase balita *stunting* dilakukan dengan mengikuti aturan *World Health Organization* (WHO). Nilai *cut off point* yang ditentukan berdasarkan sebaran empiris dan aturan WHO yang selanjutnya digunakan untuk mengelompokkan wilayah disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Cut off Point Indikator Individu

Indikator	Range
Ketersediaan Pangan	
1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu	≥ 1,50 1,25 - <1,50 1,00 - <1,25 0,75 - <1,00 0,50 - <0,75 < 0,50
Akses terhadap Pangan	
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	≥ 35 25 - < 35 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 <10
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	≥ 70 60 - <70 50 - <60 40 - <50 30 - <40 < 30
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	≥ 50 40 - < 50 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 < 10
Pemanfaatan Pangan	
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	< 6 6 - < 6,5 6,5 - < 7,5 7,5 - < 8,5 8,5 - < 9 ≥ 9
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	≥ 70 60 - <70 50 - <60 40 - <50 30 - <40 < 30
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	≥30 20 - <30 15 - <20 10 - <15 5 - <10 <5

Indikator	Range
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar *(stunting)*	≥ 40 30 - < 39 20 - < 29 < 20
9. Angka harapan hidup pada saat lahir	≤58 >58 - 61 >61 - 64 >64 - 67 >67 - 70 > 70

2. Analisis Komposit

Berdasarkan kesepakatan dalam Kelompok Kerja Teknis FSVA, pendekatan yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Gobal Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan bahwa jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit sebagai berikut:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
2. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$\boldsymbol{Y(j) = \sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij}} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

i : Indikator ke 1, 2, …, 9

j : Kabupaten ke 1, 2, …, 416; Kota ke 1, 2, …, 98

Besaran bobot masing-masing indikator berdasarkan rekomendasi para ahli (*expert judgement*) yang berasal dari akademisi dan pemerintah (Tabel 1.3). Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya menggunakan delapan (8) indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan secara umum tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, pada perhitungan komposit wilayah perkotaan indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih tidak

digunakan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada 8 indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. Bobot setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.3 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
Aspek Ketersediaan Pangan			
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu	0,30	-
	Sub Total	**0,30**	**-**
Aspek Keterjangkauan Pangan			
2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	0,15	0,20
3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	0,075	0,125
4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075	0,125
	Sub Total	**0,30**	**0,45**
Aspek Pemanfaatan Pangan			
5	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15	0,18
6	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10	0,13
7	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05	0,08
8	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05	0,08
9	Prevalensi balita *stunting*	0,05	0,08
	Sub Total	**0,40**	**0,55**

3. Mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{i=1}^{9} a_i C_{ij} \ldots\ldots\ldots\

Tabel 1.4 Cut off Point Komposit

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
1	<= 41,52	<= 28,84
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13
5	> 67,75– 75,68	> 61,13 – 70,64
6	> 75,68	> 70,64

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kabupaten/kota yang diidentifikasikan relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua kecamatan, desa serta penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua kecamatan, desa serta penduduk di kabupaten Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan. Untuk dapat mengidentifikasikan daerah mana yang benar-benar rentan pangan pada level kecamatan dan desa, disarankan adanya tindak lanjut berupa pembuatan peta provinsi dan kabupaten.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta dengan menggunakan *software QGIS 2.18*. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menunjukkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2
KETERSEDIAAN PANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional atau impor apabila kedua sumber utama tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan didefinisikan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Sementara cadangan pangan nasional merupakan persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Dalam penyusunan FSVA, aspek ketersediaan pangan diwakili oleh indikator rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap ketersediaan pangan yang didekati dari aspek produksi. Berdasarkan definisi di atas, selain produksi domestik ketersediaan juga dapat dipenuhi dari cadangan pangan dan impor atau perdagangan antar wilayah. Data cadangan pangan dan perdagangan antar wilayah tidak digunakan karena terbatasnya ketersediaan data sampai dengan level kabupaten. Selain itu, wilayah yang mengandalkan penyediaan pangannya dari wilayah lain juga rentan terhadap gangguan/shock akibat perubahan harga, bencana alam maupun gangguan lain yang mempengaruhi distribusi bahan pangan. Sehingga, pendekatan produksi domestik dipandang masih relevan untuk mewakili indikator aspek ketersediaan pangan. Apabila data cadangan dan perdagangan antar wilayah tersedia di masa depan, maka penggunaannya dapat menyempurnakan hasil analisis FSVA.

Analisis indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan diwakili oleh kelompok bahan pangan karbohidrat yang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Penggunaan sumber karbohidrat juga didasarkan pada fakta bahwa pangan sumber karbohidrat menyumbang 50% dari angka kecukupan konsumsi energi harian yang direkomendasikan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Pangan sumber karbohidrat lainnya tidak dianalisis karena data hingga level kabupaten masih sangat terbatas.

Data produksi padi dan jagung selama sepuluh tahun terakhir meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 1,67% dan 3,28%, sedangkan produksi ubi kayu dan ubi jalar menunjukkan tren menurun sebesar -4,49% dan -2,87% (Tabel 2.1). Capaian produksi padi dan jagung pada tahun 2019 menunjukkan angka lebih tinggi dari produksi rata-rata selama 10 tahun terakhir.

Tabel 2.1 Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Tahun 2010-2019

Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata 10 tahun	Rata-rata pertumbuhan
Padi	47.389	46.881	49.233	50.818	50.509	53.754	56.575	57.854	59.201	54.604	52.682	1,67
Jagung	18.328	17.643	19.387	18.512	19.008	19.612	23.578	28.924	21.655	22.586	20.923	3,28
Ubi Kayu	23.918	24.044	24.177	23.937	23.436	21.801	20.260	19.054	19.341	15.488	21.546	-4,49
Ubi Jalar	2.051	2.196	2.483	2.387	2.383	2.298	2.169	1.914	2.029	1.482	2.139	-2,87

Sumber:

1. *Padi (BPS, 2020)*
2. *Jagung, ubi kayu, ubi jalar (Kementan, 2020)*

Provinsi-provinsi yang merupakan sentra produksi padi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Banten, NTB dan Kalimantan Selatan mencatatkan produksi padi di atas 1 juta ton per tahun. Namun demikian, upaya pengembangan area padi di daerah baru seperti Kabupaten Merauke, Provinsi Papua juga berkontribusi terhadap peningkatan produksi beras nasional. Produksi padi dari Kabupaten Merauke dilaporkan telah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pangan wilayah Papua.

Untuk komoditas jagung, Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai penghasil jagung terbesar disusul oleh Provinsi Jawa Tengah, Lampung, NTB, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sumatera Utara. Namun demikian, sampai dengan saat ini sebagian besar produksi jagung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Hanya beberapa wilayah yang mengkonsumsi jagung sebagai salah satu sumber pangan karbohidrat seperti di NTT dan Gorontalo.

Produksi ubi kayu didominasi oleh Provinsi Lampung dengan total produksi 5,2 juta ton pada tahun 2019. Provinsi lain dengan total produksi di atas 1 juta ton adalah Jawa Tengah 2,8 juta ton, Jawa Timur 1,8 juta ton, Jawa Barat 1,5 juta ton dan Sumatera Utara 1,1 juta ton. Pemanfaatan ubi kayu di Indonesia selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi segar, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri tapioka. Ubi kayu merupakan salah satu pangan lokal sumber karbohidrat yang disukai oleh masyarakat sehingga menjadi salah satu alternatif komoditas unggulan untuk diversifikasi pangan.

Sebagai salah satu sumber karbohidrat alternatif, produksi ubi jalar sampai dengan saat ini masih kalah jauh dibandingkan dengan produksi padi, jagung dan ubi kayu. Produksi ubi jalar nasional tahun 2019 baru tercatat sebesar 1,5 juta ton, dengan produksi tertinggi dihasilkan oleh Provinsi Jawa Barat dengan total 444,2 ribu ton. Produksi ubi jalar dimanfaatkan untuk konsumsi segar dan industri olahan makanan seperti keripik, makanan beku, pasta, tepung, saos dan lain-lain. Sebaran produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar tahun 2019 untuk setiap provinsi disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Tahun 2019

Provinsi	Produksi tahun 2019 (Ton)			
	Padi (GKG)	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Aceh	1.714.438	242.443	35.070	5.123
Sumatera Utara	2.078.902	1.298.165	1.121.596	84.846
Sumatera Barat	1.482.996	538.410	177.052	119.649
Riau	230.874	70.954	138.497	6.327
Jambi	309.933	58.918	63.267	53.701
Sumatera Selatan	2.603.396	681.326	149.086	15.194
Bengkulu	296.472	120.248	28.054	17.102
Lampung	2.164.089	2.173.972	5.158.391	27.326
Bangka Belitung	48.806	2.230	102.249	2.010
Kep. Riau	1.151	134	16.815	1.608
DKI Jakarta	3.359	-	-	-
Jawa Barat	9.084.957	981.204	1.460.790	444.215
Jawa Tengah	9.655.654	2.459.899	2.782.507	128.402
DI Yogyakarta	533.477	242.458	729.183	3.410
Jawa Timur	9.580.934	4.990.147	1.787.484	254.789

Provinsi	Produksi tahun 2019 (Ton)			
	Padi (GKG)	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Banten	1.470.503	81.877	55.834	12.502
Bali	579.321	37.921	29.607	13.124
NTB	1.402.182	1.785.537	53.981	17.864
NTT	811.724	653.065	495.235	28.885
Kalimantan Barat	847.875	226.214	225.501	21.628
Kalimantan Tengah	443.561	62.967	78.434	5.875
Kalimantan Selatan	1.342.862	435.063	49.358	11.582
Kalimantan Timur	253.818	83.144	56.891	11.801
Kalimantan Utara	33.357	3.206	33.394	2.311
Sulawesi Utara	277.776	965.577	64.801	20.311
Sulawesi Tengah	844.904	331.764	39.949	16.928
Sulawesi Selatan	5.054.167	1.730.798	260.036	75.276
Sulawesi Tenggara	519.707	219.455	152.037	20.568
Gorontalo	231.211	1.433.177	2.110	354
Sulawesi Barat	300.142	528.419	17.608	4.332
Maluku	98.255	34.889	67.743	21.200
Maluku Utara	37.946	94.295	27.214	5.285
Papua Barat	29.944	4.190	14.804	11.716
Papua	235.340	14.141	13.511	16.496
Indonesia	**54.604.033**	**22.586.207**	**15.488.089**	**1.481.740**

Sumber:

1. *Padi (BPS, 2020)*
2. *Jagung, ubi kayu, ubi jalar (Kementan, 2020)*

2.1. Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita terhadap Produksi

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi dihitung dengan cara membagi konsumsi normatif per kapita per hari (300 g) terhadap rata-rata ketersediaan bersih serealia dan umbi-umbian utama per kapita per hari. Ketersediaan bersih serealia dan umbi-umbian utama merupakan produksi yang tersedia untuk pangan, yaitu produksi total dikurangi dengan penggunaan untuk pakan, bibit dan komponen tercecer, dan telah memperhitungkan konversi yang berlaku untuk masing-masing komoditas pangan. Angka konversi yang digunakan dalam penghitungan ketersediaan bersih menggunakan angka konversi dalam Neraca Bahan Makanan Tahun 2020. Ketersediaan bersih per kapita per hari dihitung dengan cara membagi ketersediaan bersih serealia dan umbi-umbian utama terhadap jumlah penduduk suatu wilayah lalu dikalikan 365 hari. Sebagai catatan, nilai kalori ubi kayu dan ubi jalar masing-masing 1/3 dari nilai kalori beras atau jagung, sehingga produksi bersih ubi kayu dan ubi jalar masing-masing dibagi 3 untuk mendapatkan nilai yang ekuivalen dengan serealia.

Hasil analisis rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 62,74% kabupaten mengalami surplus dan 37,26% kabupaten mengalami defisit. Kabupaten yang mengalami defisit ketersediaan pangan terdapat di Provinsi Papua (6,5%), Papua Barat (2,6%), Riau (2,4%), Sumatera Utara (2,4%) dan Kalimantan Tengah (1,9%). Defisit ketersediaan pangan tersebut antara lain disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi serealia dan umbi-umbian, ketidaksesuaian dan/atau kurangnya ketersediaan lahan untuk produksi serealia dan umbi-umbian, perluasan areal perkebunan,

pertambangan, industri dan penambahan areal untuk perumahan. Selain itu, jumlah sagu maupun sumber karbohidrat lainnya seperti sorghum, keladi/talas dan pisang yang dikonsumsi penduduk di beberapa provinsi seperti Papua, Papua Barat, Riau, Maluku, Maluku Utara, dan NTT belum diikutsertakan dalam perhitungan FSVA karena keterbatasan ketersediaan data pada level kabupaten. Ke depan, penyediaan data sumber karbohidrat lain selain beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar perlu dioptimalkan, agar rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan bagi wilayah-wilayah yang konsumsi sumber karbohidratnya lebih beragam dapat disampaikan dengan akurat.

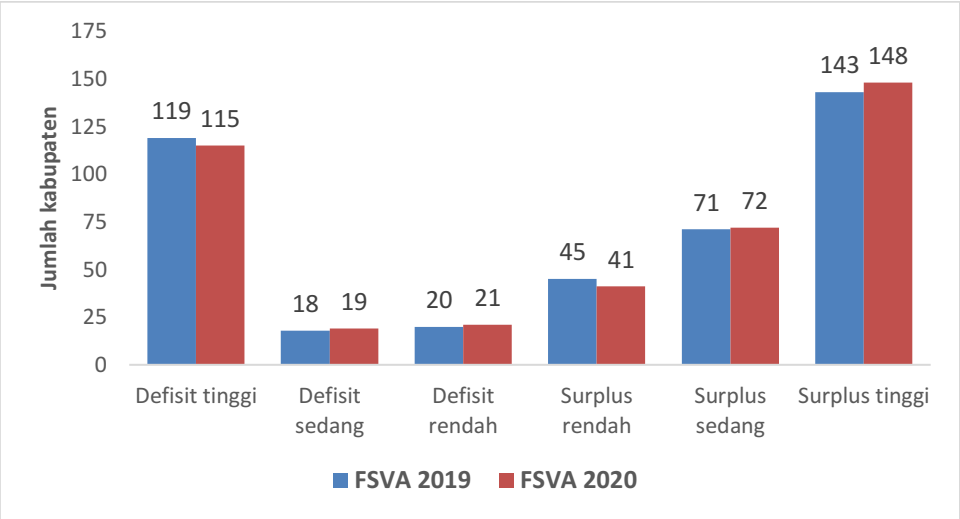

Gambar 2.1 Sebaran Kelompok Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Bersih Serealia Kabupaten

Secara agregat situasi ketersediaan pangan pada FSVA 2020 lebih baik dibandingkan dengan situasi pada FSVA 2019, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kabupaten yang berada pada klasifikasi memiliki surplus tinggi dan menurunnya jumlah kabupaten yang sebelumnya berada pada klasifikasi defisit tinggi. Secara detail perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan pada 71 kabupaten yang mengalami peningkatan peringkat.

Dari total 71 kabupaten yang mengalami peningkatan peringkat, 44 persen merupakan kabupaten dalam kelompok surplus sedang yang naik peringkat menjadi kelompok surplus tinggi. Kabupaten-kabupaten tersebut tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Kabupaten yang mengalami kenaikan peringkat cukup signifikan antara lain Kabupaten Nias (Provinsi Sumatera Utara) yang mengalami kenaikan lima peringkat, serta Kabupaten Kolaka Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Manokwari Selatan (Provinsi Papua Barat) yang mengalami kenaikan empat peringkat. Kenaikan peringkat ini disebabkan oleh meningkatnya produksi padi untuk Kabupaten Nias, jagung untuk Kabupaten Kolaka Utara dan padi, ubi kayu dan ubi jalar untuk Kabupaten Manokwari Selatan. Kenaikan produksi tersebut sekaligus menandai keberhasilan program peningkatan produksi pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara itu, 287 kabupaten (69 persen) yang terdiri dari 123 kabupaten surplus tinggi dan 100 kabupaten defisit tinggi tidak mengalami perubahan peringkat. Kabupaten yang termasuk kelompok surplus tinggi tersebar di wilayah sentra produksi pangan seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan

kabupaten pada kelompok defisit tinggi tersebar di Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Provinsi yang berada pada kelompok defisit tinggi diketahui bukan merupakan daerah sentra produksi padi dan jagung. Produksi ubi jalar di Papua dan Papua Barat masih terkendala dalam pencatatannya sehingga data potensi produksi belum terdata dengan baik. Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan area produksi pangan salah satunya dengan pengembangan *food estate*. Pembukaan sentra produksi baru di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan nasional menggantikan lahan pertanian yang mengalami konversi.

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia dan umbi-umbian di wilayah perkotaan hasil FSVA 2020 tidak berbeda jauh dengan FSVA 2019. Kecuali Kota Solok (Provinsi Sumatera Barat), Sungai Penuh (Provinsi Jambi), Bima (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Tomohon (Provinsi Sulawesi Utara) dan Kotamobago (Provinsi Sulawesi Utara), penyediaan pangan sebagian besar kota masuk dalam kategori defisit tinggi. Hal ini terjadi karena umumnya wilayah perkotaan tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan memenuhi ketersediaan pangannya melalui perdagangan antar wilayah.

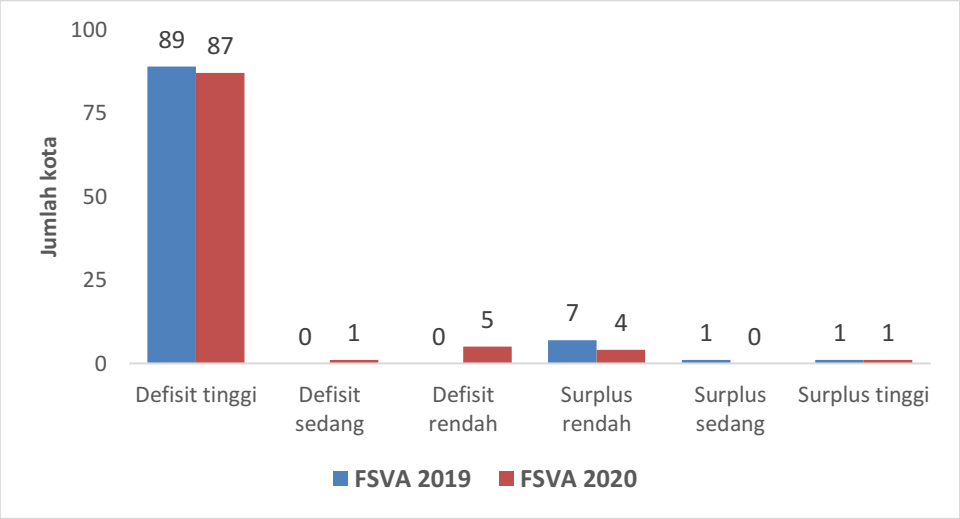

Gambar 2.2 Sebaran Kelompok Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Bersih Serealia Kota

Pada FSVA 2020, 5 kota mengalami peningkatan peringkat, 6 kota mengalami penurunan peringkat dan sebanyak 87 kota lainnya tidak mengalami perubahan peringkat dibandingkan FSVA tahun 2019. Kota yang mengalami kenaikan peringkat adalah Kota Solok (Sumatera Barat), Kota Kotamobago (Sulawesi Utara), Kota Banjar (Jawa Barat), Kota Tidore Kepulauan (Maluku Utara) dan Kota Palopo (Sulawesi Selatan). Sedangkan kota yang mengalami penurunan peringkat adalah Sawah Lunto, Payakumbuh, Pariaman (Sumatera Barat), Padang Sidempuan (Sumatera Utara), Probolinggo (Jawa Timur) dan Pagar Alam (Sumatera Selatan).

2.2. Capaian Ketersediaan Pangan

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian selama tahun 2019 telah berhasil meningkatkan rata-rata produksi pangan strategis sebesar 7%. Peningkatan produksi tercatat pada komoditas jagung sebesar 4,30%, cabai sebesar 1,19%, bawang merah sebesar 4,59% dan gula tebu sebesar 2,42%. Peningkatan produksi pertanian ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan dukungan sarana dan prasarana usaha pertanian seperti ketersediaan air irigasi, alat dan mesin pertanian, serta luas baku lahan pertanian yang lebih baik. Upaya meningkatkan ketersediaan air irigasi dilakukan melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 154.666 ha, dengan nilai capaian sebesar 37,89% dari total rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan/rusak. Angka ini telah melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 33,30%. Selain itu, Kementerian Pertanian juga telah memfasilitasi 63,55% kebutuhan alat dan mesin pertanian atau 92,90% dari target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 68,40%. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan telah mendorong penghematan tenaga kerja sebanyak 70-80%, penghematan biaya produksi 30-40%, peningkatan produksi 10-20 %, dan penurunan kehilangan hasil saat panen dari 20% menjadi 10%. Di sisi lain, total luas baku lahan pertanian sebesar 7.469.948 ha, yang diperoleh dari data Luas Baku Sawah (LBS) 2019 dan kegiatan cetak sawah selama 2019, telah melebihi luas baku lahan sesuai kebutuhan sebesar 7.060.000 ha yang dikeluarkan oleh Pusdatin, Kementerian Pertanian.

Keberhasilan sektor pertanian pada tahun 2019 juga dapat dilihat dari meningkatnya persentase volume ekspor komoditas pertanian sebesar 17,5% dibandingkan dengan ekspor tahun 2018. Peningkatan tersebut sebagian besar disumbang oleh peningkatan ekspor pada komoditas telur tetas, DOC, jambu mete, dan jahe. Selain itu, volume impor pertanian juga menunjukkan penurunan sebesar 5,85%, dengan penurunan tertinggi pada komoditas itik, yoghurt, bawang putih, kacang hijau, dan ubi kayu. Capaian penurunan volume impor ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 6,61%.

2.3. Tantangan untuk Ketersediaan Pangan

Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, produktivitas, dan penanganan pascapanen serta pengendalian *food loss and waste* merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan pangan di masa mendatang. Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sekitar 255,59 juta jiwa. Sedangkan tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar 318,96 juta jiwa (BPS, 2015). Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti oleh peningkatan pendapatan dan proporsi kelompok usia produktif berbanding lurus dengan peningkatan permintaan pangan.

Selain jumlahnya yang meningkat, pergeseran preferensi masyarakat terhadap makanan akan meningkatkan standar kualitas pangan dan permintaan jenis-jenis pangan tertentu. Pergeseran preferensi pangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan, pengetahuan, dan informasi terutama pada kelas pendapatan menengah di perkotaan sehingga lebih peduli pada kesehatan dan gaya hidup (*lifestyle)*. Pada tahun 2015, persentase penduduk kota sebesar 53,3%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 56,7% dan diproyeksikan akan mencapai lebih dari 70% pada tahun 2045 (BPS, 2015).

Sebagai negara agraris, Indonesia telah mengekspor hasil pertanian terutama tanaman tahunan, yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan kakao dalam beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan pengimpor beberapa komoditas pangan seperti gandum, daging sapi, buah-buahan, sayuran dan susu. Nilai impor gandum pada tahun 2019 mencapai 10,69 juta ton atau meningkat 0,6 juta ton dibandingkan tahun 2018, sedangkan nilai impor daging sapi tahun 2019 mencapai 0,2 juta ton atau meningkat 22,7% dibandingkan tahun 2018. Pemanfaatan sumber karbohidrat alternatif pangan lokal seperti sagu, ubi kayu, jagung, kentang, talas, dan sumber protein alternatif seperti daging ayam, telur dan ikan harus terus diupayakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras, impor gandum dan daging sapi.

Permasalahan tingginya kehilangan pangan (*food loss*) dan pemborosan pangan (*food waste*) dalam sistem pangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan pangan di Indonesia. Berdasarkan the *State of Food and Agriculture* (SOFA) FAO 2019, empat belas persen dari makanan yang diproduksi secara global diperkirakan hilang selama tahap pasca panen sebelum mencapai ritel. Buah-buahan dan sayuran menjadi komoditas dengan tingkat kehilangan dan pemborosan pangan yang lebih tinggi dibandingkan komoditas sereal dan kacang-kacangan untuk seluruh rantai pasok pangan. Secara umum, penyebab kehilangan pangan antara lain karena waktu panen tidak tepat, penanganan pasca panen tidak tepat, kondisi penyimpanan yang tidak memadai, serta pengemasan dan distribusi yang tidak sesuai. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal teknis telah menyediakan dan memperbarui alat-alat pasca panen untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura. Pemanfaatan alat pasca panen seperti *combine harvester*, mesin pengering, mesin penggiling, *screen house*, mesin pendingin dan lain-lain telah berkontribusi terhadap penurunan kehilangan pangan. Pemborosan pangan terjadi karena perilaku/kebiasaan yang tidak tepat sehingga makanan yang masih layak konsumsi menjadi terbuang sia-sia. Untuk dapat memperbaiki sikap dan kebiasaan seseorang dalam memperlakukan makanan, membutuhkan waktu dan pemahaman yang tepat. Oleh karena itu edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya menghargai makanan dan mengelola bahan pangan harus terus dilakukan dan diarahkan sejak usia dini. Diperlukan pula upaya yang lebih masif untuk mendorong penurunan *food loss and waste* di tingkat produsen, distributor, retail, industri pangan dan rumah tangga.

Pertanian Indonesia juga dihadapkan pada persoalan sumber daya manusia yang "menua". Selain itu jumlah tenaga kerja sektor pertanian juga terus menurun dari 35,26 juta orang pada tahun 2015 menjadi 31,87 juta pada tahun 2019. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus tahun 2018 juga menunjukkan bahwa terlihat peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem (RTP yang menguasai lahan kurang dari 0,50 ha) yaitu sebesar 14,25 juta rumah tangga (2013) menjadi 15,81 juta rumah tangga (2018) atau sebesar 58,07% dari total rumah tangga petani (BPS, 2018). Oleh karena itu upaya untuk menarik generasi muda untuk berkontribusi dalam sektor pertanian perlu terus diupayakan. Kementerian Pertanian telah melakukan upaya-upaya yang strategis untuk menarik minat generasi muda pada sektor pertanian dengan pembukaan sekolah-sekolah vokasi pertanian serta membuat sektor pertanian menjadi lebih kompetitif melalui penyediaan fasilitasi pembiayaan dan asuransi pertanian.

Tantangan lain yang masih dihadapi dalam penyediaan pangan di Indonesia adalah: (i) konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian akibat persaingan penggunaan lahan terutama dengan sektor perumahan dan industri, perkebunan dan pertambangan; (ii) meningkatnya kejadian kekeringan dan banjir sebagai dampak dari perubahan iklim global; (iii) penurunan kualitas tanah dan kesuburan karena kerusakan lingkungan; (iv) hama dan penyakit pada tanaman dan ternak yang dapat berpotensi mengurangi tingkat produksi; serta (v) produktivitas petani yang masih rendah terutama petani gurem yang disebabkan oleh kurangnya akses ke pasar untuk menjual hasil produksi dan kurangnya akses ke fasilitas modal.

BAB 3
AKSES TERHADAP PANGAN

Akses pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga dan individu untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Akses pangan menjadi penting karena pangan mungkin tersedia secara fisik di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga atau individu karena terbatasnya akses fisik, akses ekonomi, dan/atau akses sosial. Aspek akses pangan pada FSVA 2020 diproksi didekati dari tiga indikator, yaitu: (i) persentase rumah tangga tanpa akses listrik; (ii) persentase penduduk di bawah garis kemiskinan; dan (iii) persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran.

3.1 Akses terhadap Listrik

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar dalam peningkatan perekonomian daerah. Tersedianya fasilitas listrik merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi et al. 2014; Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Berdasarkan hasil SUSENAS 2019 (BPS 2019), rumah tangga yang memiliki akses listrik sudah mencapai 98,85% atau meningkat 1,31% dari tahun 2015 (97,54%). Data tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia telah dialiri listrik. Namun demikian masih terdapat daerah yang memiliki persentase rumah tangga tanpa akses listrik yang tinggi, yaitu Provinsi Papua (Tabel 3.1). Provinsi Papua memiliki persentase rumah tangga tanpa akses listrik sebesar 27,63%. Rumah tangga tanpa akses listrik di Provinsi Papua masih relatif tinggi disebabkan oleh masih terbatasnya instalasi listrik di 6 kabupaten yaitu Puncak (97,21%), Dogiyai (95,99%), Yahukimo (84,30%), Paniai (61,45%), Mappi (56,62%), dan Nduga (50,13%).

Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik per Provinsi 2015-2019

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	1,56	1,26	0,98	0,58	0,45
Sumatera Utara	3,19	3,16	2,59	2,45	1,63
Sumatera Barat	3,83	2,98	2,19	1,64	1,20
Riau	4,48	3,43	3,31	2,51	2,35
Jambi	5,14	3,48	2,04	2,65	1,15
Sumatera Selatan	2,55	2,36	1,70	1,26	0,90
Bengkulu	3,09	3,11	1,89	1,95	1,21
Lampung	1,56	1,50	0,94	0,46	0,36
Bangka Belitung	1,43	1,20	0,83	0,46	0,29
Kep. Riau	1,04	0,90	0,90	0,74	0,36
DKI Jakarta	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	0,17	0,15	0,09	0,06	0,04
Jawa Tengah	0,08	0,12	0,09	0,08	0,07

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik				
	2015	2016	2017	2018	2019
DI Yogyakarta	0,18	0,07	0,10	0,08	0,18
Jawa Timur	0,13	0,15	0,08	0,15	0,11
Banten	0,26	0,28	0,05	0,23	0,14
Bali	0,33	0,27	0,15	0,18	0,13
NTB	0,95	0,61	0,57	0,32	0,23
NTT	26,09	27,86	22,64	17,66	14,02
Kalimantan Barat	11,71	10,83	8,49	6,80	5,23
Kalimantan Tengah	7,55	6,01	4,00	2,96	2,10
Kalimantan Selatan	1,50	1,26	0,84	0,54	0,42
Kalimantan Timur	1,27	1,33	0,86	0,47	0,54
Kalimantan Utara	4,02	2,00	2,38	1,29	0,28
Sulawesi Utara	0,87	0,64	0,70	0,53	0,45
Sulawesi Tengah	7,65	7,21	5,15	4,59	3,66
Sulawesi Selatan	2,67	2,42	1,47	1,10	0,82
Sulawesi Tenggara	6,55	5,89	3,45	1,57	1,28
Gorontalo	7,24	4,95	3,14	2,92	1,2
Sulawesi Barat	8,62	5,75	4,61	3,60	1,97
Maluku	11,93	11,86	8,65	7,37	4,84
Maluku Utara	11,64	10,01	5,77	4,76	4,48
Papua Barat	11,12	13,61	9,90	7,69	5,64
Papua	46,83	49,10	44,19	34,10	27,63
Indonesia	**2,46**	**2,38**	**1,86**	**1,49**	**1,15**

Sumber: SUSENAS 2015-2019, BPS

Akses listrik rumah tangga pada FSVA 2020 semakin meningkat dibandingkan situasi pada FSVA 2019. Jumlah kabupaten dengan persentase rumah tangga tanpa akses listrik ≥50% (sangat buruk) turun dari dari 11 kabupaten pada FSVA 2019 menjadi 6 kabupaten pada FSVA 2020 yang seluruhnya ada di Provinsi Papua. Di sisi lain, jumlah kabupaten dengan persentase rumah tangga tanpa akses listrik <10% (sangat baik) naik dari 350 kabupaten pada FSVA 2019 menjadi 362 kabupaten pada FSVA 2020.

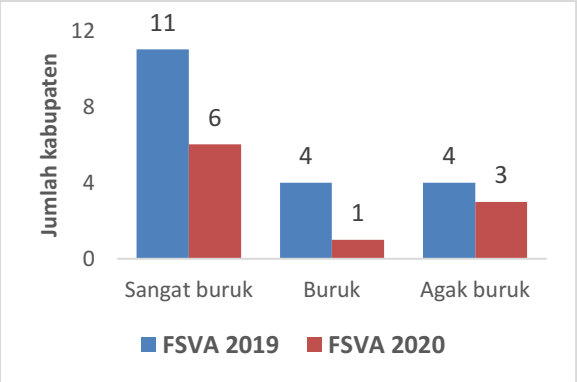

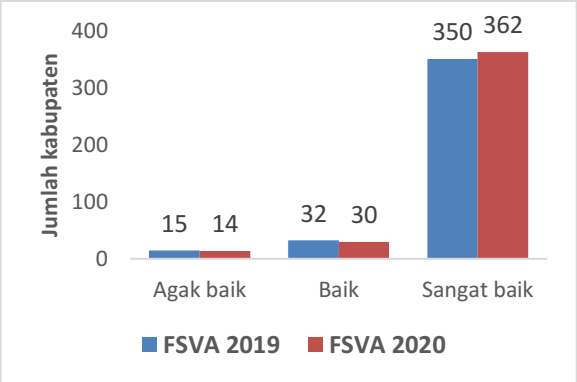

Gambar 3.1 Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik Kabupaten

3.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerentanan pangan. Tanpa akses ekonomi yang memadai, rumah tangga dan individu cenderung memiliki pilihan yang terbatas untuk mendapatkan pangan yang beragam. Secara global, seseorang yang hidup di bawah ambang batas US$ 1,25 – *Purchasing Power Parity* (PPP) Bank Dunia per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Indonesia, pemerintah menggunakan garis kemiskinan nasional (Rp 442.062 per orang/bulan untuk daerah perkotaan dan Rp 404.398 per orang/bulan untuk pedesaan pada Maret 2019) untuk tujuan perencanaan dan penentuan tujuan pembangunan.

Persentase jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami tren yang menurun selama lima tahun terakhir, yaitu 11,22% pada Maret 2015 menjadi 9,41% pada Maret 2019. Provinsi dengan tingkat persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2019 adalah Papua, yaitu sebesar 27,53%, diikuti oleh Papua Barat 22,17% dan Nusa Tenggara Timur 21,09%. Meskipun persentase kemiskinan menurun, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tercatat cukup tinggi, yaitu 25,14 juta orang pada tahun 2019. Dari seluruh penduduk miskin di Indonesia, sekitar 15,15 juta jiwa (60,25%) tinggal di daerah pedesaan dan 9,99 juta jiwa (39,75%) tinggal di daerah perkotaan.

Penurunan kemiskinan diikuti oleh penurunan kesenjangan pendapatan yang diukur menggunakan koefisien gini (*gini ratio*). Koefisien gini mengalami penurunan, yaitu dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,380 pada tahun 2019 yang menunjukkan semakin kecil kesenjangan antara penduduk kaya dengan miskin.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan per Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi	Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	17,08	16,73	16,89	15,97	15,32
Sumatera Utara	10,53	10,35	10,22	9,22	8,83
Sumatera Barat	7,31	7,09	6,87	6,65	6,42
Riau	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08
Jambi	8,86	8,41	8,19	7,92	7,60
Sumatera Selatan	14,25	13,54	13,19	12,8	12,71
Bengkulu	17,88	17,32	16,45	15,43	15,23
Lampung	14,35	14,29	13,69	13,14	12,62
Bangka Belitung	5,40	5,22	5,20	5,25	4,62
Kep. Riau	6,24	5,98	6,06	6,20	5,90
DKI Jakarta	3,93	3,75	3,77	3,57	3,47
Jawa Barat	9,53	8,95	8,71	7,45	6,91
Jawa Tengah	13,58	13,27	13,01	11,32	10,80
DI Yogyakarta	14,91	13,34	13,02	12,13	11,70
Jawa Timur	12,34	12,05	11,77	10,98	10,37
Banten	5,90	5,42	5,45	5,24	5,09
Bali	4,74	4,25	4,25	4,01	3,79
NTB	17,10	16,48	16,07	14,75	14,56
NTT	22,61	22,19	21,85	21,35	21,09
Kalimantan Barat	8,03	7,87	7,88	7,77	7,49
Kalimantan Tengah	5,94	5,66	5,37	5,17	4,98
Kalimantan Selatan	4,99	4,85	4,73	4,54	4,55
Kalimantan Timur	6,23	6,11	6,19	6,03	5,94
Kalimantan Utara	6,24	6,23	7,22	7,09	6,63

Provinsi	Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Utara	8,65	8,34	8,10	7,80	7,66
Sulawesi Tengah	14,66	14,45	14,14	14,01	13,48
Sulawesi Selatan	9,39	9,40	9,38	9,06	8,69
Sulawesi Tenggara	12,90	12,88	12,81	11,63	11,24
Gorontalo	18,32	17,72	17,65	16,81	15,52
Sulawesi Barat	12,40	11,74	11,30	11,25	11,02
Maluku	19,51	19,18	18,45	18,12	17,69
Maluku Utara	6,84	6,33	6,35	6,64	6,77
Papua Barat	25,82	25,43	25,10	23,01	22,17
Papua	28,17	28,54	27,62	27,74	27,53
Indonesia	**11,22**	**10,86**	**10,64**	**9,82**	**9,41**

Sumber: SUSENAS 2015-2019, BPS

Sebaran penduduk miskin di kabupaten diklasifikasikan dalam enam kelompok, yaitu sangat buruk, buruk, agak buruk, agak baik, baik, dan sangat baik. Jumlah kabupaten dengan tingkat kemiskinan >20% (agak buruk, buruk dan sangat buruk) pada FSVA 2020 lebih rendah dibandingkan pada FSVA 2019. Kabupaten dengan klasifikasi sangat buruk dan agak buruk turun dari 13 dan 20 kabupaten pada FSVA 2019 menjadi 11 dan 14 kabupaten pada FSVA 2020, sedangkan jumlah kabupaten dengan klasifikasi buruk tidak mengalami perubahan.

Kabupaten dengan persentase penduduk miskin >35% terdapat di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Deiyai (43,65%), Intan Jaya (42,92%), Lanny Jaya (39,52%), Yahukimo (38,82%), Supiori (38,79%), Jayawiyaja (38,33%), Nduga (38,24%), Puncak (38,24%), Paniai (37,16%), Mamberamo Tengah (36,93%) dan Puncak Jaya (35,71%). Sedangkan kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebesar 1,78%. Secara umum, masyarakat di Provinsi Bali telah berhasil lepas dari kemiskinan. Tingginya aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh pariwisata berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Provinsi Bali.

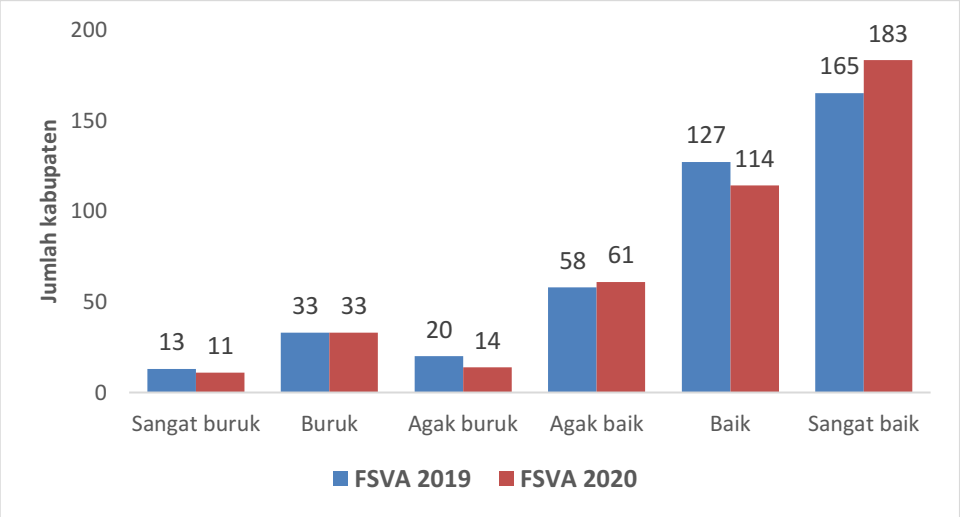

Gambar 3.2 Sebaran Kelompok Penduduk Miskin Kabupaten

Dibandingkan dengan wilayah perdesaan, wilayah perkotaan memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih baik. Hampir seluruh perkotaan di Indonesia (98,98%) termasuk dalam klasifikasi agak baik sampai sangat baik. Hanya satu kota yang termasuk klasifikasi agak buruk yaitu Kota Tual. Secara umum

tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan klasifikasi kota berdasarkan persentase penduduk miskinnya. Dari 98 kota di Indonesia, hanya Kota Tebing Tinggi yang mengalami peningkatan status dibandingkan FSVA 2019, yaitu dari klasifikasi baik menjadi sangat baik.

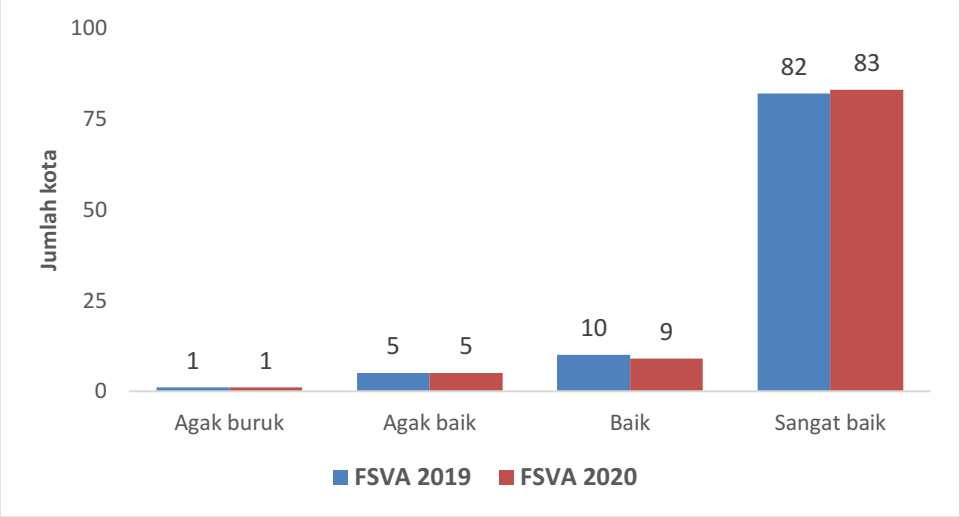

Gambar 3.3 Sebaran Kelompok Penduduk Miskin Kota

Peta 3.2 Peta Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

3.3 Pangsa Pengeluaran Pangan

Persentase pengeluaran untuk pangan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan rumah tangga. Deaton dan Muellbauer (1980) menyatakan bahwa semakin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian pula sebaliknya. Hal tersebut tersebut sejalan dengan teori Engel yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan semakin turun. Selain itu, Shan (1994) juga menyatakan bahwa pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk pendapatan permanen dan merupakan indikator yang penting untuk melihat malnutrisi kronis dalam jangka panjang. Pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan karena makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang (Suhardjo, 1996; Azwar, 2004). Selanjutnya, jika distribusi pengeluaran untuk pangan lebih besar dari 65% dari total pengeluaran maka distribusi pengeluaran rumah tangga tersebut dikategorikan buruk (BKP dan WFP, 2010; WFP, 2009).

Berdasarkan data Susenas Maret 2019, 29,09% rumah tangga di Indonesia memiliki pengeluaran pangan >65%. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Aceh menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan >65% tertinggi yaitu 54,91% dan 41,27%. Tingginya persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan >65% dapat mengindikasikan harga pangan yang relatif tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi tersebut masih tergolong rendah. Diperlukan upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dan usaha produktif, agar terjadi peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan yang merata di seluruh provinsi juga diperlukan agar rumah tangga dapat memperolehnya dengan harga yang terjangkau.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan >65% menurun sebesar 0,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Namun demikian, peningkatan persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan >65% masih terjadi di 16 provinsi. Peningkatan persentase tertinggi dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 7,98%, diikuti Provinsi Sulawesi Barat sebesar 6,94% dan Provinsi Banten sebesar 4,59%. Peningkatan pangsa pengeluaran pangan >65% disebabkan oleh peningkatan harga bahan pangan di wilayah tersebut.

Tabel 3.3 Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% Tahun 2017-2019

Provinsi	2017	2018	2019
Aceh	48,26	40,89	41,27
Sumatera Utara	43,39	35,47	34,80
Sumatera Barat	40,45	32,05	30,56
Riau	30,96	22,95	22,25
Jambi	41,00	30,81	32,12
Sumatera Selatan	36,58	25,91	26,65
Bengkulu	35,83	28,42	26,42
Lampung	35,46	29,11	28,50
Kepulauan Bangka Belitung	22,33	15,40	16,22

Provinsi	2017	2018	2019
Kepulauan Riau	11,88	10,97	7,44
DKI Jakarta	15,06	15,32	16,60
Jawa Barat	35,61	34,85	36,65
Jawa Tengah	31,31	28,70	26,49
DI Yogyakarta	25,96	18,92	20,24
Jawa Timur	38,12	33,94	30,68
Banten	25,44	26,74	31,33
Bali	12,85	15,32	13,15
Nusa Tenggara Barat	39,28	49,63	27,88
Nusa Tenggara Timur	55,76	46,93	54,91
Kalimantan Barat	36,69	27,27	27,39
Kalimantan Tengah	35,01	23,70	23,00
Kalimantan Selatan	32,22	25,62	25,11
Kalimantan Timur	13,01	9,82	9,51
Kalimantan Utara	18,90	11,09	15,04
Sulawesi Utara	38,14	24,91	25,32
Sulawesi Tengah	31,98	24,68	27,45
Sulawesi Selatan	26,44	19,99	18,25
Sulawesi Tenggara	17,81	15,06	13,84
Gorontalo	22,88	14,72	12,35
Sulawesi Barat	38,29	32,38	39,31
Maluku	29,60	19,36	23,26
Maluku Utara	24,07	17,40	18,97
Papua Barat	20,57	25,61	19,17
Papua	44,08	34,76	34,74
Total	**33,55**	**29,69**	**29,09**

Sumber: BPS, 2019

Terdapat 10 kabupaten yang tersebar di Provinsi Papua (5 kabupaten), Nusa Tenggara Timur (4 kabupaten) dan DKI Jakarta (1 kabupaten) masuk dalam kategori sangat buruk, dimana lebih dari 70 persen rumah tangga yang ada di wilayah tersebut memiliki proporsi pengeluaran untuk pangan >65%. Enam dari 10 kabupaten tersebut (Kabupaten Mamberamo Tengah, Tolikara, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara dan Kepulauan Seribu) mengalami penurunan status, sedangkan empat kabupaten lainnya tetap yaitu Kabupaten Puncak, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang dan Manggarai Timur. Kabupaten dengan persentase rumah tangga tertinggi dari sisi pengeluaran pangan adalah Kabupaten Puncak (93,56%) diikuti Tolikara (86,54%) dan Pegunungan Bintang (85,30%).

Jumlah kabupaten yang masuk dalam klasifikasi sangat baik (persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan >65% sebesar <30%) tersebar di 199 kabupaten meningkat sebanyak 10 kabupaten atau 5,29 persen dibandingkan FSVA 2019. Kabupaten Gianyar (Provinsi Bali) memiliki persentase terendah yaitu 2,62%, diikuti oleh Kabupaten Badung 4,11% dan Kabupaten Belitung 6,63%.

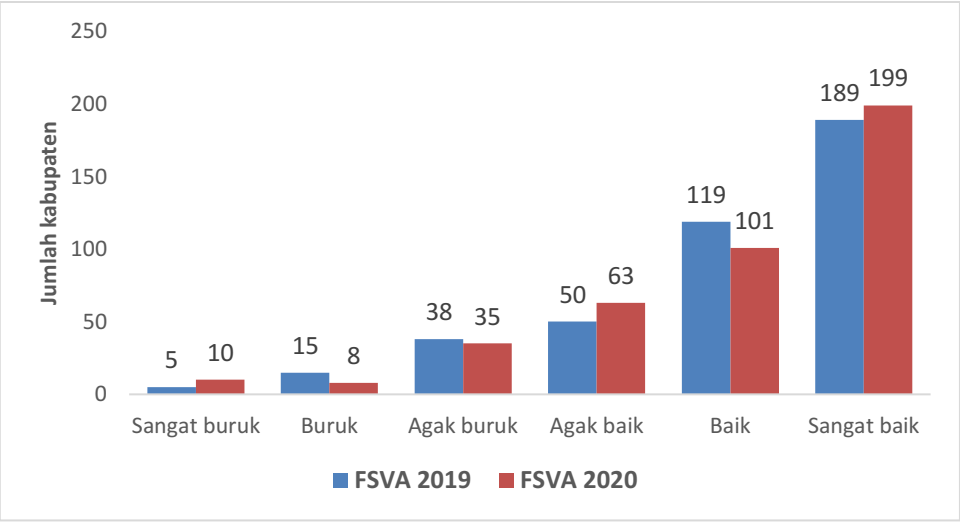

Gambar 3.4 Sebaran Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% Kabupaten

Sebaran kota yang masuk klasifikasi agak buruk, agak baik, dan baik dari sisi pengeluaran pangan mengalami penurunan dibandingkan FSVA 2019, sedangkan untuk klasifikasi sangat baik mengalami penambahan sebanyak empat kota. Kota yang mengalami peningkatan status adalah Subulussalam (Provinsi Aceh), Pematang Siantar (Provinsi Sumatera Utara), Pariaman (Provinsi Sumatera Barat), Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan), Tasikmalaya dan Banjar (Provinsi Jawa Barat), Pekalongan (Provinsi Jawa Tengah), Pasuruan (Provinsi Jawa Timur) dan Bima (Provinsi Nusa Tenggara Barat). Kota yang mengalami penurunan status dibandingkan FSVA 2019 adalah Tanjung Balai (Provinsi Sumatera Utara) dan Pagar Alam (Provinsi Sumatera Selatan). Kota dengan persentase rumah tangga yang memiliki pengeluaran pangan >65% terkecil berturut-turut adalah Kota Bima 14,18%, Kota Lubuk Linggau 15,84%, dan Kota Pematang Siantar 20,57%.

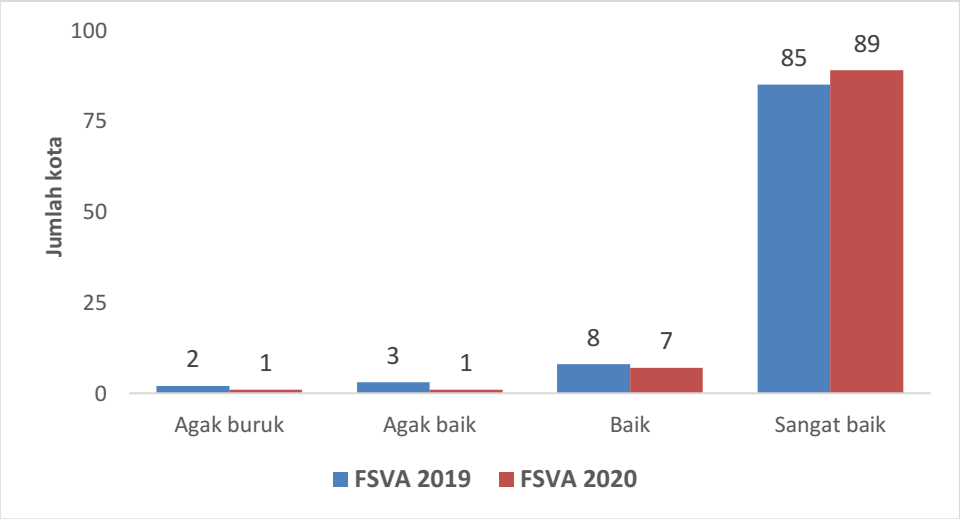

Gambar 3.5 Sebaran Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% Kota

Peta 3.3 Peta Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran

BAB 4
PEMANFAATAN PANGAN

Pemanfaatan pangan umumnya dipahami sebagai cara tubuh manusia untuk memanfaatkan berbagai nutrisi yang diperoleh dari makanan, yang pada akhirnya menentukan status gizi individu. Asupan energi dan nutrisi yang cukup diperoleh dari pola makan yang baik, penyiapan makanan yang baik, keragaman diet/makanan, distribusi makanan antar anggota keluarga dalam rumah tangga, ketersediaan air bersih, tingkat kebersihan dan kesehatan tubuh, dan lain-lain. Aspek pemanfaatan pangan pada FSVA didekati dari tiga indikator, yaitu: (i) tenaga kesehatan; (ii) akses air bersih; dan (iii) lama sekolah perempuan.

4.1. Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi terkait dengn gizi dan perilaku hidup sehat juga menjadi tugas pelayanan tenaga kesehatan. Kesehatan masyarakat yang baik akan menunjang fungsi pemanfaatan pangan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas sektor kesehatan harus terus diupayakan untuk meningkatkan status kesehatan setiap individu.

Tabel 4.1 Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk 2017-2019

Provinsi	Rasio Jumlah Penduduk per Tenkes terhadap Kepadatan Penduduk		
	2017	2018	2019
Aceh	2,06	2,07	2,20
Sumatera Utara	1,80	1,76	1,65
Sumatera Barat	2,48	2,48	2,30
Riau	4,78	4,53	4,75
Jambi	3,80	3,58	3,66
Sumatera Selatan	3,38	3,12	3,15
Bengkulu	2,25	2,10	2,16
Lampung	1,86	1,25	1,59
Bangka Belitung	3,21	0,37	2,69
Kep. Riau	1,36	1,23	1,15
DKI Jakarta	0,01	0,01	0,01
Jawa Barat	0,46	0,47	0,48
Jawa Tengah	0,45	0,38	0,37
DI Yogyakarta	0,22	0,18	0,20
Jawa Timur	0,63	0,49	0,51
Banten	0,49	0,50	0,46
Bali	0,35	0,31	0,33
NTB	1,55	1,05	1,41
NTT	3,69	3,00	3,32
Kalimantan Barat	10,87	9,59	11,19
Kalimantan Tengah	15,78	9,00	14,17

Provinsi	Rasio Jumlah Penduduk per Tenkes terhadap Kepadatan Penduduk		
	2017	2018	2019
Kalimantan Selatan	2,50	2,60	2,65
Kalimantan Timur	9,21	8,87	10,79
Kalimantan Utara	22,01	10,00	21,91
Sulawesi Utara	1,43	1,37	1,41
Sulawesi Tengah	4,89	4,63	4,62
Sulawesi Selatan	2,56	1,41	1,68
Sulawesi Tenggara	3,31	3,33	3,11
Gorontalo	2,76	8,04	2,36
Sulawesi Barat	3,96	4,25	4,93
Maluku	7,15	8,12	6,54
Maluku Utara	6,83	6,94	6,67
Papua Barat	29,41	10,00	21,70
Papua	27,02	10,00	34,53
Indonesia	**2,84**	**2,58**	**2,60**

Sumber: Kemenkes, 2019

Rasio antara jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk meningkat dari 2,58 pada tahun 2018 menjadi 2,60 pada tahun yang artinya rata-rata 1 orang tenaga kesehatan di Indonesia bekerja melayani wilayah seluas 2,58 km^2 menjadi 2,60 km^2. Rasio terendah dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rasio sebesar 0,012, dimana masing-masing tenaga kesehatannya melayani wilayah seluas 0,012 km^2.

Pada tingkat kabupaten, jumlah kabupaten pada klasifikasi sangat baik secara umum mengalami peningkatan dari 270 kabupaten menjadi 274 kabupaten. Sedangkan pada klasifikasi agak baik naik dari 24 kabupaten menjadi 25 kabupaten. Klasifikasi sangat buruk mengalami peningkatan sebanyak 7 kabupaten, sedangkan kabupaten dengan klasifikasi buruk dan agak buruk mengalami penurunan jumlah kabupaten masing-masing sebanyak 3 kabupaten.

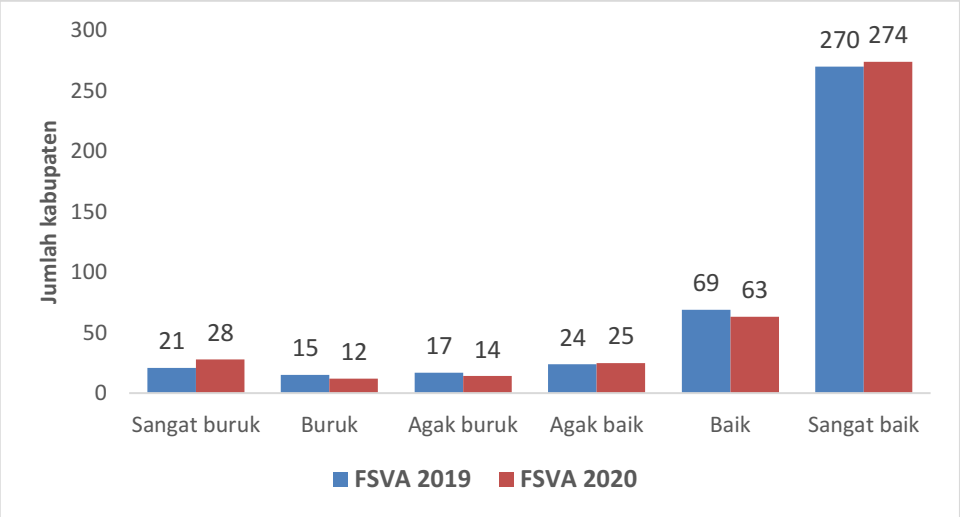

Gambar 4.1 Sebaran Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten

Sementara di wilayah perkotaan, semua wilayah berada dalam klasifikasi sangat baik (Tabel 4.2). Hal ini berarti tenaga kesehatan di perkotaan sudah terpenuhi.

Tabel 4.2 Sebaran Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk Kota

Kelompok	FSVA 2019		FSVA 2020	
	Jumlah kota	Persentase	Jumlah kota	Persentase
Sangat buruk	0	0	0	0
Buruk	0	0	0	0
Agak buruk	0	0	0	0
Agak baik	0	0	0	0
Baik	0	0	0	0
Sangat baik	98	100	98	100

Peta 4.1 Peta Rasio Jumlah Penduduk per Tempat Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk

4.2. Akses ke Air Bersih

Air yang tidak bersih dapat menimbulkan penyakit dan menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi dan pada akhirnya mempengaruhi status gizi seseorang. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, daerah dengan akses terhadap air bersih rendah memiliki kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009). Peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT et al. 2015; Kavosi et al. 2014; Khan dan Gill 2009; Burger dan Esrey 1995; serta Thomas dan Strauss 1992).

Secara nasional pada tahun 2019, 26,35% rumah tangga tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, yaitu air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 meter. Provinsi dengan akses air bersih yang buruk adalah Kalimantan Barat, Papua, Bengkulu, dan Lampung, dimana lebih dari 40% rumah tangga di wilayah tersebut tidak dapat mengakses air bersih secara memadai. Sedangkan provinsi dengan tingkat akses masyarakat ke air bersih yang paling baik adalah Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, dan DKI Jakarta.

Tabel 4.3 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih 2017 – 2019

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih		
	2017	2018	2019
Aceh	34,35	32,47	29,30
Sumatera Utara	29,66	28,38	26,14
Sumatera Barat	29,21	27,40	26,91
Riau	33,87	31,57	30,44
Jambi	39,00	39,45	37,06
Sumatera Selatan	37,29	37,16	36,74
Bengkulu	53,35	48,28	50,48
Lampung	44,58	41,94	40,35
Bangka Belitung	19,28	18,83	15,91
Kep. Riau	10,18	10,32	8,47
DKI Jakarta	7,12	6,59	11,56
Jawa Barat	28,8	27,04	27,62
Jawa Tengah	24,47	22,42	21,14
DI Yogyakarta	26,68	23,37	24,70
Jawa Timur	25,40	25,39	23,90
Banten	30,13	25,10	26,32
Bali	13,79	12,36	11,33
NTB	29,10	27,44	25,31
NTT	39,89	32,67	34,52
Kalimantan Barat	68,51	65,06	62,63
Kalimantan Tengah	34,81	33,16	30,82
Kalimantan Selatan	31,28	29,25	27,95
Kalimantan Timur	8,95	9,12	6,23
Kalimantan Utara	25,25	21,70	19,42
Sulawesi Utara	24,68	21,28	18,28
Sulawesi Tengah	32,75	27,81	25,33
Sulawesi Selatan	24,17	22,98	20,68
Sulawesi Tenggara	23,03	20,71	20,68

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih		
	2017	2018	2019
Gorontalo	24,34	20,80	17,67
Sulawesi Barat	43,58	38,92	36,45
Maluku	35,13	27,81	26,83
Maluku Utara	37,09	35,27	35,18
Papua Barat	35,55	32,69	29,82
Papua	59,72	61,67	60,95
Indonesia	**28,73**	**27,01**	**26,35**

Sumber: Susenas 2017, 2018, dan 2019, BPS

Pada tingkat kabupaten, jumlah kabupaten pada klasifikasi buruk secara umum mengalami penurunan dari 84 kabupaten menjadi 76 kabupaten. Sedangkan jumlah kabupaten pada klasifikasi baik secara umum mengalami peningkatan dari 332 kabupaten menjadi 340 kabupaten.

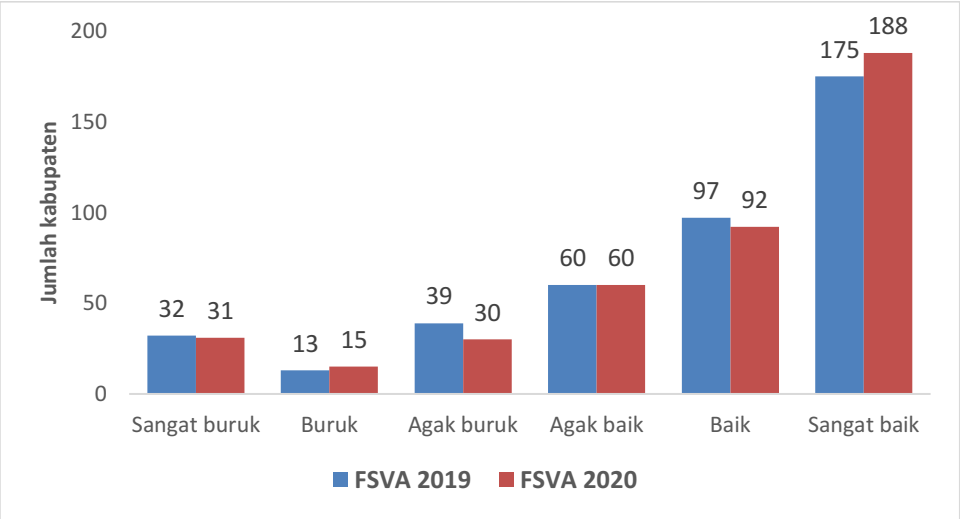

Gambar 4.2 Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih Kabupaten

Sementara wilayah perkotaan, terjadi peningkatan jumlah kabupaten yang termasuk dalam klasifikasi baik, dari 94 kota di FSVA 2019 menjadi 96 kota di FSVA 2020. Kota dengan tingkat akses air bersih agak buruk mengalami penurunan dari 4 kota menjadi 2 kota.

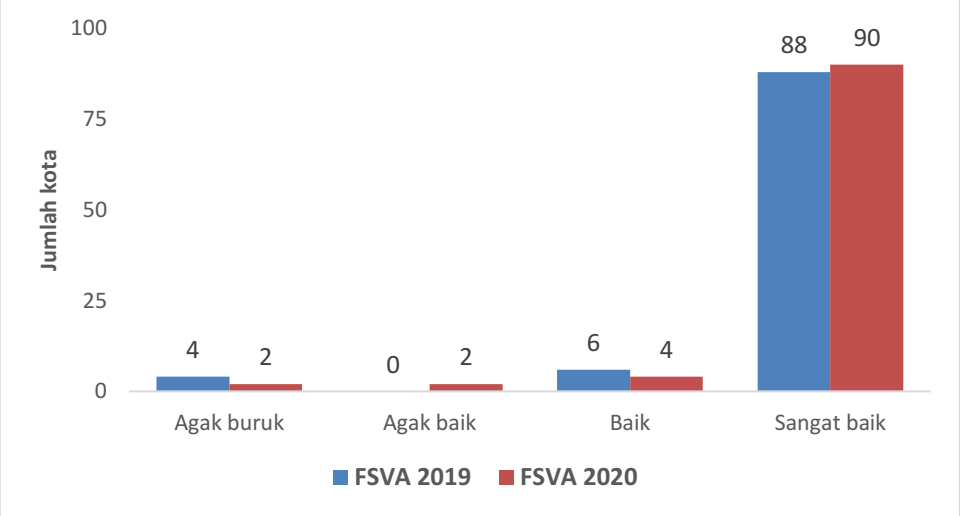

Gambar 4.3 Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih Kota

4.3. Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun

Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak tentang gizi berkorelasi kuat dengan status gizi anaknya (Abuya et al., 2012; Adnan and Muniandy, 2012; Miller and Rodgers, 2009). Glewwe (2009) mengidentifikasi 3 kemungkinan mekanisme hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi serta kesehatan, yaitu: (1) pendidikan formal secara langsung akan mentransfer pengetahuan terkait kesehatan kepada calon ibu; (2) kemampuan membaca dan berhitung yang diperoleh perempuan di sekolah akan meningkatkan kemampuan mereka mengenali penyakit dan mencari pengobatan yang tepat untuk anak-anak mereka. Selain itu kemampuan membaca yang baik akan memudahkan mereka mengikuti instruksi medis untuk penanganan kesehatan dan menerapkannya (Abuya et al., 2012); dan (3) lamanya sekolah perempuan meningkatkan penerimaan mereka terhadap pengobatan modern. Perempuan yang bersekolah juga memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, menikah dengan pria yang memiliki pendidikan dan gaji tinggi maupun tinggal di lingkungan yang lebih baik sehingga mempengaruhi status kesehatan anak-anak mereka (Abuya et al., 2012; Frost et al., 2005; Desai and Alva, 1998; Cleland and Van Ginneken, 1988).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu di Indonesia adalah dengan melihat durasi pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas. Tabel 4.4 menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun di setiap provinsi. Semakin lama durasi sekolah maka tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu diasumsikan semakin baik. Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 10,86 tahun diikuti oleh Kepulauan Riau (10,03 tahun), Maluku (10,01 tahun) dan Sulawesi Utara (9,73 tahun).

Rata-rata lama sekolah perempuan terpendek terdapat di Provinsi Papua, yaitu 6,17 tahun, diikuti Nusa Tenggara Barat (7,42 tahun), dan Kalimantan Barat (7,46 tahun). Secara umum, terdapat 11 provinsi yang rata-rata lama sekolah perempuan usia di atas 15 tahun di bawah rata-rata nasional sebesar 8,26 tahun. Rata-rata nasional sebesar 8,43 tahun masih belum mencapai target pemerintah yang mencanangkan wajib belajar selama 12 tahun yang terdiri dari pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun dan pendidikan sekolah menengah selama 6 tahun.

Tabel 4.4 Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun 2017-2019

Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun		
	2017	2018	2019
Aceh	9,20	9,22	9,44
Sumatera Utara	9,36	9,45	9,59
Sumatera Barat	9,05	9,14	9,29
Riau	8,91	8,97	9,21
Jambi	8,29	8,41	8,56
Sumatera Selatan	8,22	8,30	8,41
Bengkulu	8,76	8,76	8,,89
Lampung	8,00	8,09	8,11
Bangka Belitung	7,92	8,10	8,15
Kep. Riau	9,88	9,88	10,03
DKI Jakarta	10,64	10,75	10,86
Jawa Barat	8,15	8,29	8,47

Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun		
	2017	2018	2019
Jawa Tengah	7,38	7,45	7,62
DI Yogyakarta	9,27	9,36	9,45
Jawa Timur	7,41	7,49	7,66
Banten	8,47	8,53	8,73
Bali	8,27	8,33	8,52
NTB	7,13	7,17	7,42
NTT	7,45	7,52	7,76
Kalimantan Barat	7,20	7,31	7,46
Kalimantan Tengah	8,30	8,37	8,58
Kalimantan Selatan	8,03	8,11	8,23
Kalimantan Timur	9,28	9,32	9,59
Kalimantan Utara	8,80	8,90	8,99
Sulawesi Utara	9,49	9,58	9,73
Sulawesi Tengah	8,46	8,60	8,86
Sulawesi Selatan	8,22	8,27	8,57
Sulawesi Tenggara	8,62	8,74	8,99
Gorontalo	8,09	8,17	8,45
Sulawesi Barat	7,71	7,83	8,09
Maluku	9,61	9,71	10,01
Maluku Utara	8,68	8,82	9,07
Papua Barat	9,37	9,37	9,58
Papua	5,86	5,97	6,17
Indonesia	**8,17**	**8,26**	**8,43**

Sumber: Susenas 2019, BPS

Pada tingkat kabupaten, jumlah kabupaten pada klasifikasi buruk (sangat buruk, buruk, dan agak buruk) secara umum mengalami penurunan dari 140 kabupaten menjadi 123 kabupaten. Sedangkan jumlah kabupaten pada klasifikasi baik (agak baik, baik, sangat baik) secara umum mengalami peningkatan dari 276 kabupaten menjadi 293 kabupaten.

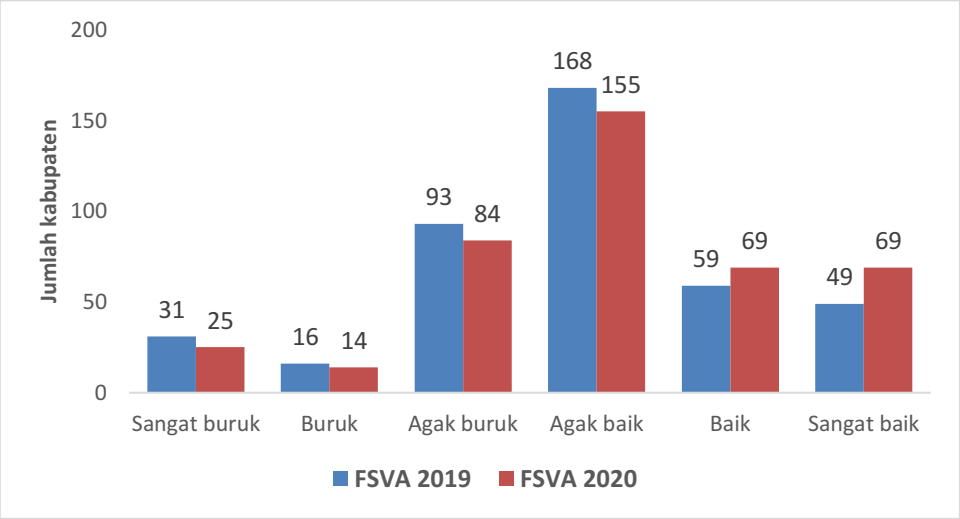

Gambar 4.4 Sebaran Kelompok Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun Kabupaten

Sementara untuk wilayah perkotaan, seluruhnya memiliki rata-rata lama sekolah perempuan dalam kelompok baik, dimana seluruh kota telah masuk pada klasifikasi baik dengan sebaran seperti pada Gambar 4.5.

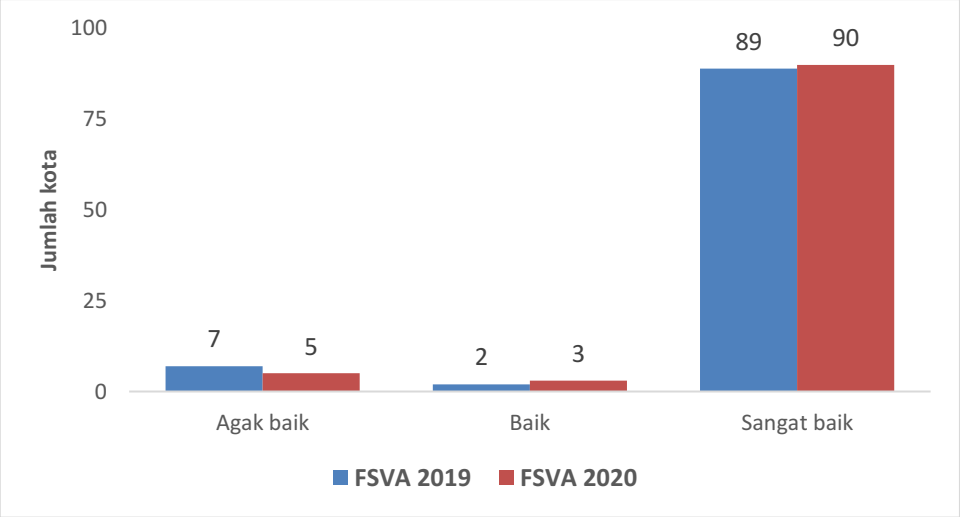

Gambar 4.5 Sebaran Kelompok Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun Kota

4.4. Tantangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Tantangan yang dihadapi untuk peningkatan aspek pemanfaatan pangan adalah perilaku konsumsi yang menyebabkan pola konsumsi belum sesuai kaidah Pola Pangan Harapan (PPH), ketergantungan terhadap sumber pangan tertentu terutama beras dan terigu, serta *food waste* yang masih tinggi. Konsumsi energi tahun 2019 sebesar 2.138 kkal/kap/hari mengalami penurunan dibandingkan konsumsi energi tahun 2018 sebesar 2.165 kkal/kap/hari. Selain itu, konsumsi protein tahun 2019 sebesar 62,87 gram/kap/hari tercatat mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 62,91 gram/kap/hari. Adapun komposisi konsumsi protein tahun 2019 terdiri dari 41,81 gram/kap/hari (66,51%) protein asal pangan nabati dan 21,05 gram/kapita/hari (33,49%) protein asal pangan hewani. Namun demikian, angka konsumsi energi dan protein ini telah melebihi rekomendasi angka energi dan protein dari WNPG XI Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, yaitu masing-masing sebesar 2.100 kkal/kap/hari dan 57 gram protein/kap/hari.

Meskipun konsumsi energi dan protein di Indonesia telah melebihi anjuran Angka Kecukupan Gizi (AKG), namun pemenuhan konsumsi pangan masih perlu memperhatikan keberagaman jenis dan jumlah pangan sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Skor pola pangan harapan yang dihitung dari keragaman konsumsi pangan penduduk Indonesia naik dari 87,0 pada tahun 2018 menjadi 87,9 pada tahun 2019. Konsumsi kelompok pangan yang telah melebihi anjuran yaitu padi-padian, pangan hewani, dan minyak dan lemak, sedangkan konsumsi yang masih perlu ditingkatkan adalah umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah.

Ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu akan berdampak pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menjaga agar pangan tersebut selalu tersedia. Anomali iklim dan restriksi perdagangan antar negara/wilayah dapat memperberat upaya-upaya yang harus dilakukan. Sementara itu, Indonesia memiliki beragam pangan lokal yang dapat menjadi alternatif sumber kabohidrat dan telah biasa dikonsumsi oleh masyarakat namun semakin menurun jumlah konsumsinya. Diversifikasi konsumsi pangan untuk mencapai Pola Pangan Harapan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan pemanfaatan pangan. Diperlukan upaya-upaya yang masif dan melibatkan multi sektor agar kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dilakukan oleh masyarakat.

Tabel 4.5 Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2017-2019

Uraian	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari			Rekomendasi WNPG XI, 2018
	2017	2018	2019	
1. Energi (kkal)	2.128	2.165	2.138	2.100
2. Protein (gram)	61,45	62,91	62,87	57
Nabati	40,59	42,66	41,81	
Hewani	20,86	20,25	21,05	
3. Skor PPH	86,30	87,00	87,90	

Sumber: Susenas BPS, diolah BKP 2020

Tingginya *food waste* (pemborosan pangan) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan. *Food waste* umumnya terjadi karena kurangnya perencanaan maupun kebiasan membuang makanan pada saat konsumsi. *Food waste* dapat dikurangi melalui perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat.

BAB 5
DAMPAK DARI STATUS GIZI DAN KESEHATAN

Status gizi merupakan hasil dari interaksi antara makanan yang dikonsumsi, metabolisme zat gizi makanan oleh tubuh dan lingkungan hidup manusia. Status gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Masalah gizi pada saat ini dapat berdampak pada kualitas sumberdaya manusia pada generasi berikutnya. Dalam jangka panjang kekurangan gizi dapat mengakibatkan hilangnya potensi generasi muda yang cerdas dan berkualitas (*lost generation*) karena tidak produktif dan tidak mampu bersaing di masa depan. Terpenuhinya kebutuhan gizi akan menurunkan terjadinya kesakitan, kecacatan, dan kematian sehingga meningkatkan kualitas kesehatan individu.

Masalah gizi terdiri atas gizi lebih dan gizi kurang. Kekurangan gizi erat kaitannya dengan kemiskinan, kurang tersedianya bahan pangan, buruknya sanitasi, kesalahan pola asuh, rendahnya pemahaman terhadap menu seimbang dan masih terbatasnya fasilitas infrastruktur. Namun demikian, masalah gizi juga dihadapi oleh masyarakat kelas menengah hingga tinggi yang tidak mengalami kendala akses ekonomi, teknologi, informasi dan jarak. Fenomena yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang berkecukupan secara ekonomi belum disertai pemahaman yang cukup mengenai pengetahuan gizi, menu seimbang, maupun kesehatan.

Meskipun output status gizinya serupa, namun permasalahan yang menyebabkan munculnya status gizi tersebut bisa berbeda. Oleh karena itu, program perbaikan gizi dan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah harus memperhatikan data dan informasi spesifik terkait permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat sesuai dengan kebutuhannya, serta permasalahan gizi dan kesehatan di wilayah tersebut dapat segera terselesaikan.

5.1. Dampak dari Status Gizi

Status gizi dipengaruhi oleh penyebab langsung dan tidak langsung. Status ketahanan pangan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi anak, selain pola asuh dan akses terhadap fasilitas kesehatan dan air bersih. Sedangkan pola konsumsi makanan dan penyakit infeksi yang diderita berpengaruh langsung terhadap status gizi anak. Setiap faktor penyebab baik langsung ataupun tidak langsung akan saling mempengaruhi dan berinteraksi satu dengan lainnya. Sebagai contoh, anak yang konsumsi pangannya kurang baik maka daya tahan tubuhnya akan lemah, sehingga akan lebih mudah terserang infeksi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap status gizinya. Seorang anak dengan konsumsi pangan yang baikpun tidak serta merta memiliki status gizi yang baik. Jika anak tersebut sering menderita penyakit infeksi, maka situasi kesehatannya tersebut akan berpengaruh terhadap penyerapan zat gizi oleh tubuh yang berpengaruh terhadap status gizinya.

Status gizi balita diukur menggunakan 3 indikator, yaitu prevalensi *stunting* (tinggi badan menurut umur), *underweight* (berat badan menurut umur) dan *wasting* (berat badan menurut tinggi badan).

1. Pendek atau *stunting*: rasio tinggi badan menurut umur -TB/U- di bawah -2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara terus-menerus, dalam jangka panjang dan kronis.
2. Gizi kurang dan buruk atau *underweight*: rasio berat badan menurut umur -BB/U- di bawah -2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi.
3. Kurus atau *wasting*: rasio berat badan menurut tinggi badan -BB/TB- di bawah - 2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara akut atau baru terjadi.

WHO mengklasifikasikan masalah gizi sebagai masalah kesehatan berdasarkan prevalensi *underweight, stunting* dan *wasting* dalam populasi seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Klasifikasi WHO untuk *Underweight, Stunting* dan *Wasting* dalam Populasi

Klasifikasi	*Underweight*	*Stunting*	*Wasting*
Baik	<10%	<20%	<5%
Kurang	10-19%	20-29%	5-9%
Buruk	20-29%	30-39%	10-14%
Sangat Buruk	≥30%	≥40%	≥15%

Sumber: WHO, 2000

Secara nasional, Indonesia masih menghadapi tiga masalah gizi yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan pangan, yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita (*underweight*), fenomena anak pendek (*stunting*), dan masalah kelebihan gizi, yaitu *overweight* dan obesitas pada kelompok usia di atas 18 tahun. Tidak hanya masalah gizi makro, masalah kekurangan zat gizi mikro seperti kekurangan vitamin dan mineral yang menjadi penyebab masalah anemia pada ibu hamil, kekurangan vitamin A, kekurangan mineral Iodium, juga masih menjadi beban gizi yang harus segera ditangani.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) Kementerian Kesehatan tahun 2019, tingkat prevalensi balita kurang gizi (*underweight*), balita pendek (*stunting*) dan balita kurus (*wasting*) di Indonesia menurun dibandingkan tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Prevalensi balita kurang gizi (*underweight*) dan prevalensi balita kurus (*wasting*) pada tahun 2019 turun masing-masing 1,5% dan 2,8% dibandingkan angka pada tahun 2018.

Prevalensi balita pendek (*stunting*) tercatat sebesar 27,7%, atau turun 3,1% dibandingkan tahun 2018. Namun demikian, WHO menetapkan batasan masalah gizi *stunting* tidak lebih dari 20%, menyebabkan Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki masalah *stunting* tinggi yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Secara teknis kesehatan, anak *stunting* adalah salah satu bentuk output dari kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, yaitu sejak 1000 hari pertama kehidupan. Janin dalam kandungan membutuhkan asupan gizi yang cukup melalui ibunya. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan ibu hamil dan menyusui menjadi amat krusial menentukan kualitas bayi.

Tabel 5.2 Hasil SSGBI Tahun 2019

Status Gizi	Riskesdas 2018 (%)	SSGBI 2019 (%)
Underweight	17,7	16,3
Stunting	30,8	27,7
Wasting	10,2	7,4

SSGBI mencakup status gizi balita pada level provinsi dan kabupaten. Namun, dari total 514 kabupaten/kota, hanya 260 kabupaten/kota yang dipublikasikan dalam SSGBI. Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan indikator dampak dari status gizi (prevalensi balita *stunting*) hanya dapat dilakukan pada level provinsi dan kabupaten prioritas *stunting* tahun 2019.

Berdasarkan klasifikasi WHO untuk masalah gizi balita underweight, dua provinsi, yaitu Provinsi Bali dan Sulawesi Utara, masuk dalam klasifikasi baik, 9 provinsi masuk dalam klasifikasi buruk dan 23 provinsi lainnya masuk dalam klasifikasi kurang. Sementara itu untuk masalah gizi balita wasting, 88,2% provinsi masuk dalam klasifikasi kurang, satu provinsi (Provinsi Bali) masuk dalam klasifikasi baik, dan 3 provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Papua Barat dan Maluku) masuk dalam klasifikasi buruk dan sangat buruk.

Prevalensi balita *stunting* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bali sebanyak <20%, sehingga ketiga provinsi ini masuk dalam klasifikasi baik. Sementara itu, 29 provinsi (85%) masuk dalam klasifikasi kurang dan buruk dan 2 provinsi lainnya, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat, masuk dalam klasifikasi sangat buruk (persentase balita *stunting* >40%).

Secara umum, provinsi di Indonesia mengalami penurunan persentase balita *stunting* dibandingkan dengan tahun 2018. Provinsi dengan penurunan persentase balita *stunting* tertinggi adalah Provinsi Jambi.

Tabel 5.3 Prevalensi Kurang Gizi pada Balita per Provinsi (*Stunting, Underweight* dan *Wasting*) Tahun 2019

Provinsi	*Underweight*	*Stunting*	*Wasting*
Aceh	21,9	34,2	9,2
Sumatera Utara	17,6	30,1	10,6
Sumatera Barat	15,9	27,5	6,2
Riau	17,4	24,0	9,1
Jambi	11,6	21,0	8,0
Sumatera Selatan	17,7	29,0	9,1
Bengkulu	12,5	26,9	6,4
Lampung	13,4	26,3	6,8
Bangka Belitung	12,2	19,9	6,2
Kep. Riau	12,1	16,8	8,0
DKI Jakarta	10,0	20,0	5,4
Jawa Barat	13,0	26,2	6,6
Jawa Tengah	15,5	27,7	6,6
DI Yogyakarta	13,2	21,0	6,1
Jawa Timur	15,8	26,9	6,6
Banten	14,1	24,1	6,9
Bali	8,0	14,4	3,3
NTB	22,6	37,9	6,5
NTT	28,4	43,8	9,9

Provinsi	*Underweight*	*Stunting*	*Wasting*
Kalimantan Barat	21,6	31,5	8,8
Kalimantan Tengah	19,6	32,3	7,9
Kalimantan Selatan	21,0	31,8	9,1
Kalimantan Timur	16,2	28,1	7,3
Kalimantan Utara	15,3	26,3	5,5
Sulawesi Utara	9,1	21,2	5,5
Sulawesi Tengah	20,8	31,3	8,5
Sulawesi Selatan	19,8	30,6	6,8
Sulawesi Tenggara	18,4	31,4	8,6
Gorontalo	22,0	34,9	7,8
Sulawesi Barat	22,7	40,4	6,6
Maluku	24,6	30,4	15,8
Maluku Utara	19,8	29,1	8,8
Papua Barat	18,7	24,6	13,1
Papua	15,7	29,4	9,4
Indonesia	**16,3**	**27,7**	**7,4**

Sumber : BPS-Kementerian Kesehatan, Integrasi Susenas Maret 2019 dan SSGBI 2019

Hasil SSGBI untuk kabupaten/kota prioritas *stunting* tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 10,47% kabupaten/kota berada dalam klasifikasi baik, 36,43% kabupaten/kota berada dalam klasifikasi kurang, 34,50% kabupaten/kota berada dalam klasifikasi buruk dan 18,60% kabupaten/kota berada dalam klasifikasi sangat buruk. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50% kabupaten/kota dalam klasifikasi buruk berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sumatera Utara.

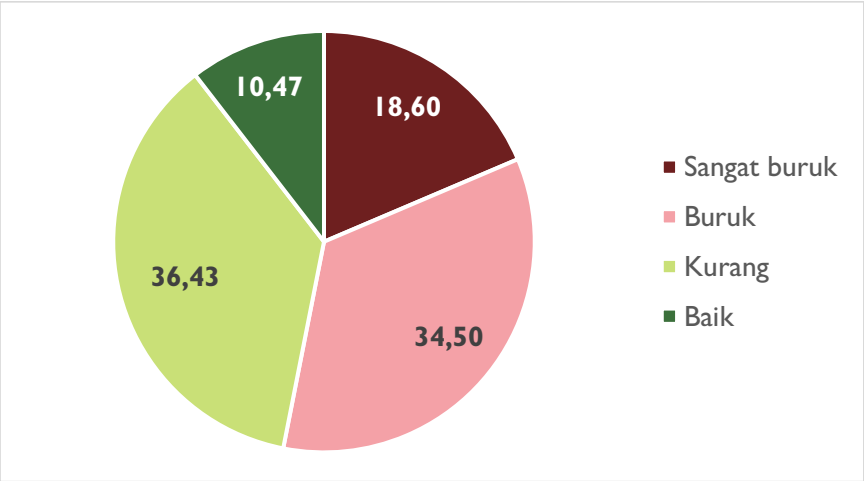

Gambar 5.1 Sebaran Kelompok pada Kabupaten Prioritas *Stunting* 2019

5.2. Dampak dari Status Kesehatan

Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup pada saat lahir diartikan sebagai perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pada pola mortalitas sepanjang hidupnya. Rata-rata angka harapan hidup di Indonesia telah mencapai 71,34 tahun. Angka ini hanya sedikit meningkat dibandingkan dengan angka tahun 2018 yaitu 71,25 tahun. Provinsi yang memiliki angka harapan hidup paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat yaitu 64,82 tahun, sedangkan provinsi dengan angka harapan hidup paling tinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta yaitu 74,92 tahun.

Tabel 5.4 Angka Harapan Hidup Per Provinsi

Provinsi	AHH (Tahun)
Aceh	69,87
Sumatera Utara	68,95
Sumatera Barat	69,31
Riau	71,48
Jambi	71,06
Sumatera Selatan	69,65
Bengkulu	69,21
Lampung	70,51
Kep. Bangka Belitung	70,50
Kep. Riau	69,80
DKI Jakarta	72,79
Jawa Barat	72,85
Jawa Tengah	74,23
DI Yogyakarta	74,92
Jawa Timur	71,18
Banten	69,84
Bali	71,99
Nusa Tenggara Barat	66,28
Nusa Tenggara Timur	66,85
Kalimantan Barat	70,56
Kalimantan Tengah	69,69
Kalimantan Selatan	68,49
Kalimantan Timur	74,22
Kalimantan Utara	72,54
Sulawesi Utara	71,58
Sulawesi Tengah	68,23
Sulawesi Selatan	70,43
Sulawesi Tenggara	70,97
Gorontalo	67,93
Sulawesi Barat	64,82
Maluku	65,82
Maluku Utara	68,18
Papua Barat	65,90
Papua	65,65
INDONESIA	**71,34**

Sumber: BPS, 2020

Angka harapan hidup dibagi dalam enam klasifikasi. Klasifikasi sangat buruk jika angka harapan hidupnya selama ≤58 tahun dan meningkat terus hingga masuk dalam klasifikasi sangat baik jika usia mencapai >70 tahun. Sebanyak 155 kabupaten (37,26%) memiliki angka harapan hidup yang masuk dalam klasifikasi sangat baik. Jumlah ini meningkat sebanyak 14 kabupaten dibandingkan FSVA 2019. Kabupaten yang mengalami peningkatan angka harapan hidup tersebut adalah Kabupaten Pidie Jaya, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Bangkalan, Tapin, Tanah Bumbu, Kepulauan Talaud, Minahasa Tenggara, Luwu, Muna, Konawe, Wakatobi, Kolaka Utara dan Kabupaten Muna Barat.

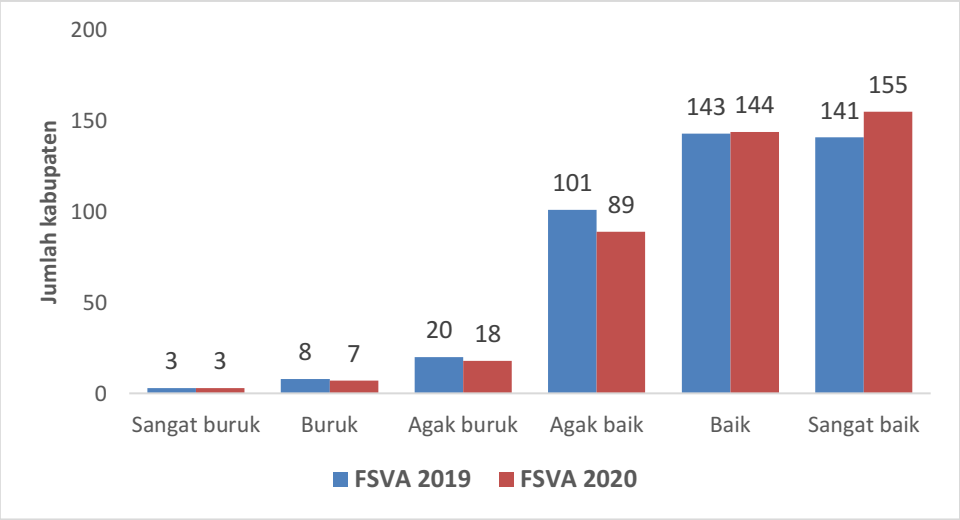

Gambar 5.2 Sebaran Kelompok Angka Harapan Hidup Kabupaten

Dari total 98 kota, tujuh kota mengalami peningkatan status dari klasifikasi baik menjadi sangat baik yaitu Kota Pariaman (Sumatera Barat), Kota Prabumulih (Sumatera Selatan), Kota Bengkulu (Bengkulu), Kota Probolinggo (Jawa Timur), Kota Bima (Nusa Tenggara Barat), Kota Kotomobago (Sulawesi Utara), dan Kota Sorong (Papua Barat).

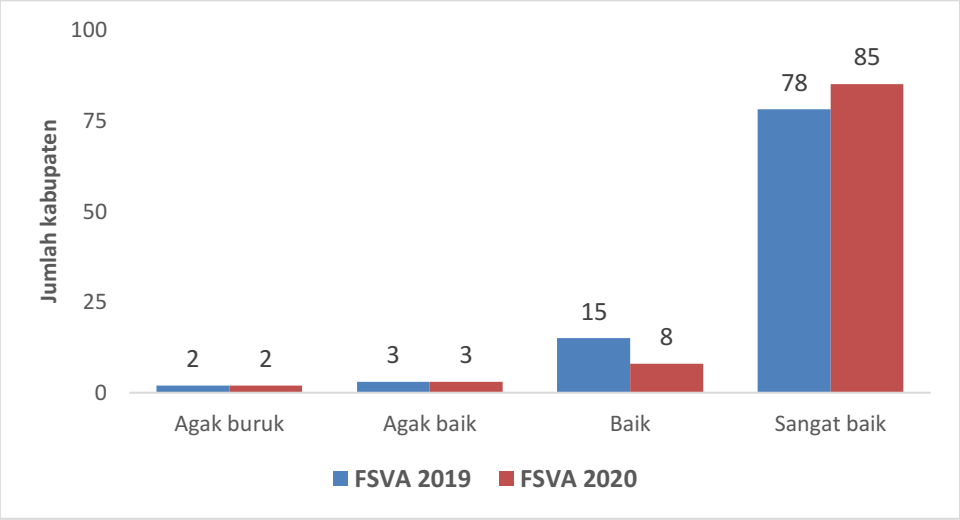

Gambar 5.3 Sebaran Kelompok Angka Harapan Hidup Kota

BAB 6
ANALISIS KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

6.1. Ketahanan Pangan di Indonesia

Peta FSVA 2020 menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dengan lokus wilayah kabupaten/kota. Status ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2020 merupakan hasil pemutakhiran dari peta 2019 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan FSVA menggunakan sembilan indikator yang mencakup tiga dimensi ketahanan pangan dengan memperhatikan ketersediaan data dan informasi pendukung lainnya dari lintas sektor terkait.

Metode yang digunakan untuk mengurutkan dan mengelompokkan wilayah kabupaten/kota ke dalam prioritas status ketahanan pangan yaitu metode analisis komposit menggunakan pembobotan mengadopsi metode penyusunan *Global Food Security Index* (*GFSI*). Penggunaan pendekatan pembobotan ini dapat meningkatkan obyektifitas hasil dari analisis komposit. Bobot masing-masing indikator individu diperoleh melalui sistem *judgment* yang ditetapkan oleh para ahli. Analisis komposit menghasilkan skor komposit dari masing-masing kabupaten/kota, yang selanjutnya dikelompokkan kedalam salah satu dari 6 kelompok prioritas.

Kabupaten/kota diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat kerentanan pangan. Kabupaten/kota yang berada pada Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi sangat rentan (Prioritas 1), rentan 2 (Prioritas 2), dan agak rentan (Prioritas 3). Kabupaten/kota pada Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi agak tahan (Prioritas 4), tahan (Prioritas 5), dan sangat tahan (Prioritas 6). Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi kabupaten/kota yang lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan dan gizi serta mengukur perubahan statusnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk memvisualisasikan klasifikasi tersebut, kabupaten atau kota dipetakan dengan menggunakaan gradasi warna merah dan hijau. Gradasi warna merah digunakan untuk memetakan kelompok Prioritas I, 2, dan 3 dan gradasi warna hijau digunakan untuk kelompok prioritas 4, 5 dan 6 (Peta 6.1). Penyusunan FSVA 2020 untuk 416 kabupaten dan 98 kota dilakukan secara terpisah atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota.

Hasil Analisis Wilayah Kabupaten FSVA 2020

Dari total 416 kabupaten, sebanyak 66 kabupaten (15,8%) masuk ke dalam Prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) dan 350 kabupaten (84,2%) sisanya telah masuk Prioritas 4-6 (tahan pangan) dengan rincian sebagai berikut: 26 (6,2%) kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan), 18 (4,3%) kabupaten Prioritas 2 (rentan), 22 (5,3%) kabupaten Prioritas 3 (agak rentan), 41 (9,9%) kabupaten Prioritas 4 (agak tahan), 92 (22,1%) kabupaten Prioritas 5 (tahan), dan 217 (52,2%) kabupaten Prioritas 6 (sangat tahan).

Kabupaten Prioritas 1 terdapat di Provinsi Papua (20 kabupaten); Papua Barat (4 kabupaten); serta Maluku dan Riau masing-masing satu kabupaten (Gambar 6.1).

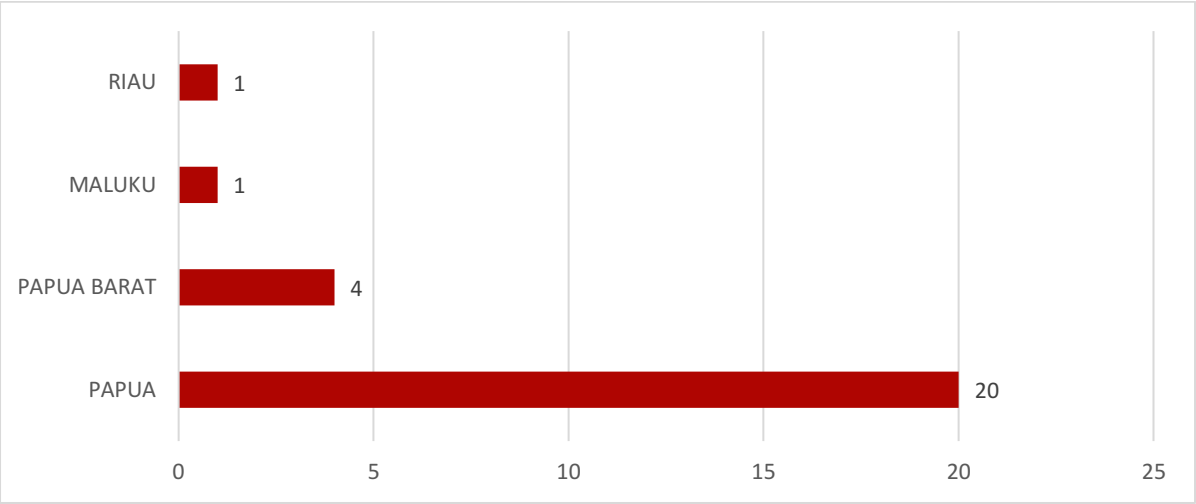

Sumber: Hasil analisis, 2020

Gambar 6.1 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 1 per Provinsi

Kabupaten Prioritas 2 terdapat di Provinsi Papua Barat (4 kabupaten); Papua (3 kabupaten), Maluku Utara (3 kabupaten); Maluku (2 kabupaten); dan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah masing-masing satu kabupaten (Gambar 6.2).

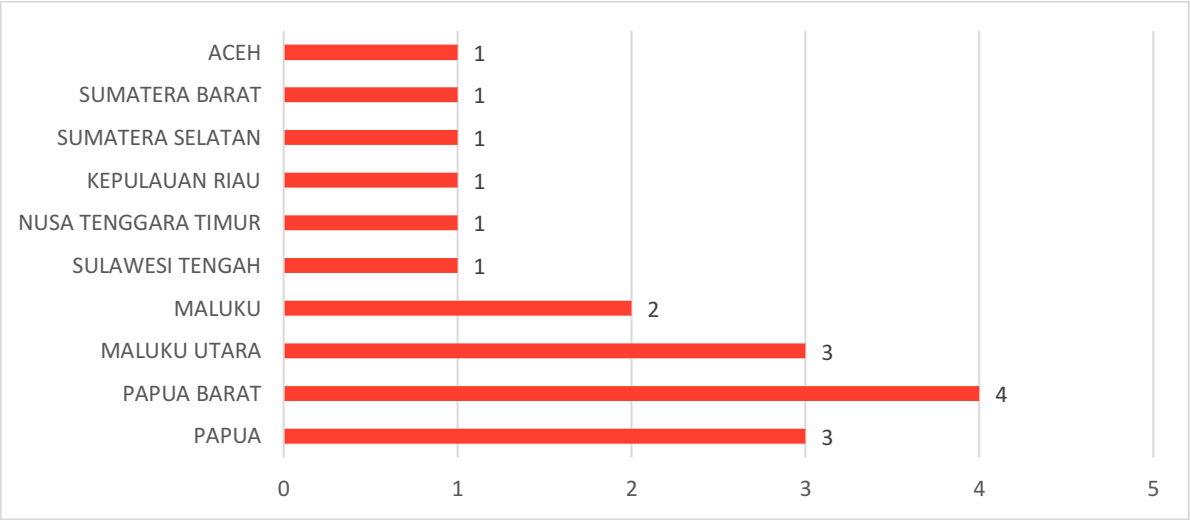

Sumber: Hasil analisis, 2020

Gambar 6.2 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 2 per Provinsi

Kabupaten Prioritas 3 terdapat di Provinsi Kepulauan Riau (4 kabupaten); Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat masing-masing 2 kabupaten; serta di Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua Barat masing-masing satu kabupaten (Gambar 6.3).

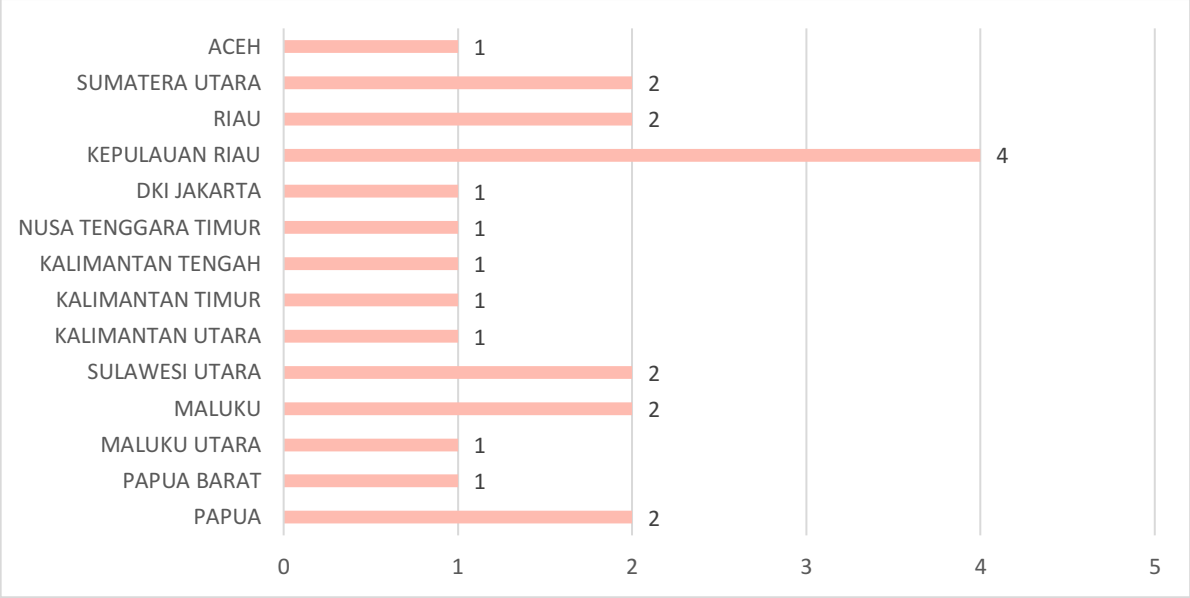

Sumber: Hasil analisis, 2020

Gambar 6.3 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 3 per Provinsi

Secara umum kabupaten di provinsi di wilayah timur Indonesia memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan wilayah barat Indonesia. Selain itu, kabupaten yang terletak di kepulauan juga memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah bukan kepulauan.

Tabel 6.1 menunjukkan persentase jumlah kabupaten berdasar kelompok prioritas di setiap provinsi. Kabupaten yang memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang tinggi (Prioritas 1) banyak terdapat di Provinsi Papua (71% dari total kabupaten), Papua Barat (33%), dan Maluku (11%). Sedangkan kabupaten yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik (Prioritas 6) banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Gorontalo (100%); Provinsi Sulawesi Selatan (95%); dan Sumatera Barat (92%).

Tabel 6.1 Persentase Kabupaten Berdasarkan Kelompok Prioritas per Provinsi

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Aceh	0%	6%	6%	0%	44%	44%	100%
Sumatera Utara	0%	0%	8%	8%	36%	48%	100%
Sumatera Barat	0%	8%	0%	0%	0%	92%	100%
Riau	10%	0%	20%	50%	10%	10%	100%
Jambi	0%	0%	0%	33%	56%	11%	100%
Sumatera Selatan	0%	8%	0%	8%	54%	31%	100%
Bengkulu	0%	0%	0%	22%	67%	11%	100%
Lampung	0%	0%	0%	0%	38%	62%	100%
Kep. Bangka Belitung	0%	0%	0%	50%	17%	33%	100%
Kepulauan Riau	0%	20%	80%	0%	0%	0%	100%
DKI Jakarta	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
Jawa Barat	0%	0%	0%	6%	6%	89%	100%

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Jawa Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Di Yogyakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Timur	0%	0%	0%	0%	21%	79%	100%
Banten	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100%
Bali	0%	0%	0%	0%	13%	88%	100%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	0%	13%	13%	75%	100%
Nusa Tenggara Timur	0%	5%	5%	38%	48%	5%	100%
Kalimantan Barat	0%	0%	0%	8%	67%	25%	100%
Kalimantan Tengah	0%	0%	8%	23%	23%	46%	100%
Kalimantan Selatan	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Timur	0%	0%	14%	14%	14%	57%	100%
Kalimantan Utara	0%	0%	25%	0%	25%	50%	100%
Sulawesi Utara	0%	0%	18%	0%	0%	82%	100%
Sulawesi Tengah	0%	8%	0%	8%	25%	58%	100%
Sulawesi Selatan	0%	0%	0%	5%	0%	95%	100%
Sulawesi Tenggara	0%	0%	0%	7%	40%	53%	100%
Gorontalo	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Barat	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Maluku	11%	22%	22%	22%	11%	11%	100%
Maluku Utara	0%	38%	13%	13%	13%	25%	100%
Papua Barat	33%	33%	8%	17%	8%	0%	100%
Papua	71%	11%	7%	7%	0%	4%	100%
Total	**6%**	**4%**	**5%**	**10%**	**22%**	**52%**	**100%**

Sumber: Hasil analisis, 2020

Kondisi kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan di kabupaten dicirikan oleh indikator: i) tingginya prevalensi balita *stunting*, ii) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, iii) rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan >15 tahun, iv) tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, dan v) tingginya penduduk miskin.

Kabupaten-kabupaten yang masuk dalam Prioritas 1-3 (66 kabupaten) perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penyebab kerentanan pangan di wilayah tersebut adalah: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) tingginya penduduk miskin, iii) tingginya rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, iv) tingginya prevalensi balita *stunting*, dan v) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih.

Rata-rata rasio konsumsi normatif terhadap produksi pangan di daerah rentan rawan pangan Prioritas 1-3 adalah 4,61, yang artinya kebutuhan pangannya 4 kali lipat dari kemampuan wilayah tersebut untuk memproduksi pangan. Oleh karena itu, kabupaten-kabupaten tersebut sangat tergantung pada *supply* pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Rata-rata persentase balita *stunting* pada daerah rentan pangan sebesar 30,22%. Angka tersebut tidak berbeda jauh dengan angka *stunting* di kabupaten tahan pangan, yaitu 29,55%. Kondisi ini menunjukkan

bahwa *stunting* masih menjadi permasalahan di seluruh wilayah Indonesia. WHO mengklasifikasikan wilayah dengan persentase balita *stunting* sebesar 30-40% sebagai wilayah dengan kategori buruk (WHO 2000). Penyebab terjadinya *stunting* pada balita bersifat multi faktor, baik langsung maupun tidak langsung. Memperhatikan kondisi tersebut, maka penanganan *stunting* harus dilaksanakan oleh lintas sektor dengan program-program yang koheren pada saat pelaksanaannya dan tidak hanya di kabupaten rentan rawan pangan saja namun juga di kabupaten yang tahan pangan.

Rata-rata angka kemiskinan di kabupaten rentan rawan pangan sebesar 22,52%. Angka ini di atas rata-rata angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,41% (Susenas Maret 2019) dan rata-rata kemiskinan di wilayah tahan pangan sebesar 11,44%. Diperlukan program/kegiatan langsung ke masyarakat untuk meningkatkan pendapatan seperti penciptaan lapangan kerja baru, perlu terus didorong di wilayah kabupaten rentan terhadap kerawanan pangan. Indikator persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih di kabupaten rentan rawan pangan rata-rata sebesar 54,84%, sedangkan pada kabupaten tahan pangan sebesar 32,62%. Ketersediaan air bersih ternyata menjadi tantangan yang masih dihadapi baik di kabupaten rentan maupun tahan pangan, perbaikan sarana dan prasarana akses air bersih harus terus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Air bersih merupakan bagian dari persyaratan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif sebagaimana asupan konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Rata-rata lama sekolah perempuan berusia >15 tahun di kabupaten rentan rawan pangan sebesar 7,17 tahun, tidak berbeda jauh dengan di wilayah tahan pangan yaitu 8,01 tahun (Tabel 6.2). Hal ini mengindikasikan bahwa penyediaan pendidikan khususnya untuk perempuan masih perlu ditingkatkan, baik yang bersifat formal maupun non formal. Keterbatasan akses fisik dan ekonomi yang sering menjadi penyebab anak perempuan tidak melanjutkan sekolah dapat disiasati dengan Pendidikan non formal melalui komunitas dan media online.

Kelima indikator tersebut merupakan indikator yang sering muncul sebagai penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan di wilayah rentan rawan pangan. Namun demikian, penyebab kerawanan pangan di tiap kabupaten berbeda-beda, sehingga diperlukan pendekatan spesifik untuk mengurangi kerentanan pangan pada setiap kabupaten. Teridentifikasinya penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan untuk masing-masing kabupaten akan sangat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektifitas program ketahanan pangan.

Tabel 6.2 Nilai Rata-Rata Kelompok Kabupaten Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan

Indikator	Prioritas Rentan (1 – 3)	Prioritas Tahan (4 – 6)
Rasio konsumsi terhadap produksi	4,61	0,87
Angka kemiskinan	22,52	11,44
Pengeluaran pangan >65%	37,52	31,78
Terbatasnya akses ke listrik	16,85	2,18
Terbatasnya akses ke air bersih	54,84	32,62
Angka harapan hidup	65,59	69,41
Rasio penduduk per tenaga kesehatan	30,51	5,11
Lama sekolah perempuan >15 tahun	7,17	8,01
Stunting pada balita	30,22	29,55

Sumber: Hasil analisis, 2020

Hasil Analisis Wilayah Perkotaan FSVA 2020

Tabel 6.3 menunjukkan persentase wilayah perkotaan berdasarkan kelompok prioritas di setiap provinsi. Secara umum, wilayah perkotaan memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik. Dari 98 kota, 4 (empat) kota (4%) masuk kelompok Prioritas 1-3 (paling rentan terhadap kerawanan pangan) dan 94 kota (96%) masuk kelompok Prioritas 4-6 (paling tahan terhadap kerawanan pangan) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) kota (1%) merupakan Prioritas 1, 1 (satu) kota (1%) merupakan Prioritas 2, 2 (dua) kota (2%) merupakan Prioritas 3, 6 (enam) kota (6,1%) Prioritas 4, 21 kota (21,5%) Prioritas 5 dan 67 kota (68,4%) Prioritas 6. Provinsi yang memiliki wilayah perkotaan dengan tingkat kerentanan pangan tinggi adalah Aceh (Prioritas 1), Maluku (Prioritas 2), serta Sumatera Utara dan Sumatera Selatan (Prioritas 3).

Tabel 6.3 Persentase Kota Berdasarkan Kelompok Prioritas per Provinsi

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Aceh	20%	0%	0%	0%	40%	40%	100%
Sumatera Utara	0%	0%	13%	13%	38%	38%	100%
Sumatera Barat	0%	0%	0%	0%	14%	86%	100%
Riau	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Jambi	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Sumatera Selatan	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%
Bengkulu	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Lampung	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kep. Bangka Belitung	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kepulauan Riau	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
DKI Jakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Barat	0%	0%	0%	22%	11%	67%	100%
Jawa Tengah	0%	0%	0%	0%	17%	83%	100%
DI Yogyakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Timur	0%	0%	0%	0%	11%	89%	100%
Banten	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Bali	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Nusa Tenggara Timur	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Barat	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%
Kalimantan Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Selatan	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Kalimantan Timur	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Utara	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Utara	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%
Sulawesi Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Selatan	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Tenggara	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Gorontalo	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Maluku	0%	50%	0%	0%	0%	50%	100%

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Maluku Utara	0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%
Papua Barat	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Papua	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Total	**1%**	**1%**	**2%**	**6%**	**21%**	**68%**	**100%**

Sumber: Hasil analisis, 2020

Kota yang merupakan wilayah Prioritas 1 adalah Kota Subulussalam di Provinsi Aceh. Kota tersebut dikategorikan daerah rentan pangan karena persentase balita *stunting* yang tinggi, rendahnya akses ke air bersih, dan rendahnya angka harapan hidup. Selanjutnya kota yang merupakan Prioritas 2 adalah Kota Tual di Provinsi Maluku. Kota tersebut masuk dalam kategori rentan pangan prioritas 2 karena memiliki angka kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kota pada Prioritas 3 ditemukan di Provinsi Sumatera Utara (Kota Gunung Sitoli) dan Sumatera Selatan (Kota Pagar Alam). Kota-kota tersebut masuk dalam kategori rentan pangan Prioritas 3 karena memiliki persentase balita *stunting* yang tinggi, rumah tangga dengan akses terhadap air bersih yang rendah, dan angka harapan hidup yang masih rendah.

Secara umum, indikator yang menyebabkan tingginya angka kerentanan terhadap rawan pangan di wilayah perkotaan adalah: i) tingginya prevalensi balita *stunting*, ii) tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, iii) rendahnya angka harapan hidup, iv) tingginya angka kemiskinan, dan v) tingginya rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran.

Persentase rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk pangan >65% di kota rentan rawan pangan masih cukup tinggi, yaitu 22,21%. Rumah tangga dengan pengeluaran untuk pangan yang tinggi rentan terhadap guncangan yang berhubungan dengan akses pangan, misalnya kenaikan harga pangan dan kehilangan pekerjaan (PHK). Bisa jadi, kenaikan harga pangan di perkotaan menyebabkan alokasi pendapatan untuk belanja pangan menjadi lebih besar. Kota rentan rawan pangan juga memiliki rata-rata persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih yang cukup tinggi, yaitu 35,25%, jauh dibandingkan dengan persentase rumah tangga di wilayah yang lebih tahan pangan sebesar 11,7%. Fasilitas/infrasturkur air bersih di kota-kota hasil pemekaran yang baru biasanya belum memadai sehingga jangkauan air bersih masih terbatas. Selain itu, rata-rata prevalensi balita *stunting* sebesar 30,90%; angka kemiskinan 16,44%; dan rata-rata angka harapan hidup sebesar 66,65 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dari wilayah Prioritas 4 – 6 (Tabel 6.4).

Tabel 6.4 Nilai Rata-rata Kelompok Kota Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan

Indikator	Prioritas Rentan (1 – 3)	Prioritas Tahan (4 – 6)
Angka kemiskinan	16,44	6,38
Pengeluaran pangan >65%	22,21	15,58
Terbatasnya akses ke listrik	1,45	0,13
Terbatasnya akses ke air bersih	35,25	11,71
Angka harapan hidup	66,65	72,15
Rasio penduduk per tenaga kesehatan	0,83	0,18
Lama sekolah perempuan >15 tahun	9,25	10,40
Stunting pada balita	30,90	21,61

Sumber: Hasil analisis, 2020

Seperti halnya pada wilayah kabupaten, pengentasan daerah rentan rawan pangan wilayah perkotaan juga harus dilakukan secara spesifik sesuai dengan akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan di wilayah tersebut. Penyediaan pangan di perkotaan mutlak mengandalkan perdagangan antar wilayah. Namun demikian, masyarakat dapat digerakkan untuk memanfaatkan lahan atau ruang terbuka yang ada di sekitar tempat tinggal sebagai lahan produksi beberapa jenis bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, kolam ikan, dan ternak unggas.

6.2. Perubahan Tingkat Kerentanan terhadap Ketahanan Pangan Kronis Tahun 2019-2020

Untuk mengetahui adaanya perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan maka kondisi 416 kabupaten dan 98 kota dari hasil FSVA 2019 dibandingkan dengan hasil FSVA 2020. Secara umum jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan turun dari 76 kabupaten/kota (14,8%) pada FSVA 2019 menjadi 70 kabupaten/kota (13,6%) pada FSVA 2020. Sebaliknya, kabupaten/kota tahan pangan naik dari 438 kabupaten/kota (85,2%) pada FSVA 2019 menjadi 444 kabupaten/kota (86,4%) pada FSVA 2020 (Tabel 6.5).

Tabel 6.5 Sebaran Kabupaten/Kota per Prioritas 2019-2020

Prioritas	Jumlah Kabupaten/Kota		Persentase Kabupaten/Kota	
	2018	2020	2019	2020
1	26	27	5%	5%
2	20	19	4%	4%
3	30	24	6%	5%
4	43	47	8%	9%
5	126	113	25%	22%
6	269	284	52%	55%
Total kabupaten/kota	**514**	**514**	**100%**	**100%**

Selanjutnya, penilaian terhadap perubahan tingkat kerentanan terhadap ketahanan pangan dilakukan dengan menggunakan lima kategori sebagai berikut:

1. Warna hijau tua menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak dua tingkat atau lebih, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 5.
2. Warna hijau muda menujukkan peningkatan prioritas sebanyak satu tingkat, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 4.
3. Warna kuning menunjukkan tidak adanya perubahan prioritas misalnya dari Prioritas 3 tetap di Prioritas 3.
4. Warna merah muda menunjukkan penurunan sebanyak satu tingkat, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 2.
5. Warna merah tua menunjukkan penurunan prioritas sebanyak dua tingkat atau lebih, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 1.

Perubahan Status Ketahanan Pangan Kabupaten pada Atlas 2019-2020

Hasil perbandingan antara FSVA 2020 dan FSVA 2019 menunjukkan bahwa dari total 416 kabupaten, 8 kabupaten (1,9%) mengalami peningkatan status ketahanan pangan sebanyak dua tingkat atau lebih, 52 kabupaten (12,5%) mengalami peningkatan status 1 tingkat, 37 kabupaten (8,9%) mengalami penurunan status 1 tingkat atau lebih, dan 319 kabupaten (77%) tidak mengalami perubahan status ketahanan pangan. Perubahan tingkat prioritas kabupaten per provinsi secara detail disampaikan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Perubahan Tingkat Prioritas Kabupaten per Provinsi 2019 – 2020

Provinsi	Turun 3 tingkat atau lebih	Turun 2 tingkat	Turun 1 tingkat	Tidak ada perubahan	Naik 1 tingkat	Naik 2 tingkat	Naik 3 tingkat atau lebih
Aceh	0	0	1	13	4	0	0
Sumatera Utara	0	0	1	12	10	2	0
Sumatera Barat	0	0	0	11	1	0	0
Riau	0	1	4	5	0	0	0
Jambi	0	0	3	6	0	0	0
Sumatera Selatan	0	1	1	10	1	0	0
Bengkulu	0	0	1	6	2	0	0
Lampung	0	0	1	12	0	0	0
Kep. Bangka Belitung	0	0	0	1	4	1	0
Kepulauan Riau	0	0	0	4	1	0	0
DKI Jakarta	0	0	0	1	0	0	0
Jawa Barat	0	0	1	15	2	0	0
Jawa Tengah	0	0	0	27	2	0	0
DI Yogyakarta	0	0	0	4	0	0	0
Jawa Timur	0	0	0	27	2	0	0
Banten	0	0	0	4	0	0	0
Bali	0	0	0	8	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	0	0	0	5	3	0	0
Nusa Tenggara Timur	0	0	2	19	0	0	0
Kalimantan Barat	0	0	0	7	4	1	0
Kalimantan Tengah	0	0	1	11	0	1	0
Kalimantan Selatan	0	0	0	11	0	0	0
Kalimantan Timur	0	0	1	3	2	1	0
Kalimantan Utara	0	1	1	2	0	0	0
Sulawesi Utara	0	1	0	9	1	0	0
Sulawesi Tengah	0	0	1	9	2	0	0
Sulawesi Selatan	0	0	0	20	1	0	0
Sulawesi Tenggara	0	0	3	10	2	0	0
Gorontalo	0	0	0	5	0	0	0
Sulawesi Barat	0	0	0	5	0	1	0
Maluku	0	1	2	3	3	0	0
Maluku Utara	1	1	2	4	0	0	0
Papua Barat	0	0	1	8	2	0	1
Papua	0	2	1	22	3	0	0
Total	**1**	**8**	**28**	**319**	**52**	**7**	**1**

Sumber: Hasil analisis, 2020

Perubahan Status Ketahanan Pangan Kota pada Atlas 2019-2020

Berdasarkan hasil perbandingan situasi ketahanan pangan di 98 kota, 4 kota (4%) yang mengalami peningkatan status ketahanan pangan 1 tingkat yaitu kota Gunung Sitoli dan Padang Sidempuan di Provinsi Sumatera Utara, Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan dan Kota Kediri di Jawa Timur. Peningkatan status pada wilayah kota tersebut secara umum disebabkan oleh penurunan persentase balita *stunting*, penurunan persentase pengeluaran pangan >65%, dan peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih.

Sementara itu, 90 kota (92%) tidak mengalami perubahan status ketahanan pangan, sedangkan 4 kota lainnya (4%) mengalami penurunan status ketahanan pangan 1 tingkat (Tabel 6.7). Penurunan status ketahanan pangan di wilayah tersebut disebabkan oleh persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen dan sebaran tenaga kesehatan yang belum merata.

Tabel 6.7 Perubahan Tingkat Prioritas Kota per Provinsi 2019 – 2020

Provinsi	Turun 3 tingkat atau lebih	Turun 2 tingkat	Turun 1 tingkat	Tidak ada perubahan	Naik 1 tingkat	Naik 2 tingkat	Naik 3 tingkat atau lebih
Aceh	0	0	1	4	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0	6	2	0	0
Sumatera Barat	0	0	0	7	0	0	0
Riau	0	0	0	2	0	0	0
Jambi	0	0	0	2	0	0	0
Sumatera Selatan	0	0	0	3	1	0	0
Bengkulu	0	0	0	1	0	0	0
Lampung	0	0	0	2	0	0	0
Kep. Bangka Belitung	0	0	0	1	0	0	0
Kepulauan Riau	0	0	0	2	0	0	0
DKI Jakarta	0	0	0	5	0	0	0
Jawa Barat	0	0	1	8	0	0	0
Jawa Tengah	0	0	0	6	0	0	0
DI Yogyakarta	0	0	0	1	0	0	0
Jawa Timur	0	0	0	8	1	0	0
Banten	0	0	1	3	0	0	0
Bali	0	0	0	1	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	0	0	0	2	0	0	0
Nusa Tenggara Timur	0	0	0	1	0	0	0
Kalimantan Barat	0	0	0	2	0	0	0
Kalimantan Tengah	0	0	0	1	0	0	0
Kalimantan Selatan	0	0	0	2	0	0	0
Kalimantan Timur	0	0	0	3	0	0	0
Kalimantan Utara	0	0	0	1	0	0	0
Sulawesi Utara	0	0	0	4	0	0	0
Sulawesi Tengah	0	0	0	1	0	0	0

Provinsi	Turun 3 tingkat atau lebih	Turun 2 tingkat	Turun 1 tingkat	Tidak ada perubahan	Naik 1 tingkat	Naik 2 tingkat	Naik 3 tingkat atau lebih
Sulawesi Selatan	0	0	0	3	0	0	0
Sulawesi Tenggara	0	0	0	2	0	0	0
Gorontalo	0	0	0	1	0	0	0
Maluku	0	0	1	1	0	0	0
Maluku Utara	0	0	0	2	0	0	0
Papua Barat	0	0	0	1	0	0	0
Papua	0	0	0	1	0	0	0
Total	**0**	**0**	**4**	**90**	**4**	**0**	**0**

Sumber: Hasil analisis, 2020

Peta 62. Perubahan Status Prioritas Kabupaten/Kota antara FSVA 2019 dan FSVA 2020

BAB 7
SITUASI PENYEBAB KERENTANAN PANGAN TRANSIEN

Kerentanan pangan transien yaitu kondisi suatu wilayah menjadi rentan rawan pangan yang disebabkan oleh kejadian di suatu wilayah pada waktu tertentu yang menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan masyarakat. Kerentanan pangan transien dibagi menjadi dua, yaitu **berulang (*cyclical*)**, di mana terdapat suatu pola yang berulang terhadap kondisi rawan pangan, misalnya, "musim paceklik" yang terjadi dalam periode sebelum panen dan **temporal (*temporary*)**, yang merupakan hasil dari suatu gangguan mendadak dari luar pada jangka pendek, seperti kekeringan atau kejadian bencana. Konflik sipil juga termasuk dalam kategori goncangan (*shock*) temporal meskipun dampak negatifnya terhadap ketahanan pangan dapat berlanjut untuk jangka waktu lama. Kerentanan pangan transien dapat terjadi pada masyarakat yang tinggal di wilayah rentan rawan pangan kronis dan juga masyarakat yang tinggal di wilayah tahan pangan. Faktor iklim dan lingkungan serta kemampuan *early warning*, mitigasi, dan *recovery* masyarakat terhadap goncangan sangat menentukan apakah suatu negara atau wilayah dapat mempertahankan atau meningkatkan ketahanan pangan dan status gizinya.

Pada FSVA 2020 informasi mengenai potensi yang dapat menyebabkan kerentanan pangan transien yang digunakan yaitu: i) data kejadian bencana alam yang terjadi di tingkat provinsi; ii) estimasi kehilangan produksi padi dan jagung akibat banjir, kekeringan dan Organisme Penganggu Tanaman; dan iii) variabilitas curah hujan.

7.1. Bencana Alam

Kejadian bencana alam merupakan salah satu penyebab terjadinya kerawanan pangan transien di Indonesia. Penelitian dari *Center for Research on the Epidemiology of Disasters* (CRED) menunjukkan bahwa terdapat lima negara (Amerika Serikat, Indonesia, China, Philipina, dan India) yang paling sering mengalami bencana alam pada tahun 2019 (Tabel 7.1). Indonesia menempati urutan kedua dengan jumlah kejadian bencana alam utama sebanyak 19 kali di tahun 2019.

Tabel 7.1 Negara yang Mengalami Bencana Alam Terbanyak 2019

Negara	Jumlah Kejadian Utama
Amerika Serikat	20
Indonesia	19
China	17
Philipina	16
India	12

Sumber: Center for Research on the Epidemiology of Disasters, 2020

Sementara data pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa selama periode tahun 2015-2019 telah terjadi 10.839 bencana alam yang menyebabkan 6.392 orang meninggal dunia (Tabel 7.2). Data tersebut mencakup seluruh jenis kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, angin

puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, gempa bumi dan tsunami, serta letusan gunung api. Kejadian bencana alam yang paling sering terjadi selama periode tahun 2015-2019 adalah angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Sedangkan gempa bumi dan tsunami merupakan kejadian bencana paling fatal yang menyebabkan 3.475 orang meninggal. Selain menyebabkan hilangnya nyawa manusia, bencana alam juga berdampak pada rusaknya lahan pertanian. Lahan pertanian yang terdampak oleh bencana alam selama 5 tahun terakhir mencapai 298.599 ha. Kejadian bencana alam di Indonesia paling sering terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh dan Kalimantan Timur (Gambar 7.1). Penguatan sistem *Early Warning System* (EWS) dan mitigasi bencana di wilayah rentan tidak dapat ditunda lagi. Hal ini penting menjadi prioritas agar dapat meminimalkan jumlah korban dan dampak fisik serta ekonomi akibat bencana.

Tabel 7.2 Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia dan Kerusakannya 2015-2019

Bencana	Kejadian	Meninggal	Terluka	Menderita	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Fasilitas Kesehatan Rusak	Fasilitas Pendidikan Rusak	Lahan Pertanian (Ha)	Hutan (ha)
Banjir	3.388	875	2.825	8.891.865	11.545	8.656	30.321	267	3.035	247.873	37.584
Tanah Longsor	2.775	743	620	165.612	5.326	4.424	5.520	20	134	7.071	33
Gelombang Pasang/Abrasi	82	1	5	126.086	156	87	87	0	5	941	73
Puting Beliung	3.491	117	858	72.151	8.268	11.353	53.454	36	321	1.079	10
Kekeringan	188	0	0	10.536.699	0	0	0	0	0	30.384	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	745	31	374	595	1	0	2	0	0	10.638	8.522
Gempa Bumi	89	688	3.324	644.119	84.430	43.871	131.311	242	1.472	614	0
Tsunami	1	453	14.059	41.132	1.583	70	1.099	0	0	0	0
Gempa Bumi dan Tsunami	1	3.475	4.438	221.450	68.451	0	0	22	265	0	0
Letusan Gunung Api	79	9	68	279.664	7	0	1	0	0	0	50
Total	**10.839**	**6.392**	**26.571**	**20.979.373**	**179.767**	**68.461**	**221.795**	**587**	**5.232**	**298.599**	**46.271**

Sumber: BNPB, 2020

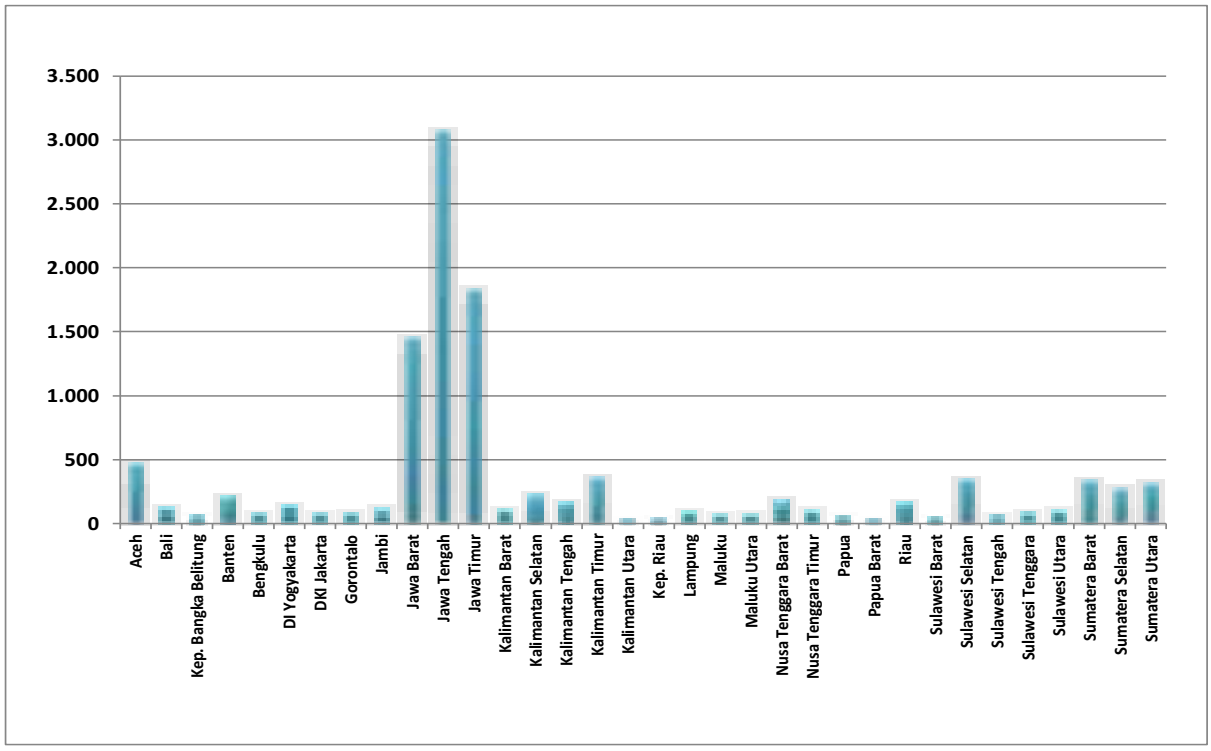

Sumber: BNPB, 2020

Gambar 7.1 Bencana Alam per Provinsi 2015 – 2019

7.2. Variabilitas Iklim

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Benua Asia dan Australia, dikelilingi oleh Samudera Hindia dan Pasifik, serta merupakan negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Kondisi ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki pola iklim tropis yang bervariasi. Dinamika iklim global ikut mempengaruhi pola dan intensitas cuaca dan iklim di Indonesia, seperti fenomena *El Nino/La Nina* dan *Dipole Mode*. Iklim Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena regional, seperti sirkulasi monsoon Asia-Australia, daerah pertemuan angin antar tropis atau *Inter Tropical Convergence Zone* (ITCZ) yang merupakan daerah pertumbuhan awan, serta suhu permukaan laut sekitar wilayah Indonesia. Selain itu, kondisi topografi wilayah Indonesia yang bergunung, lembah dan berpantai juga turut menambah keragaman kondisi iklim di wilayah Indonesia.

Parameter utama yang digunakan untuk memantau kondisi iklim di wilayah Indonesia adalah suhu udara dan hujan. Variabilitas suhu udara dan curah hujan berperan penting terhadap produktivitas usaha pertanian, perkebunan dan perikanan. Siklus pertumbuhan tanaman dan ternak akan optimal pada kondisi cuaca yang sesuai dengan fase hidupnya. Berdasarkan data observasi BMKG tahun 1981-2019, rata-rata suhu tahunan di Indonesia memiliki besaran yang bervariasi. Perubahan suhu udara juga dapat dianalisis dari fenomena anomali suhu. Anomali suhu udara adalah perbandingan suhu udara pada tahun tertentu, relatif terhadap periode normal rentang waktu tahun 1981-2010. Pada tahun 2019 wilayah Indonesia mengalami anomali suhu udara sebesar 0,58°C dibandingkan dengan periode normal 1981-2010. Untuk wilayah Indonesia, tahun 2016 merupakan tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0,8°C sepanjang periode pengamatan, sedangkan tahun 2019 dan 2015 masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga tahun 2015. Sebagai perbandingan, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO)

secara global menempatkan tahun 2016 sebagai tahun terpanas yang pernah dicatat (1,2°C dibandingkan era pra industri) dan tahun 2019 tercatat sebagai tahun terpanas kedua. Pada tahun 2019, beberapa provinsi yang mengalami anomali suhu udara tertinggi dibandingkan periode normal adalah Kepulauan Riau 1,13°C, Banten 1,03°C, Kalimantan Utara 0,89°C, dan Sumatera Selatan 0,87°C.

Sebagian besar wilayah Indonesia pada tahun 2019 memiliki sifat hujan normal dan sedikit atas normal, kecuali di bagian tengah Papua yang kondisi sifat hujannya di bawah normal (Gambar 7.1). Periode musiman Desember-Januari-Februari (DJF) memiliki sifat hujan yang bervariasi namun masih didominasi oleh kondisi sifat hujan normal, kecuali di beberapa tempat seperti Jawa bagian barat, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan Timur dan beberapa tempat di Sulawesi yang memiliki sifat hujan di atas normal. Periode Maret-April-Mei (MAM) didominasi sifat hujan atas normal, kecuali Papua, bagian tengah Sulawesi dan bagian selatan Sumatera yang didominasi sifat hujan normal. Periode Juni-Juli-Agustus (JJA) didominasi oleh sifat hujan atas normal, kecuali di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang didominasi oleh sifat hujan bawah normal. Sementara periode September-Oktober-November (SON) didominasi sifat hujan atas normal, kecuali wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur yang didominasi sifat hujan normal.

Sepanjang tahun variabilitas iklim di Indonesia cukup rendah dengan rata-rata sifat hujan normal dan anomali suhu sebesar 0,58°C. Kondisi ini memberikan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman dan ternak terutama dalam penyediaan air dan suhu.

Prakiraan Musim Kemarau 2020

Berdasarkan hasil analisis data rata-rata 30 tahun terakhir (1981-2010), secara klimatologis wilayah Indonesia memiliki 407 pola iklim, dimana 342 pola merupakan Zona Musim (ZOM) dengan perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan musim kemarau, sedangkan 65 pola lainnya adalah Non Zona Musim (Non ZOM). Daerah Non ZOM pada umumnya memiliki 2 kali maksimum curah hujan dalam setahun (pola Ekuatorial) atau daerah dimana sepanjang tahun curah hujannya selalu tinggi atau rendah.

Awal Musim Kemarau 2020 di 342 Zona Musim (ZOM) diprakirakan terjadi mulai bulan April 2020 sebanyak 58 ZOM (17%), Mei 2020 sebanyak 131 ZOM (38.3%), dan Juni 2020 sebanyak 94 ZOM (27,5%). Sedangkan beberapa daerah lainnya awal Musim Kemarau terjadi pada Januari 2020 sebanyak 3 ZOM (0,9%), Februari 2020 sebanyak 1 ZOM (0,3%), Maret 2020 sebanyak 13 ZOM (3,8%), Juli 2020 sebanyak 28 ZOM (8,2%), Agustus 2020 sebanyak 11 ZOM 6 (3,2%), September 2020 sebanyak 2 ZOM (0,6%), dan November 2020 1 ZOM (0,3%).

Jika dibandingkan terhadap rata-ratanya selama 30 tahun (1981- 2010) di 342 Zona Musim, awal musim kemarau 2020 dari 148 ZOM (43,3%) mundur jika dibandingkan dengan rata-ratanya, 128 ZOM (37,4%) sama terhadap rata-ratanya, dan 66 ZOM (19,3%) maju dibandingkan rata-ratanya.

Sifat Hujan selama Musim Kemarau 2020 diilustrasikan dalam Peta 7.2. Sebagian besar wilayah, yaitu 197 ZOM (57,6%) diprakirakan memiliki sifat hujan normal, 103 ZOM (30,1%) memiliki sifat hujan bawah normal, dan 42 ZOM (12,3%) memiliki sifat hujan atas normal.

Puncak Musim Kemarau 2020 di 342 Zona Musim (ZOM) diprakirakan umumnya terjadi pada bulan Agustus 2020 sebanyak 222 ZOM (64,9%) (Peta 7.3). Sedangkan beberapa wilayah lainnya puncak Musim Kemarau terjadi pada bulan Januari sebanyak 3 ZOM (0,9%), Februari sebanyak 1 ZOM (0,3%), Juni sebanyak 15 ZOM (4,4%), Juli sebanyak 34 ZOM (9,9%), September sebanyak 64 ZOM (18,7%), Oktober sebanyak 2 ZOM (0,6%) dan November sebanyak 1 ZOM (0,3%).

7.3. Kehilangan Produksi yang Disebabkan oleh Kekeringan, Banjir dan Organisme Pengganggu Tanaman

Kehilangan produksi pada statistik Indonesia terdiri dari kehilangan total (puso) dan terdampak (ketika kehilangan kurang dari 50%). Proporsi kerusakan tanaman padi dan jagung terhadap luas area tanaman padi dan jagung yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan OPT di setiap provinsi pada periode 2015-2019 disampaikan pada Tabel 7.3. Kerusakan tanaman padi dan jagung selama periode 2015 dan 2019 berkisar antara 0,45 -1,79% dan 0,18-0,73%. Kerusakan pertanaman padi akibat puso terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 1,79% dan tahun 2019 sebesar 1,16%. Kerusakan tanaman padi pada tahun 2019 paling banyak terjadi di Sulawesi Tenggara (6,99%), DI Yogyakarta (3,32%), Sulawesi Selatan (3,03%), Banten (2,50%) dan Jambi (2,08%). Sementara kerusakan tanaman jagung paling banyak terjadi di Sulawesi Tenggara (4,99%), Sulawesi Tengah (1,44%), Jambi (1,26%), Bengkulu (0,75%) dan Sulawesi Selatan (0,71%).

Tabel 7.3 Perbandingan Area Puso Padi dan Jagung Akibat Banjir, Kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman 2015-2019

Provinsi	Padi (%)					Jagung (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	1,27	1,44	1,78	0,50	0,13	1,35	0,97	1,23	2,90	0,04
Sumatera Utara	0,35	0,27	0,4	0,34	0,09	0,17	1,19	1,19	0,10	0,02
Sumatera Barat	0,31	0,47	0,10	0,15	0,08	0,07	0,33	0,23	0,12	0,09
Riau	1,11	5,03	0,58	4,70	1,62	2,16	1,05	0,23	0,37	0,11
Jambi	4,43	3,81	2,23	1,16	2,08	1,07	2,67	2,33	2,62	1,26
Sumatera Selatan	3,22	1,36	0,74	0,20	0,71	1,83	0,26	0,02	0,05	0,01
Bengkulu	0,16	0,01	0,01	0,01	0,28	0,14	-	-	-	0,75
Lampung	2,27	0,07	1,38	1,29	0,81	0,06	0,14	0,01	0,42	0,09
Bangka Belitung	2,08	1,88	1,01	0,16	0,87	6,33	-	-	0,49	-
Kepulauan Riau*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	2,61	0,23	0,30	0,39	1,76	0,01	0,01	0,12	3,84	0,13
Jawa Tengah	1,06	0,40	0,47	0,71	1,83	0,04	0,21	0,04	1,72	0,03
DI Yogyakarta	0,09	0,07	0,54	0,10	3,32	0,01	0,78	0,69	0,16	0,00
Jawa Timur	0,39	0,21	0,18	0,59	0,68	0,02	0,73	0,05	0,81	0,05
Banten	3,77	0,17	0,30	0,43	2,50	-	-	0,21	1,31	0,14
Bali	0,34	0,16	0,12	0,07	0,08	0,03	0,13	0,00	0,24	-
NTB	0,26	0,29	0,64	0,90	1,18	0,13	0,02	0,08	1,41	0,09
NTT	0,01	0,17	0,09	0,02	0,98	0,01	0,45	0,03	0,02	0,05
Kalimantan Barat	0,14	0,09	0,02	0,11	0,02	0,01	-	0,02	0,03	0,02
Kalimantan Tengah	0,04	0,24	0,64	0,30	0,29	0,97	0,04	0,31	2,52	0,03
Kalimantan Selatan	1,22	0,78	0,26	0,03	0,05	0,14	0,28	0,09	0,01	0,01

Provinsi	Padi (%)					Jagung (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Timur	3,83	0,41	1,32	0,45	1,00	-	0,03	-	0,02	-
Kalimantan Utara	-	-	0,16	-	0,00	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	0,53	0,0	0,01	0,01	0,03	1,06	0,02	0,00	0,00	-
Sulawesi Tengah	3,14	0,26	0,24	0,14	0,52	2,32	0,22	0,60	0,03	1,44
Sulawesi Selatan	5,15	0,36	3,08	1,82	3,03	1,48	0,20	0,24	1,05	0,71
Sulawesi Tenggara	7,49	0,25	1,75	1,47	6,99	0,20	0,04	0,15	1,14	4,99
Gorontalo	8,39	1,98	0,67	0,19	1,62	7,03	7,72	0,41	0,04	0,58
Sulawesi Barat	2,37	0,14	0,04	0,04	0,01	0,08	0,21	0,15	0,05	0,21
Maluku	2,83	0,06	0,09	0,02	-	-	-	-	0,02	-
Maluku Utara	-	-	-	-	0,03	-	0,25	-	-	-
Papua Barat	0,04	-	-	0,55	0,58	-	-	-	0,44	-
Papua	11,95	-	0,06	0,18	-	-	-	0,10	0,28	-
Total	**1,79**	**0,45**	**0,68**	**0,59**	**1,16**	**0,58**	**0,76**	**0,18**	**0,73**	**0,24**

Sumber: Kementerian Pertanian, 2020

** Provinsi yang mempunyai tingkat kerusakan sangat kecil sehingga dapat diabaikan*

Selama periode 2015-2019, puso pada tanaman padi yang disebabkan kekeringan paling banyak terjadi di Sulawesi Selatan (93.411 Ha), Jawa Barat (86.397 Ha), Jawa Tengah (54.795 Ha), Jawa Timur (25.451 Ha), dan Sumatera Selatan (22.633 Ha). Sementara, puso pada tanaman padi yang disebabkan banjir paling banyak terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan (51.526 Ha), Jawa Tengah (24.476 Ha), Sumatera Selatan (24.196 Ha), Lampung (24.040 Ha), dan Aceh (17.790 Ha).

Peta 7.1 Peta Sifat Hujan Indonesia Tahun 2019

Sumber: BMKG, 2020

Peta 7.2 Peta Prakiraan Sifat Hujan Musim Kemarau Tahun 2020

Sumber: BMKG, 2020

Peta 7.3 Peta Prakiraan Puncak Musim Kemarau Tahun 2020

Sumber: BMKG, 2020

BAB 8
REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil analisis komposit ketahanan pangan terhadap 514 kabupaten/kota menempatkan 26 kabupaten (6,2%) dan 1 kota (1%) pada Prioritas 1, 18 kabupaten (4,3%) dan 1 kota (1%) pada Prioritas 2, 22 kabupaten (5,3%) dan 2 kota (2%) pada Prioritas 3, 41 kabupaten (9,9%) dan 6 kota (6,1%) pada Prioritas 4, 92 kabupaten (22,1%) dan 21 kota (21,5%) pada Prioritas 5 dan 217 kabupaten (52,2%) dan 67 kota (68,4%) pada Prioritas 6. Total kabupaten/kota yang masuk ke dalam Prioritas 1-3 (rentan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 70 kabupaten/kota (13,6%). Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Timur dan daerah kepulauan memiliki tingkat kerentanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Barat dan daerah bukan kepulauan.

Penyebab terjadinya kondisi rentan rawan pangan di setiap wilayah berbeda-beda, oleh karenanya intervensi program yang dilakukan idealnya bersifat spesifik lokasi. Namun demikian, pendekatan pengentasan kerentanan terhadap kerawanan pangan secara umum dapat dibedakan antara wilayah kabupaten dan perkotaan dengan pertimbangan: i) luas wilayah kabupaten relatif lebih luas; ii) kepadatan penduduk kota lebih tinggi; iii) mata pencaharian penduduk kabupaten pada umumnya bergerak di sektor agraris, sedangkan penduduk kota di perdagangan dan jasa; iv) tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk kota relatif lebih baik; dan v) rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten relatif lebih rendah dibandingkan kota.

Intervensi pada daerah rentan rawan pangan didasarkan pada faktor yang menjadi penyebab kondisi tersebut. Jika permasalahan disebabkan oleh faktor ketersediaan, maka perlu upaya-upaya peningkatan ketersediaan pangan, baik melalui peningkatan produksi, cadangan pangan, maupun perbaikan pada sistem perdagangan antar wilayah. Permasalahan pada akses ekonomi/daya beli yang rendah dapat diatasi dengan penyediaan lapangan kerja atau jaring pengaman sosial. Keterbatasan infrastruktur dapat diatasi dengan pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan gudang untuk penyimpanan stok pangan. Masalah kesehatan dan gizi diatasi dengan penyuluhan tentang gizi, konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman, sanitasi lingkungan serta pemerataan tenaga kesehatan. Sementara itu, penanganan kerentanan pangan transien dapat dilakukan melalui intervensi penyaluran cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dan/atau program pasca bencana untuk meningkatkan ketersediaan pangan keluarga. Kerangka pengentasan daerah rentan rawan pangan secara detail disajikan pada Gambar 8.1.

Gambar 8.1 Kerangka Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan

8.1. Wilayah Kabupaten

Penyebab terjadinya kerentanan pangan di setiap kabupaten tidak selalu sama, oleh karena itu diperlukan pendekatan/program yang spesifik. Selain memetakan situasi ketahan pangan suatu daerah, FSVA juga menganalisis penyebab terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan. Oleh karena itu, hasil rekomendasi FSVA dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan program ketahanan pangan sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pemetaan FSVA 2020, prioritas lokasi pengentasan kerentanan pangan di wilayah kabupaten direkomendasikan pada:

a. Kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah Indonesia Timur dengan daerah rentan rawan pangan terbesar
b. Kabupaten-kabupaten di kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.

Sementara berdasarkan hasil analisis, kabupaten yang berada dalam kelompok rentan rawan pangan Prioritas 1-3 (66 kabupaten) diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) tingginya penduduk miskin, iii) tingginya rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, iv) tingginya prevalensi balita *stunting*, dan v) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Sehingga program-program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan wilayah kabupaten rentan rawan pangan dapat diarahkan pada kegiatan:

a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mengoptimalkan lahan marginal dan ruang terbuka untuk produksi sesuai potensi sumberdaya lokal
b. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha

produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakan ekonomi wilayah untuk menurunkan kemiskinan

c. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan
d. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan sanitasi untuk menurunkan prevalensi *stunting* dan peningkatan gizi masyarakat
e. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan secara umum ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kabupaten seperti digambarkan pada Gambar 8.2.

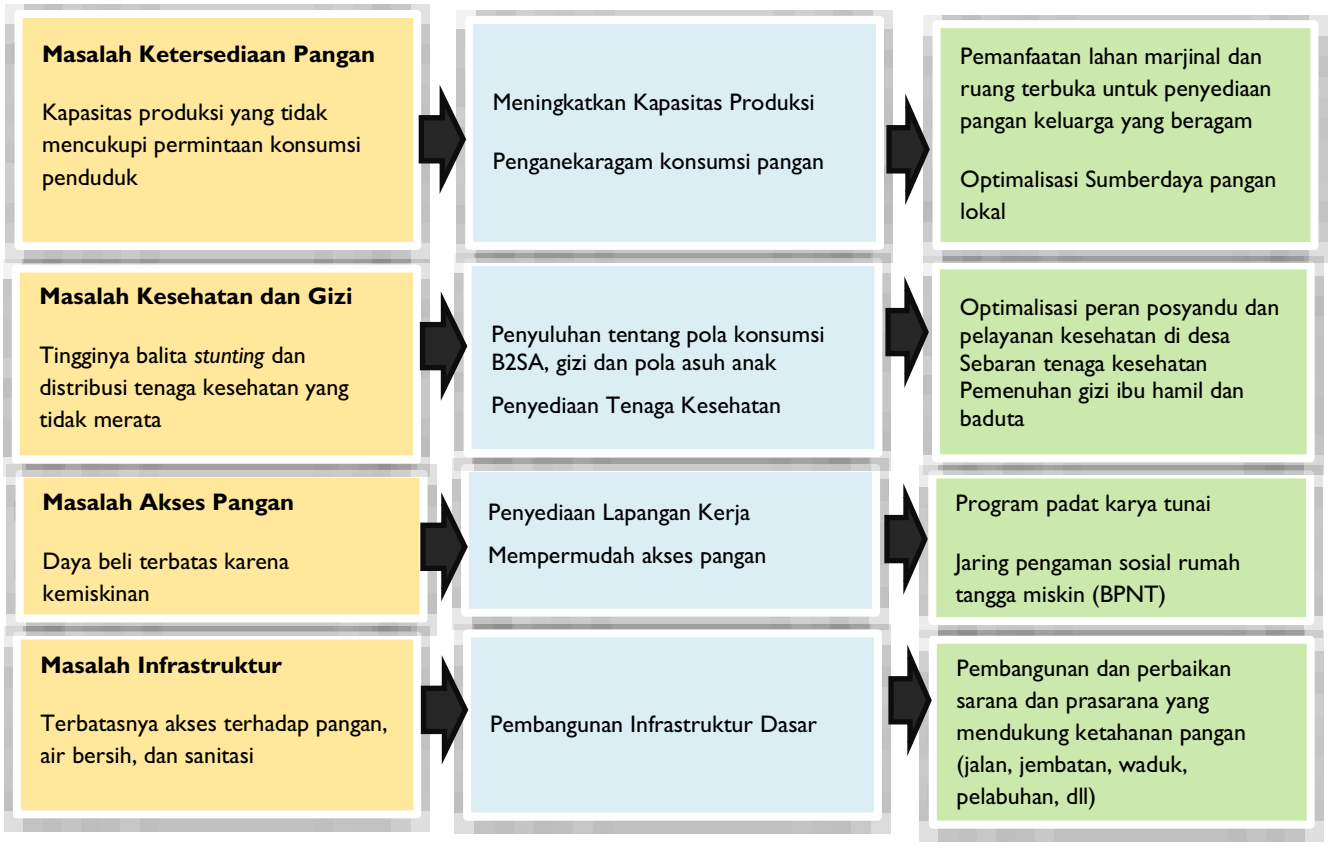

Gambar 8.2 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

8.2. Wilayah Perkotaan

Hasil analisis komposit ketahanan pangan dari 98 kota menunjukkan bahwa kota rentan rawan pangan Prioritas 1-3 berjumlah 4 kota, sedangkan kota tahan pangan Prioritas 4-6 berjumlah 94 kota. Kota-kota yang berada pada Prioritas 1 – 3 diindikasikan oleh: i) tingginya prevalensi balita *stunting*, ii) tingginya penduduk miskin, iii) rendahnya angka harapan hidup, dan iv) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Oleh karena itu, program-program pengentasan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:

a. Peningkatan ketersediaan pangan keluarga melalui pengembangan *urban farming*

b. Penanganan balita *stunting* melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan untuk mendukung kesehatan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diantaranya adalah melalui pemberian vitamin yang dilengkapi zat besi, yodium, asam folat untuk ibu hamil; mendukung pemberian ASI esklusif bayi usia 0-6 bulan; dan pemberian MP ASI untuk anak usia 7-23 bulan. Intervensi gizi sensitif yang diarahkan untuk penyediaan bahan pangan yang cukup dan beragam, akses air bersih, sanitasi, akses layanan kesehatan, pendidikan gizi, jaring pengaman sosial, dan peningkatan pendapatan keluarga
c. Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
d. Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli
e. Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan
f. Peningkatan akses terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.

Pengentasan daerah rentan rawan pangan di wilayah perkotaan diprioritaskan pada:
a. Kota-kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terutama dalam hal stabilisasi pasokan dan daya beli masyarakat
b. Kota-kota yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang terbatas ataupun karena buruknya sanitasi.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan secara umum ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di perkotaan seperti digambarkan pada Gambar 8.3.

Gambar 8.3 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

8.3. Kerjasama Lintas Progam dan Lintas Sektor

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang dilakukan harus mampu meningkatkan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan sesuai amanat UU Pangan No. 18 Tahun 2012. Sementara kondisi kerentanan pangan dan gizi di suatu wilayah disebabkan oleh permasalahan yang bersifat multi-sektor dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (pemerintah,

pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantrofi, LSM, media, akademisi dan lembaga pengkajian serta komunitas madani di pusat dan daerah) yang bersinergi dalam bentuk program yang koheren di tingkat lapangan (Gambar 8.4).

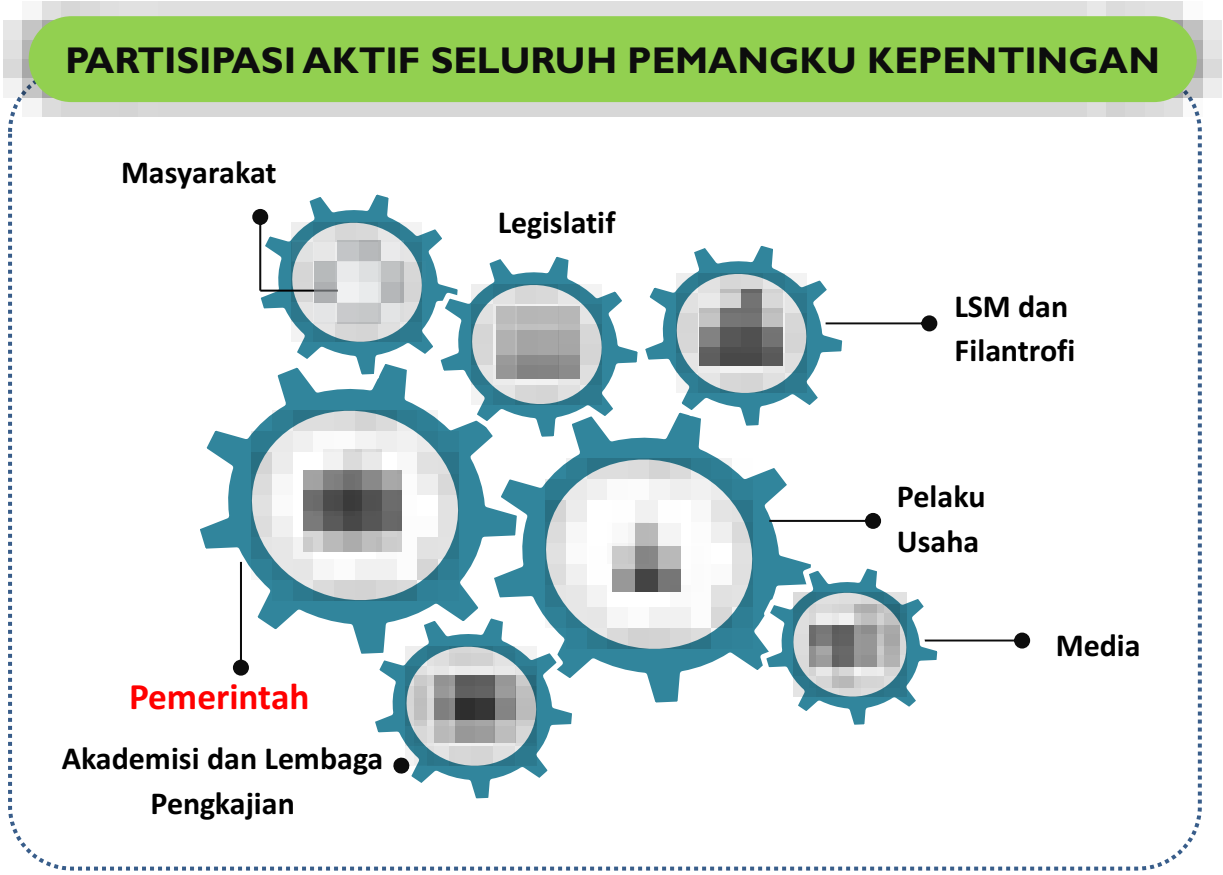

Gambar 8.4 Peran Aktif Pemangku Kepentingan dalam Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan

Sinergi program pengentasan kerentanan pangan telah diinisiasi oleh Badan Ketahanan Pangan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Eselon I Kementerian Kesehatan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Sosial; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Ketahanan Nasional. Inisiasi ini ditindaklanjuti dengan kesepakatan yang lebih tinggi melalui nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Menteri Dalam Negeri; Menteri Kesehatan; dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satu ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman tersebut adalah pengentasan daerah rentan rawan pangan dan *stunting*.

Selanjutnya Tim Pelaksana Percepatan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan dibentuk untuk mengoptimalkan sinergitas dukungan program dan operasionalisasi pengentasan daerah rentan rawan pangan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan No. 06/KPTS/OT.050/J/01/2020.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim yaitu: (1) meningkatkan kovergensi program/kegiatan di lokus yang menjadi prioritas pengentasan daerah rentan rawan pangan; (2) menyediakan data dan informasi perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan; (3) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan; serta (4) update perkembangan program/kegiatan pengentasan daerah rentan pangan secara berkala.

Inisiasi yang telah dilakukan di tingkat pusat perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dengan melibatkan akademisi, swasta, dan seluruh komponen masyarakat. Sehingga program pengentasan daerah rentan rawan pangan dan *stunting* dapat dilakukan secara masif dan terarah sampai tingkat administrasi terendah yaitu desa. Sinergi ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi anggaran dan tenaga kerja serta mempercepat pencapaian tujuan akhir program.

BAB 9
KETAHANAN PANGAN DI MASA PANDEMI COVID – 19

9.1. Tantangan Ketahanan Pangan di Masa Pandemi

Pandemi COVID-19 diperkirakan mempengaruhi sistem pangan di Indonesia baik di level nasional maupun daerah. Pembatasan sosial yang diterapkan untuk mencegah penyebaran penyakit berisiko menghambat produksi dan pasokan komoditas pangan, terutama komoditas pangan yang mudah rusak, seperti sayur, buah, daging, ikan, dan telur. Melemahnya pasar dan rantai pasokan, kurangnya fasilitas pendinginan, serta gangguan perdagangan, dapat membatasi akses masyarakat ke sumber pangan yang cukup, beragam, dan bergizi, baik masyarakat di pedesaan dan perkotaan terutama yang terkena wabah COVID-19 atau wilayah dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi. Secara umum tantangan yang dihadapi selama pandemi COVID-19 antara lain: (1) menjaga petani tetap berproduksi, (2) merubah pola konsumsi masyarakat baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan memanfaatkan berbagai sumber pangan lokal, (3) hambatan distribusi pangan antar provinsi/pulau dan dalam provinsi, (4) harga cenderung tidak berpola, (5) perubahan ke *online transaction*, dan (6) *export restriction*

Survei yang dilakukan oleh Jobstreet (2020) terhadap 5.131 pencari kerja dan 486 perekrut memprediksi jumlah pengangguran mencapai 11 juta orang pada akhir tahun 2020. Hasil ini sejalan dengan data BPS (2020) yang menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan dari 5,23% tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020, dimana TPT Perkotaan lebih tinggi dibandingkan TPT Perdesaan (Gambar 9.1). Selain itu, dari Total Penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 diperkirakan sebesar 14,28 persen atau 29,12 juta orang.

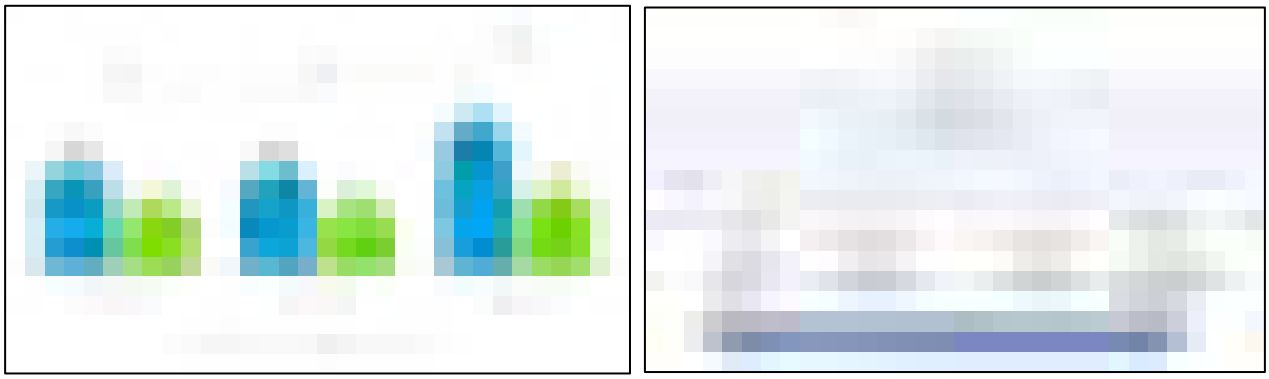

Sumber: BPS 2020

Gambar 9.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

BPS (2020) juga menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk sehingga menyebabkan tambahan orang miskin baru. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78%, meningkat 0,56% poin terhadap September

2019. Peningkatan persentase penduduk miskin tersebut dialami oleh 22 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Peningkatan juga terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56%, naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60%, naik menjadi 12,82% pada Maret 2020.

Sumber: BPS 2020

Gambar 9.2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin

Peningkatan persentase penduduk miskin akan berpengaruh pada kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan. Data CSIS (2020) menyebutkan bahwa 135 juta jiwa akan menghadapi kerawanan pangan akut pada awal tahun 2020, dan diperkirakan meningkat menjadi 265 juta pada akhir tahun 2020. Sementara publikasi BPS dan BKP (2020) menyatakan bahwa terjadi peningkatan angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dari 7,66% pada tahun 2019 menjadi 8,60% pada tahun 2020.

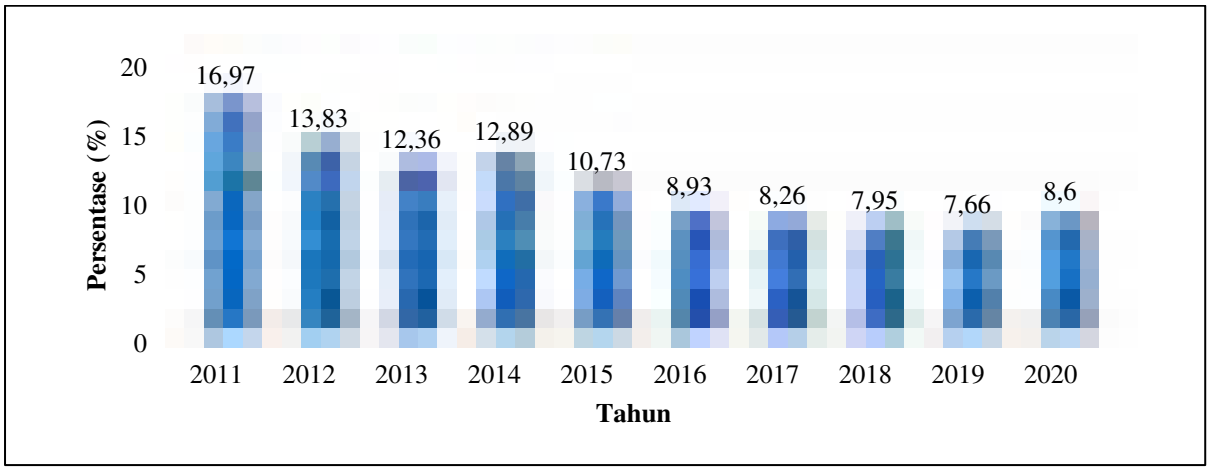

Sumber: BPS 2020

Gambar 9.3 PoU Nasional Tahun 2011-2020

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi juga menunjukkan angka negatif atau mengalami kontraksi. Ekonomi Indonesia triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen (y-on-y) (BPS 2020). Ditengah pandemi hanya sektor pertanian yang menunjukkan pertumbuhan positif.

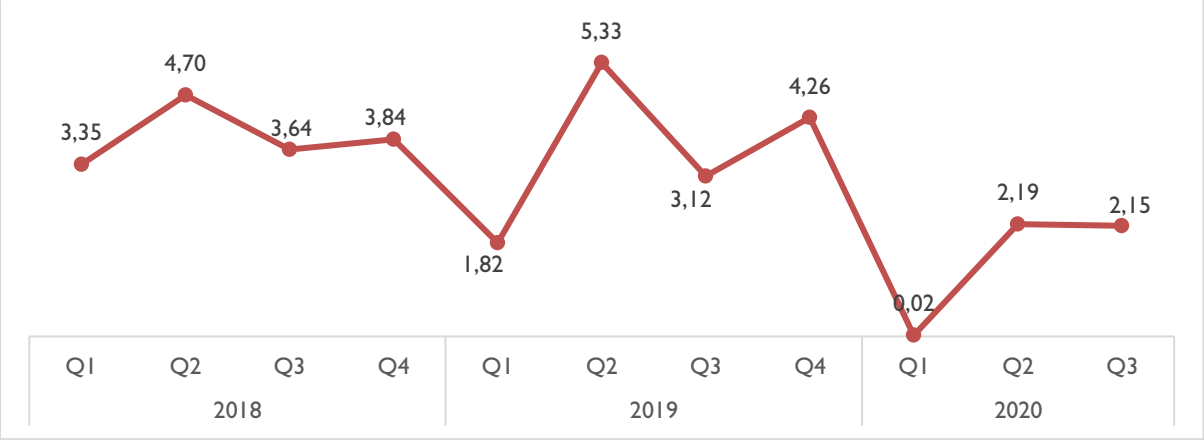

Sumber: BPS 2020

Gambar 9.4 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (y-on-y)

9.2. Dampak Pandemi Terhadap Penyediaan dan Konsumsi Pangan Rumah Tangga

Sejalan dengan survey Jobstreet dan data kemiskinan BPS, pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pekerjaan dan pendapatan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pandemi mengakibatkan berkurangnya pekerjaan, yang berdampak pada turunnya pendapatan sebesar <50%. Survey Susenas tahun 2019 menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pangan 29,09% rumah tangga Indonesia >65% dari pengeluaran total. Oleh karena itu, adanya pengurangan pendapatan pada saat pandemi diperkirakan akan berdampak pada rumah tangga, khususnya yang memiliki porsi pengeluaran pangan >65%.

Meskipun sebagian besar responden menyatakan bahwa pendapatan mereka berkurang, frekuensi pembelian pangan pokok beras tidak banyak mengalami perubahan meskipun jumlah per pembelian mengalami penurunan. Sebelum pandemi, sebagian besar responden membeli >10kg per pembelian sedangkan saat pandemi sebanyak 34,2% responden membeli >5-10kg per pembelian.

Gambar 9.5 Pembelian Beras Sebelum dan Saat Pandemi

Penurunan frekuensi justru terjadi pada pembelian daging sapi, dimana pada saat pandemi lebih banyak responden yang memilih tidak membeli daging sapi.

Gambar 9.6 Pembelian Daging Sapi Sebelum dan Saat Pandemi

Selain daging sapi, frekuensi pembelian daging ayam juga mengalami penurunan dari 1 minggu sekali sebelum pandemi, menjadi 2 minggu dan bahkan 1 bulan sekali. Penurunan juga terjadi tidak hanya pada frekuensi, namun juga pada jumlah per pembelian. Meskipun sebagian besar responden masih membeli 1 kg ayam per pembelian, namun jumlah responden yang membeli 0,5 kg per pembelian juga meningkat.

Gambar 9.7 Pembelian Daging Ayam Sebelum dan Saat Pandemi

Di sisi lain, telur ayam sebagai sumber penyedia protein alternatif juga mengalami perubahan frekuensi pembelian. Pada saat pandemi responden yang biasa membeli telur ayam setiap hari atau 1 minggu sekali berkurang jumlahnya, sedangkan responden yang membeli telur 2 minggu dan 1 bulan sekali semakin banyak. Namun demikian, tidak ada perubahan yang berarti dari sisi jumlah telur per pembelian oleh responden. Lebih dari 50% responden membeli telur 1 kg per pembelian, baik sebelum dan saat pandemi.

Gambar 9.8 Pembelian Telur Ayam Sebelum dan Saat Pandemi

Komoditas sumber protein lainnya seperti ikan tidak banyak mengalami perubahan pada saat pandemi. Mayoritas responden masih membeli ikan dengan frekuensi 1 minggu sekali dan dengan jumlah per pembelian sebanyak 0,5 hingga 1 kg.

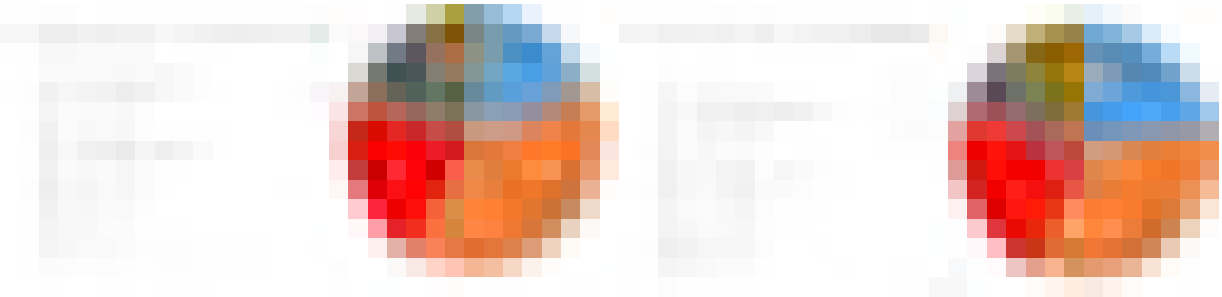

Gambar 9.9 Pembelian Ikan Sebelum dan Saat Pandemi

Pembelian sayur dan buah saat pandemi juga mengalami perubahan. Frekuensi pembelian sayur yang biasanya setiap hari berubah menjadi 1 minggu sekali saat pandemi. Namun penyediaan sayur umumnya tidak berumah. Sebagian besar rumah tangga masih menyediakan 1 jenis sayur setiap hari. Sementara itu, meskipun sebagian besar responden masih membeli buah dengan frekuensi dan jumlah yang sama, jumlah responden yang tidak membeli buah juga meningkat dari 5% menjadi 11,9%.

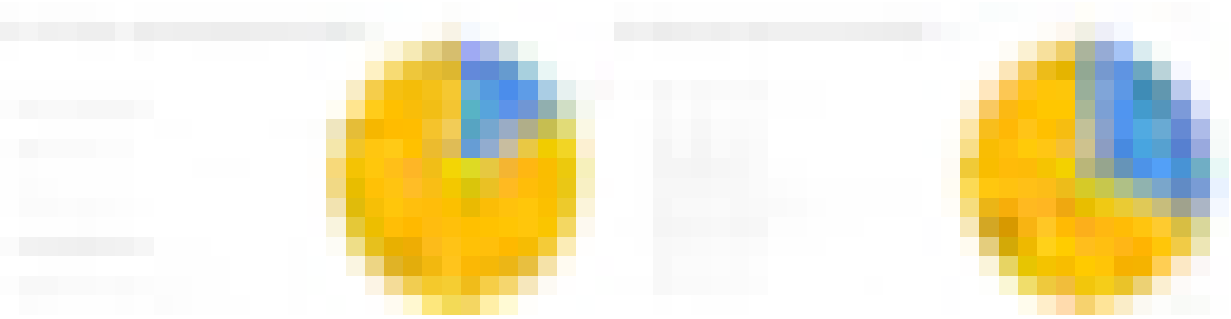

Gambar 9.10 Pembelian Sayur Sebelum dan Saat Pandemi

Penyediaan pangan berbanding lurus dengan konsumsi pangan. Seperti halnya dengan pembelian beras yang tidak banyak mengalami perubahan, konsumsi beras sebagian responden juga dilaporkan tetap. Namun demikian, sebanyak 14,9% responden menyatakan bahwa konsumsi beras turun ≥25-50%, dan 9,4% menyatakan bahwa konsumsi beras naik turun ≥25-50%.

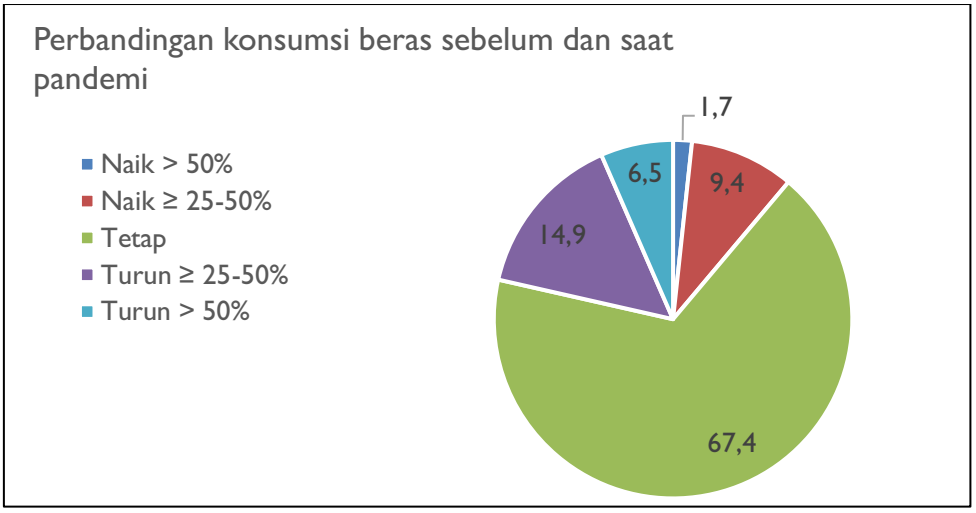

Gambar 9.11 Perbandingan Konsumsi Beras Sebelum dan Saat Pandemi

Sejalan dengan penyediaannya yang turun, konsumsi daging sapi juga mengalami banyak perubahan saat pandemi. Sebanyak 34,2% rumah tangga menyatakan bahwa konsumsi daging sapi selama pandemi turun >50% dan sebanyak 27,6% rumah tangga menyatakan bahwa konsumsinya turun 25-50%. Sementara itu responden yang tidak mengkonsumsi daging sapi mencapai 11,5%.

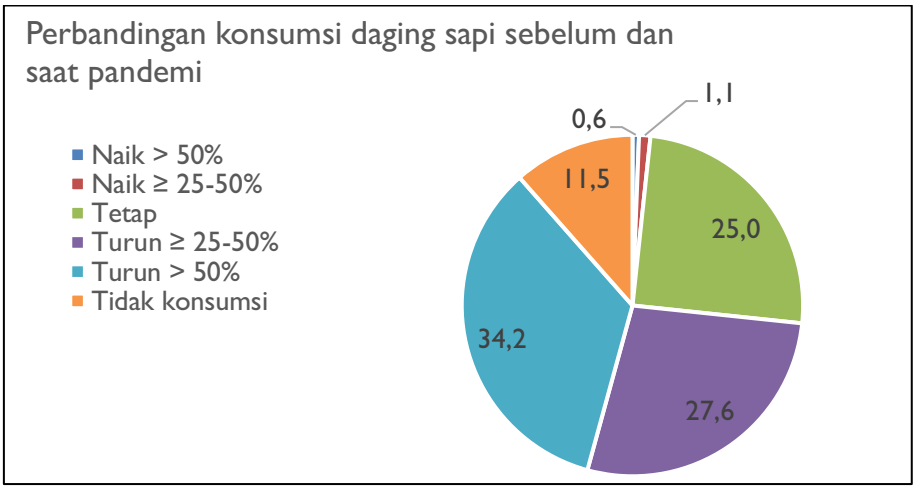

Gambar 9.12 Perbandingan Konsumsi Daging Sapi Sebelum dan Saat Pandemi

Konsumsi rumah tangga terhadap daging ayam selama pandemi juga mengalami penurunan yang signifikan. Sebanyak 23,05% rumah tangga menyatakan konsumsi daging ayam selama pandemi turun lebih dari 50% dan sebanyak 33,26% rumah tangga menyatakan konsumsi daging ayam turun sebanyak 25-50%.

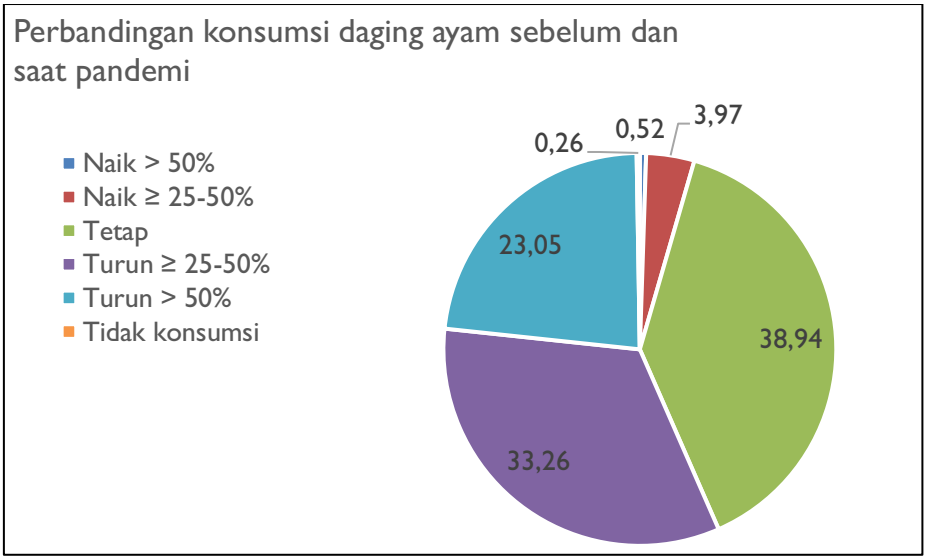

Gambar 9.13 Perbandingan Konsumsi Daging Ayam Sebelum dan Saat Pandemi

Seperti halnya penyediaan telur yang cenderung stabil, konsumsi telur ayam selama pandemi relatif tetap. Meskipun 33,6% rumah tangga menyatakan konsumsi telur ayam selama pandemi turun, 9,9% rumah tangga lainnya menyatakan bahwa konsumsi telur ayam naik selama pandemi.

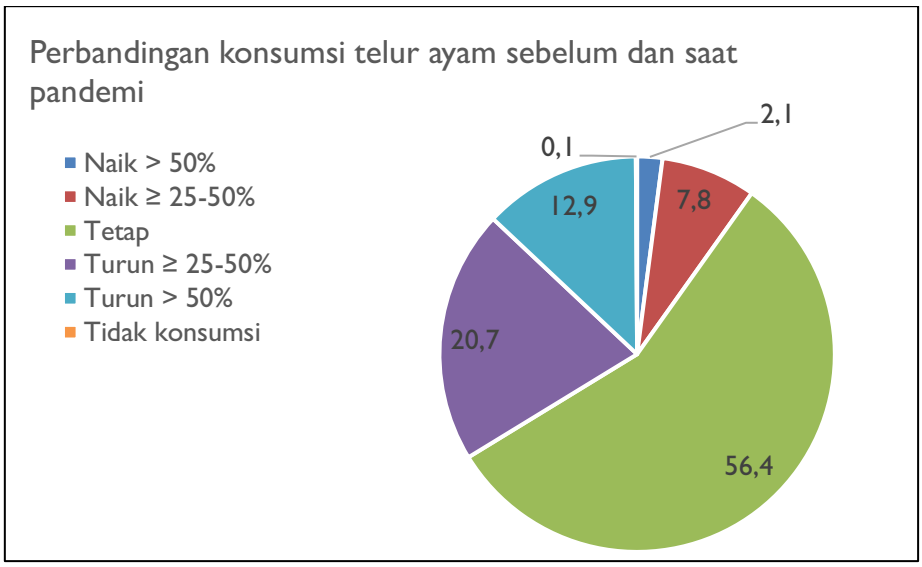

Gambar 9.14 Perbandingan Konsumsi Telur Ayam Sebelum dan Saat Pandemi

Konsumsi rumah tangga terhadap ikan selama pandemi cenderung tetap-menurun. Sebanyak 47,8% rumah tangga menyatakan konsumsi ikan selama pandemi turun, sedangkan sebanyak 3,9% rumah tangga menyatakan konsumsi ikan naik selama pandemi.

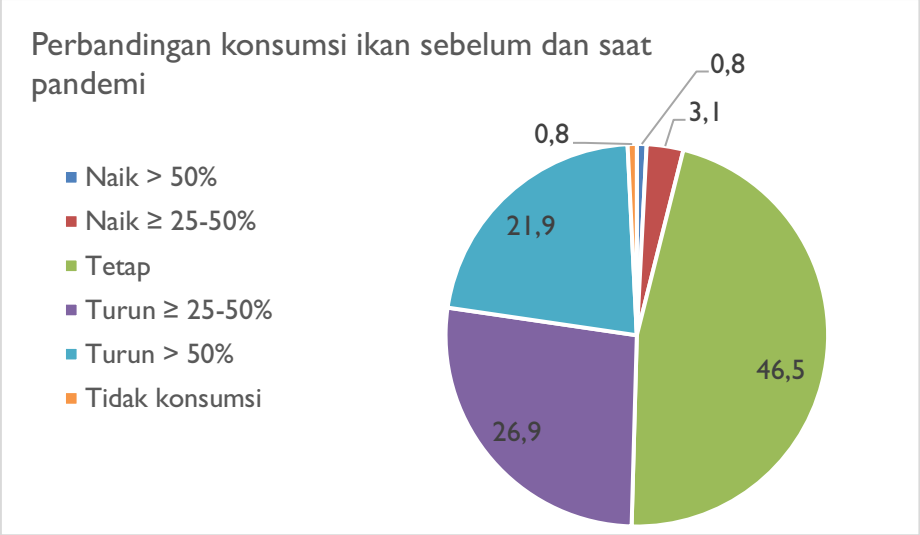

Gambar 9.15 Perbandingan Konsumsi Ikan Sebelum dan Saat Pandemi

Seperti halnya dengan penyediaan sayur, konsumsi sayur responden selama pandemi relatif tidak berubah. Meskipun sebanyak 17,9% responden menyatakan konsumsi sayur selama pandemi turun, namun 7,6% responden lainnya menyatakan bahwa konsumsi sayur naik selama pandemi.

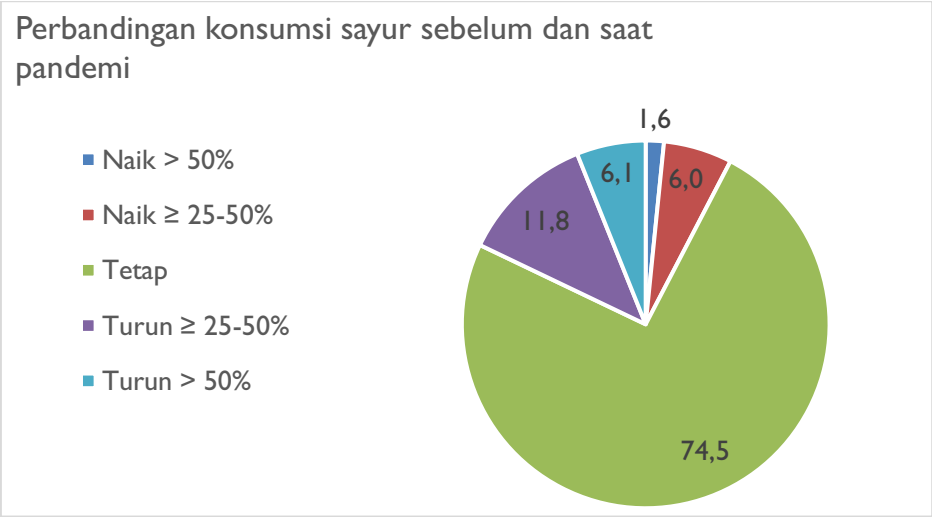

Gambar 9.16 Perbandingan Konsumsi Sayur Sebelum dan Saat Pandemi

Konsumsi rumah tangga terhadap buah selama pandemi secara umum relatif tetap, dimana sebanyak 47% rumah tangga tidak mengalami perubahan konsumsi buah. Sebanyak 45,1% rumah tangga menyatakan konsumsi buah selama pandemi turun, sedangkan sebanyak 7,7% rumah tangga menyatakan konsumsi buah naik selama pandemi.

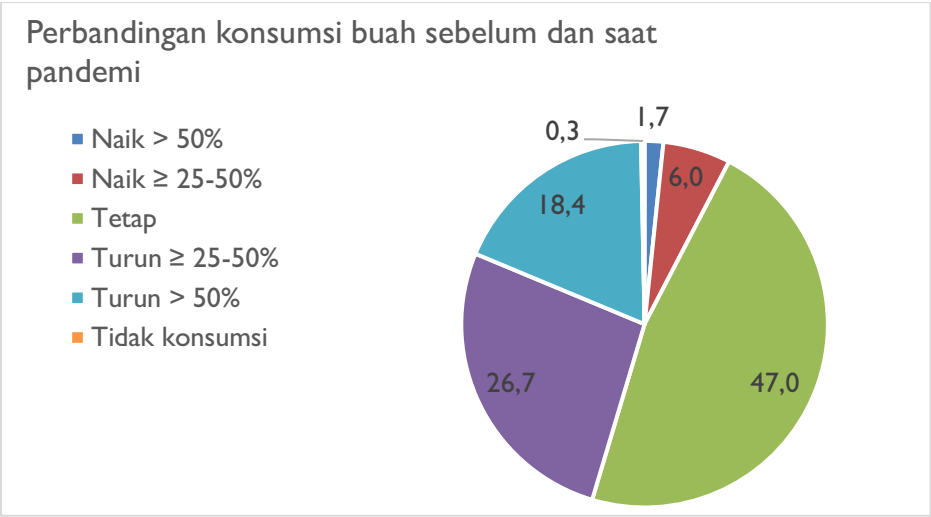

Gambar 9.17 Perbandingan Konsumsi Buah Sebelum dan Saat Pandemi

Selain penyediaan dan konsumsi, survey juga dilakukan untuk mengetahui situasi ketahanan pangan rumah tangga secara kualitatif. Sebagian besar responden mempunyai kekhawatiran akan kekurangan makanan selama pandemi, namun kekhawatiran tersebut belum terjadi. Sebagian responden mengurangi porsi/jenis makanan yang dikonsumsi, namun tidak mengurangi frekuensi makan dalam sehari.

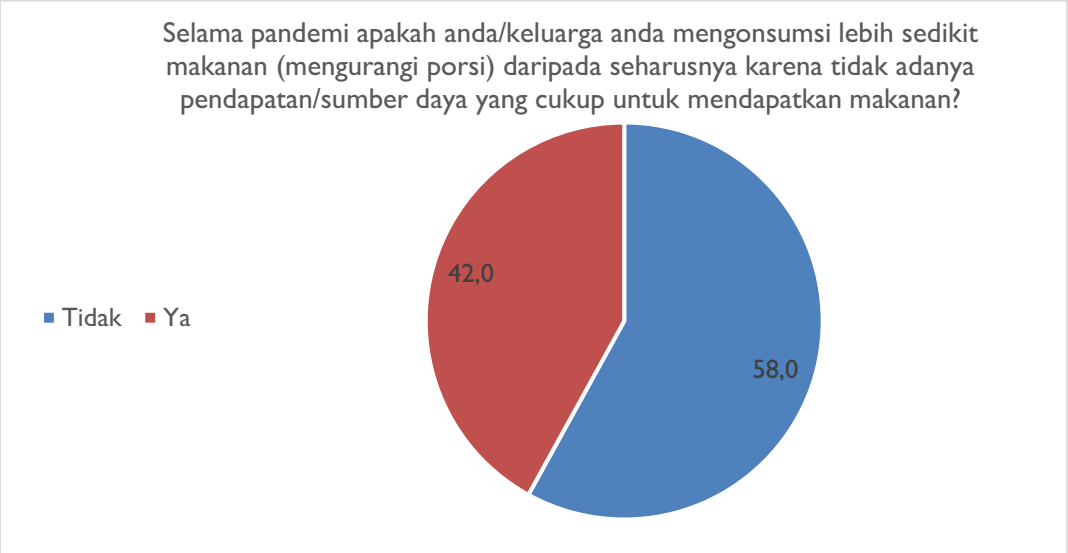

Gambar 9.18 Kuantitas Makan Selama Pandemi

Kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan adalah: (i) penyediaan dan konsumsi beras, telur, ikan dan sayur rumah tangga cenderung meningkat selama pandemi, (ii) penyediaan dan konsumsi daging sapi, daging ayam dan buah cenderung menurun saat pandemi, (iii) kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kekurangan makanan sangat besar, namun situasi kekurangan makanan yang dikhawatirkan tersebut tidak terjadi pada saat pandemi. Oleh karena itu perlu: (i) mengupayakan distribusi protein hewani yang merata dan meningkatkan konsumsi telur daging ayam dan ikan, dan (ii) meningkatkan distribusi dan konsumsi buah lokal.

9.3. Program Ketahanan Pangan di Era Normal Baru

Program peningkatan ketahanan pangan di era normal baru yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian diwujudkan dalam lima Cara Bertindak (CB). CB 1 Peningkatan Kapasitas Produksi, CB 2 Diversifikasi Pangan Lokal, CB 3 Penguatan Cadangan dan Sistem Logistik Pangan, CB 4 Pengembangan Pertanian Modern, dan CB 5 Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks).

CB 1. Peningkatan kapasitas produksi dilakukan melalui upaya: (i) pengembangan lahan rawa di Provinsi Kalimantan Tengah; (ii) Perluasan Areal Tanam baru (PATB) untuk padi, jagung, bawang merah, dan cabai di daerah defisit; dan (iii) peningkatan produksi gula, daging sapi, dan bawang putih untuk mengurangi impor.

CB 2. Diversifikasi Pangan Lokal dilakukan melalui upaya (i) pengembangan diversifikasi pangan lokal; (ii) pemanfaatan pangan lokal; (iii) pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan *urban farming*. Tujuan diverisifikasi pangan yaitu: (1) menurunkan konsumsi beras 2 kg/kapita/tahun dan meningkatkan konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat lainnya: ubi kayu 1,90 kg/kapita/tahun; jagung 0,21 kg/kapita/tahun; sagu 0,40 kg/kapita/tahun; kentang 0,83 kg/kapita/tahun; pisang 0,46 kg/kapita/tahun; dan talas 0,62 kg/kapita/tahun; (2) meningkatkan produksi bahan baku pangan lokal non karbohidrat; (3) menumbuhkan UMKM pangan penyedia pangan lokal.

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka: (1) intervensi sensitif dalam rangka pencegahan/penanganan *stunting*, (2) peningkatan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta (3) peningkatan pendapatan rumah tangga.

CB 3. Penguatan Cadangan dan Sistem Logistik Pangan dilakukan melalui upaya: (i) penguatan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) dan Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK); (ii) pengembangan LPM dan LPM Berbasis Desa (LPMDes); dan (iii) penguatan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.

CB 4. Pengembangan Pertanian Modern dilakukan melalui: (i) pengembangan *Smart Farming*; (ii) pengembangan dan pemanfaatan *Screen House* untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam (cabai, bawang dan komoditas bernilai ekonomi tinggi); (iii) pengembangan *food estate* untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung) di Kalimantan Tengah; dan (iv) pengembangan korporasi petani.

CB 5. Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) dilakukan melalui upaya: (i) meningkatkan volume ekspor melalui kerjasama dan investasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait; (ii) menambahkan ragam komoditas ekspor dalam bentuk hasil olahan pertanian; (iii) mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui penumbuhan agropreuner; dan (iv) menambah mitra dagang luar negeri melalui kerjasama bilateral/multilateral.

Gambar 9.19 Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Era Normal Baru

DAFTAR PUSTAKA

Benta A Abuya, James Ciera and Elizabeth Kimani-Murage. 2012. Effect of mother's education on child's nutritional status in the slums of Nairobi. *BMC Pediatrics* 12:80.

[BMKG] Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 2019. *Informasi Perubahan Iklim 2019*. Jakarta: BMKG.

[BMKG] Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 2020. *Prakiraan Musim Kemarau 2020 di Indonesia*. Jakarta: BMKG.

[BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Data dan Informasi*. Jakarta: BNPB.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. Jakarta: BPS.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018. Jakarta: BPS.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Hasil Kerangka Sampling Area (KSA) tahun 2019. Jakarta: BPS.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Impor Biji Gandum dan Meslin Menurut Negara Asal Utama, 2010-2019. Update 17 April 2020. https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2016/impor-biji-gandum-dan-meslin-menurut-negara-asal-utama-2010-2019.html.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. Berita Resmi Statistik No. 86/11/Th. XXIII, 5 November 2020. Jakarta: BPS.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020 No. 85/11/Th. XXIII, 5 November 2020. Jakarta: BPS.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen), 2017-2019. Jakarta: BPS.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020. Jakarta: BPS.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Provinsi Dalam Angka. BPS.

Burger SE. and Esrey SA. 1995. Water and sanitation: health and nutritionbenefits to children. In Pinstrup-Andersen P, Pelletier D, and Alderman H,editor. *Child Growth and Nutrition in Developing Countries*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Cleland JG, Van Ginneken JK. 1988. *Maternal education and child survival in developing countries: the search for pathways of influence*. SocSci Med. 27 (12): 1357-1368. 10.1016/0277-9536(88)90201-8.

[CRED] Centre for Research on the Epidemiology of Disaster. 2020. *Disaster Year in Review 2019*. Belgium: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Institute Health and Society UClouvain.

Desai S, Alva S. 1998. *Maternal education and child health: is there a strong causal relationship?*. Demography. 35 (1): 71-81. 10.2307/3004028. *View ArticlePubMedGoogle Scholar*.

[DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015. Jakarta (ID): DKP dan WFP.

[EIU] The Economist Intelligence Unit. 2018. Global Food Security Index 2018. *Building Resilience in the Face of Rising Food-Security Risks*. Dupont (GB): London.

[EIU] The Economist Intelligence Unit. 2019. Global Food Security Index 2019. *Building Resilience in the Face of Rising Food-Security Risks*. Dupont (GB): London.

FAO. 2019. *The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction.* Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Kavosi E, Rostami ZH, Kavosi Z, Nasihatkon A, Moghadami M, Heidari M. 2014. *Prevalence and determinants of under-nutrition among children under six: a cross-sectional survey in Fars province*. Int J Health Policy Manag. 3(2):71-76.

[Kemenkes] Kementerian Kesehatan. 2020. *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19)*. Update 8 Agustus 2020. https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-8-agustus-2020/#.XzD5uygzY2w.

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2020. *Data Luas Puso Padi dan Jagung 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Pertanian.

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2020. Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2019. Jakarta: Kementan.

Khan REA and Gill AR. 2009. *Determinants of food security in rural areas of Pakistan*. MPRAPaper No. 17146.

[Pemprov NTT, DKP, WFP] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme. 2015. Peta Ketahanan danKerentanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015. Jakarta: Pemprov NTT, DKP dan WFP.

[Pusdatin] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian - Kementerian Pertanian. 2020. Data Produksi Tanaman Pangan. Jakarta: Pusdatin – Kementan.

Sofiati EL. 2010. Analisis kerawanan pangan di tingkat kecamatan Kota Bogor. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Thomas D and Strauss J. 1992. Prices, infrastructure, household characteristics and child height. *J Dev Econ*. 39(2):301-331.

[WHO] World Health Organization. 2000. *Classification of Severity of Malnutrition in a Community for Children Under 5 Years of Age from 'The Management of Nutrition in Major Emergencies'*. Genewa: WHO.

WHO. 2020. *Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Reports.* https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kabupaten

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
	Aceh										
1	Simeulue	1,19	18,99	36,31	0,21	22,18	65,22	2,75	8,84	28,21	5
2	Aceh Singkil	3,97	20,78	39,47	0,00	42,40	67,36	2,79	8,76	-	3
3	Aceh Selatan	0,80	13,09	54,14	0,77	42,92	64,27	5,08	9,01	-	5
4	Aceh Tenggara	0,26	13,43	58,42	0,40	49,34	68,04	6,14	8,71	42,83	5
5	Aceh Timur	0,55	14,47	58,23	0,87	44,30	68,67	3,09	8,16	25,50	5
6	Aceh Tengah	1,54	15,50	27,05	0,08	36,60	68,82	3,35	9,79	42,87	5
7	Aceh Barat	0,71	18,79	20,21	0,48	20,25	67,93	2,73	8,92	-	6
8	Aceh Besar	0,40	13,92	37,93	0,84	7,72	69,77	1,96	10,55	-	6
9	Piddie	0,33	19,46	55,08	0,32	35,15	66,89	1,54	8,28	-	5
10	Bireuen	0,48	13,56	43,11	0,84	32,40	71,16	0,81	9,85	32,88	6
11	Aceh Utara	0,28	17,39	54,59	0,00	41,08	68,79	1,07	8,93	-	6
12	Aceh Barat Daya	0,37	16,26	42,51	0,41	31,27	64,91	2,23	8,96	-	6
13	Gayo Lues	0,52	19,87	36,15	0,70	28,07	65,38	8,25	8,25	29,16	5
14	Aceh Tamiang	0,74	13,38	43,40	0,57	22,02	69,52	2,52	9,26	-	6
15	Nagan Raya	0,78	17,97	36,74	0,00	36,54	69,14	4,93	9,13	26,46	5
16	Aceh Jaya	0,30	13,36	41,55	0,94	28,09	67,11	7,09	9,06	-	6
17	Bener Meriah	5,00	19,30	37,74	1,89	33,82	69,19	1,69	10,05	28,15	2
18	Pidie Jaya	0,30	19,31	49,05	0,18	32,44	70,06	1,32	9,36	27,87	6
	Sumatera Utara										
19	Nias	0,77	15,94	43,17	22,39	81,81	69,68	2,38	5,57	56,21	4
20	Mandailing Natal	0,81	9,11	59,87	5,56	52,43	62,51	3,06	8,85	49,91	5
21	Tapanuli Selatan	0,47	8,60	56,65	2,85	46,51	64,82	6,97	9,22	-	5
22	Tapanuli Tengah	1,31	12,53	44,66	3,69	42,18	67,08	1,66	8,63	36,32	5
23	Tapanuli Utara	0,34	9,48	60,34	1,45	37,19	68,46	2,80	9,59	-	6
24	Toba Samosir	0,22	8,60	50,46	1,48	40,70	69,93	2,39	10,23	-	6
25	Labuhan Batu	1,17	8,44	28,11	0,11	28,72	69,86	1,93	9,09	-	6
26	Asahan	1,93	9,68	30,07	0,42	24,34	68,11	2,01	8,77	-	5
27	Simalungun	0,43	8,81	40,79	0,88	39,75	71,07	2,33	9,64	32,38	6
28	Dairi	0,33	7,70	55,91	2,22	42,81	68,79	2,20	9,45	39,27	6
29	Karo	0,18	8,23	58,59	2,15	24,41	71,27	1,86	9,89	-	6
30	Deli Serdang	1,03	3,89	29,06	0,06	12,34	71,61	0,69	10,11	30,97	6
31	Langkat	1,03	9,91	39,18	0,12	23,33	68,59	1,97	8,51	18,21	6
32	Nias Selatan	0,69	16,45	36,87	24,78	66,15	68,58	1,49	6,05	57,00	4
33	Humbang Hasundutan	0,31	8,75	56,03	0,65	46,21	69,06	3,45	9,49	-	6
34	Pakpak Barat	0,80	9,27	42,69	2,09	56,28	65,59	4,15	8,76	39,04	5
35	Samosir	0,30	12,52	54,42	1,07	58,74	71,16	3,73	8,60	-	6
36	Serdang Bedegai	0,17	7,90	30,32	0,28	28,25	68,46	1,46	8,53	-	6
37	Batu Bara	0,95	12,14	33,92	0,16	28,38	66,75	1,67	8,42	-	6
38	Padang Lawas Utara	1,51	9,60	48,71	1,54	47,76	67,06	5,89	9,12	49,28	5

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
39	Padang Lawas	1,32	8,28	44,48	2,61	51,81	66,98	3,62	8,98	41,95	5
40	Labuhan Batu Selatan	5,00	8,94	23,26	0,29	24,46	68,64	3,53	9,00	-	3
41	Labuhan Batu Utara	1,35	9,57	42,80	0,80	39,13	69,37	4,50	8,36	-	5
42	Nias Utara	0,46	24,99	37,14	17,44	61,04	69,29	1,80	6,32	26,57	5
43	Nias Barat	1,43	25,51	54,56	11,25	81,37	68,82	1,09	6,42	43,95	3
	Sumatera Barat										
44	Kepulauan Mentawai	3,72	14,43	54,99	25,81	68,08	64,68	13,48	7,18	-	2
45	Pesisir Selatan	0,35	7,88	30,48	0,70	22,69	70,73	5,38	8,82	-	6
46	Solok	0,37	7,98	43,96	1,11	31,94	68,34	3,55	8,05	35,45	6
47	Sawah Lunto/Sijunjung	0,83	7,04	29,45	0,87	32,30	66,02	5,44	8,51	-	6
48	Tanah Datar	0,27	4,66	38,34	1,65	26,26	69,73	1,48	8,99	-	6
49	Padang Pariaman	0,43	7,10	36,57	0,69	35,29	68,58	1,18	8,15	-	6
50	Agam	0,38	6,75	31,96	0,95	32,28	72,17	2,10	9,26	-	6
51	Limapuluh Koto	0,39	6,97	41,28	1,11	36,68	69,70	4,90	8,14	28,94	6
52	Pasaman	0,26	7,21	44,98	1,50	34,13	67,18	4,69	8,61	35,67	6
53	Solok Selatan	0,29	7,33	32,25	2,15	37,51	67,58	5,56	8,42	-	6
54	Dharmas Raya	1,25	6,29	19,20	0,66	39,42	71,10	4,64	8,86	-	6
55	Pasaman Barat	0,45	7,14	45,51	0,90	40,76	67,67	3,53	8,89	31,66	6
	Riau										
56	Kuantan Sengingi	2,78	9,56	24,86	1,69	28,66	68,44	6,34	8,82	-	5
57	Indragiri Hulu	3,51	6,06	16,03	2,84	21,61	70,20	5,76	8,54	-	4
58	Indragiri Hilir	1,42	6,54	33,23	8,70	74,85	67,66	6,95	7,66	-	4
59	Pelalawan	4,39	9,62	28,85	3,17	13,37	71,03	11,63	8,65	22,97	4
60	Siak	2,36	5,03	12,28	0,81	14,05	71,03	6,82	9,54	-	6
61	Kampar	5,00	7,71	25,70	0,14	32,49	70,64	5,84	9,24	23,07	3
62	Rokan Hulu	5,00	10,53	28,41	2,00	33,41	69,89	7,02	8,74	24,37	3
63	Bengkalis	3,27	6,27	20,92	0,58	38,65	71,11	4,78	9,26	-	4
64	Rokan Hilir	2,87	7,01	25,80	2,09	38,90	70,17	5,24	8,60	28,87	4
65	Kepulauan Meranti	5,00	26,93	15,87	5,25	92,21	67,53	6,26	7,58	25,10	1
	Jambi										
66	Kerinci	0,36	7,13	31,70	0,00	33,76	69,82	5,38	8,08	33,85	6
67	Merangin	1,50	8,48	33,30	0,45	53,94	71,18	4,94	7,90	15,38	5
68	Sarolangun	2,31	8,45	34,82	1,44	46,17	69,09	5,66	7,94	-	5
69	Batanghari	2,79	9,75	37,32	1,05	42,03	70,44	6,69	8,30	-	4
70	Muara Jambi	4,46	3,83	37,01	0,58	29,70	71,18	5,43	8,63	-	4
71	Tanjung Jabung Timur	0,89	11,54	34,63	2,68	67,22	66,08	7,23	6,76	20,05	5
72	Tanjung Jabung Barat	1,69	10,56	45,34	3,95	59,33	68,03	4,13	7,79	21,81	4
73	Tebo	2,46	6,47	31,85	1,26	42,67	69,91	9,50	7,74	-	5
74	Bungo	2,84	5,60	24,98	1,80	28,81	67,61	3,15	8,20	-	5
	Sumatera Selatan										
75	Ogan Komering Ulu	1,33	12,77	27,74	0,38	30,65	68,01	2,59	8,90	-	5
76	Ogan Komering Ilir	0,31	15,01	30,95	0,37	42,24	68,41	7,53	7,16	38,06	6
77	Muara Enim (Liot)	1,22	12,41	30,39	0,00	39,74	68,63	3,56	8,00	38,62	5

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
78	Lahat	0,98	15,92	32,18	0,00	51,16	65,76	6,38	8,52	29,53	5
79	Musi Rawas	0,57	13,37	24,93	1,57	33,12	67,86	4,39	7,71	-	6
80	Musi Banyuasin	0,74	16,41	21,83	1,10	40,09	68,54	7,47	7,66	-	5
81	Banyuasin	0,16	11,33	31,45	2,76	51,19	68,76	6,97	7,51	28,28	6
82	Ogan Komering Ulu Selatan	0,30	10,53	53,68	1,78	59,57	66,76	5,19	7,72	-	5
83	Ogan Komering Ulu Timur	0,18	10,43	15,36	0,21	44,69	68,87	1,40	7,68	-	6
84	Ogan Ilir	1,04	13,31	27,90	1,05	30,70	65,21	1,78	8,21	35,56	5
85	Empat Lawang	0,72	12,30	52,37	5,10	80,42	64,81	2,80	7,48	-	4
86	Penukal Abab Lematang Ilir	1,63	13,47	26,74	0,00	35,08	68,07	2,05	7,00	-	5
87	Musi Rawas Utara	3,91	19,12	38,96	2,90	49,80	65,43	7,23	6,68	-	2
	Bengkulu										
88	Bengkulu Selatan	0,30	18,54	42,35	0,38	51,84	67,79	1,10	9,03	25,22	5
89	Rejang Lebong	1,05	15,95	28,07	1,58	62,78	68,37	1,62	9,04	-	5
90	Bengkulu Utara	1,49	11,65	27,66	0,78	64,65	68,04	4,60	7,82	27,62	5
91	Kaur	0,72	18,89	32,49	2,01	54,20	66,50	4,25	8,31	30,53	5
92	Seluma	0,67	19,10	31,27	2,62	72,40	67,56	2,83	7,77	40,13	4
93	Mukomuko	1,16	11,70	21,64	0,67	53,68	66,51	4,46	8,11	-	5
94	Lebong	0,35	11,77	49,37	0,81	33,83	63,12	4,07	8,01	-	6
95	Kepahiang	1,03	14,74	28,24	2,38	67,08	67,78	0,94	8,16	-	5
96	Bengkulu Tengah	2,05	8,80	30,81	2,31	54,75	68,12	2,15	7,32	-	4
	Lampung										
97	Lampung Barat	0,86	12,92	25,98	1,07	44,70	67,43	2,90	7,94	-	5
98	Tanggamus	0,84	12,05	38,40	0,30	41,89	68,40	2,35	7,46	27,39	5
99	Lampung Selatan	0,29	14,31	34,32	0,08	32,59	69,20	0,43	7,60	30,39	6
100	Lampung Timur	0,13	15,24	22,70	0,15	46,53	70,61	3,78	7,59	26,12	6
101	Lampung Tengah	0,16	12,03	31,46	0,22	47,76	69,75	1,41	7,83	21,41	6
102	Lampung Utara	0,16	19,90	42,37	0,89	67,45	69,05	1,62	8,09	38,56	5
103	Way Kanan	0,35	13,07	35,47	0,12	65,47	69,27	2,93	7,15	-	5
104	Tulang Bawang	0,17	9,35	20,26	0,96	31,44	69,88	3,71	7,52	-	6
105	Pesawaran	0,29	15,19	28,01	0,17	29,15	68,88	2,60	7,75	25,84	6
106	Pringsewu	0,50	10,15	29,00	0,00	16,14	69,85	0,43	8,23	-	6
107	Mesuji	0,14	7,47	18,16	1,05	26,81	68,04	3,38	6,64	-	6
108	Tulang Bawang Barat	0,15	7,75	22,95	0,00	72,18	69,88	1,57	7,24	-	6
109	Pesisir Barat	0,41	14,48	44,77	4,02	47,01	63,27	4,83	8,11	-	5
	Kepulauan Bangka Belitung										
110	Bangka	1,76	4,92	20,61	0,37	15,20	70,99	1,84	8,34	20,86	6
111	Belitung	5,00	6,29	6,63	0,46	12,42	70,94	2,88	8,59	-	4
112	Bangka Barat	2,60	2,67	17,69	0,36	24,75	69,99	3,85	7,31	23,30	5
113	Bangka Tengah	5,00	5,02	17,62	0,00	13,65	71,16	3,51	7,77	-	4
114	Bangka Selatan	0,92	3,36	26,86	0,18	22,61	67,90	5,75	6,79	21,59	6
115	Belitung Timur	5,00	6,60	11,37	0,75	13,26	71,90	4,36	8,14	-	4
	Kepulauan Riau										
116	Karimun	5,00	6,61	16,50	0,31	22,74	70,71	1,04	7,78	15,08	3

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
117	Bintan	5,00	6,37	7,67	1,35	33,85	70,30	1,67	8,04	-	3
118	Natuna	5,00	4,42	22,53	0,52	24,30	64,81	3,49	8,39	17,36	3
119	Lingga	5,00	12,88	26,77	0,78	23,34	61,75	3,97	7,11	16,49	2
120	Kepulauan Anambas	5,00	6,44	17,62	0,42	40,74	67,06	1,51	7,07	-	3
	DKI Jakarta										
121	Kep. Seribu	5,00	12,09	74,94	0,00	9,43	68,51	0,05	8,52	29,16	3
	Jawa Barat										
122	Bogor	2,84	6,66	30,35	0,00	39,88	71,01	0,68	8,49	34,96	4
123	Sukabumi	0,73	6,22	52,42	0,09	45,70	70,73	1,17	7,30	21,93	6
124	Cianjur	0,59	9,15	48,22	0,12	46,98	69,91	1,04	7,06	27,52	6
125	Bandung	1,58	5,94	38,11	0,00	17,59	73,40	0,59	8,83	27,87	6
126	Garut	0,48	8,98	59,66	0,00	49,33	71,22	0,81	7,74	27,03	6
127	Tasikmalaya	0,64	9,12	63,34	0,00	51,75	69,21	1,08	7,60	34,97	5
128	Ciamis	0,66	6,65	44,41	0,00	41,88	71,57	0,67	7,95	24,21	6
129	Kuningan	0,61	11,41	46,37	0,00	33,64	73,35	0,46	7,54	18,06	6
130	Cirebon	0,80	9,94	41,99	0,00	24,78	71,82	0,30	7,22	25,06	6
131	Majalengka	0,35	10,06	48,77	0,09	22,84	69,97	0,44	7,22	28,53	6
132	Sumedang	0,42	9,05	45,12	0,00	34,68	72,29	0,81	8,51	24,43	6
133	Indramayu	0,23	11,11	55,09	0,08	13,41	71,37	0,89	6,02	29,19	6
134	Subang	0,31	8,12	39,44	0,13	29,48	72,13	0,69	6,83	25,73	6
135	Purwakarta	1,09	7,48	30,66	0,00	31,88	70,80	0,75	7,87	23,42	6
136	Karawang	0,39	7,39	34,87	0,00	22,03	71,98	0,35	7,75	24,01	6
137	Bekasi	1,27	4,01	29,51	0,25	11,06	73,56	0,48	8,66	20,93	6
138	Bandung Barat	1,42	9,38	45,41	0,00	26,57	72,18	0,66	8,38	32,12	6
139	Pangandaran	0,42	7,71	42,88	0,20	28,65	71,12	1,17	7,74	-	6
	Jawa Tengah										
140	Cilacap	0,41	10,73	25,17	0,22	23,96	73,52	0,69	7,03	23,18	6
141	Banyumas	1,05	12,53	18,66	0,26	21,91	73,55	0,27	7,69	26,40	6
142	Purbalingga	0,87	15,03	23,00	0,10	20,88	73,02	0,34	7,30	24,99	6
143	Banjarnegara	0,86	14,76	25,41	0,09	35,11	74,01	0,58	6,87	-	6
144	Kebumen	0,48	16,82	30,71	0,13	30,67	73,22	0,39	7,58	19,65	6
145	Purworejo	0,43	11,45	23,59	0,00	36,89	74,52	0,58	7,75	-	6
146	Wonosobo	0,81	16,63	29,24	0,16	14,05	71,60	0,73	6,95	38,57	6
147	Magelang	0,92	10,67	19,38	0,00	23,57	73,56	0,76	7,71	31,01	6
148	Boyolali	0,46	9,53	18,76	0,10	26,37	75,83	0,48	7,40	-	6
149	Klaten	0,54	12,28	25,35	0,00	26,29	76,68	0,20	8,24	27,64	6
150	Sukoharjo	0,45	7,14	23,04	0,10	17,65	77,55	0,15	9,17	-	6
151	Wonogiri	0,19	10,25	28,51	0,00	22,50	76,07	1,02	7,15	-	6
152	Karanganyar	0,52	9,55	24,63	0,00	16,80	77,38	0,40	8,39	-	6
153	Sragen	0,20	12,79	24,84	0,00	15,32	75,62	0,35	7,06	32,40	6
154	Grobogan	0,23	11,77	47,98	0,00	18,93	74,61	0,85	7,03	29,13	6
155	Blora	0,22	11,32	32,01	0,10	13,46	74,23	0,91	6,63	31,57	6
156	Rembang	0,46	14,95	28,95	0,04	15,94	74,43	0,66	7,35	-	6

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
157	Pati	0,22	9,46	20,85	0,00	19,56	76,04	0,49	7,29	19,38	6
158	Kudus	0,68	6,68	8,69	0,00	25,53	76,50	0,14	8,62	-	6
159	Jepara	0,72	6,66	35,07	0,13	21,24	75,74	0,25	7,56	30,90	6
160	Demak	0,30	11,86	37,46	0,00	13,84	75,31	0,46	7,73	35,76	6
161	Semarang	0,90	7,04	14,27	0,16	12,33	75,63	0,45	8,24	-	6
162	Temanggung	1,00	9,42	18,74	0,00	24,03	75,48	0,53	7,26	-	6
163	Kendal	0,57	9,41	25,33	0,24	16,19	74,33	0,61	7,34	-	6
164	Batang	0,71	8,35	36,68	0,00	32,42	74,59	0,53	6,86	-	6
165	Pekalongan	0,77	9,71	35,50	0,14	35,33	73,57	0,57	7,21	34,74	6
166	Pemalang	0,56	15,41	39,99	0,00	23,32	73,22	0,48	6,54	33,06	6
167	Tegal	0,75	7,64	34,99	0,00	21,31	71,40	0,27	7,01	-	6
168	Brebes	0,69	16,22	36,08	0,00	26,91	69,04	0,58	6,19	34,65	6
	DI Yogyakarta										
169	Kulon Progo	0,62	17,39	27,09	0,00	30,99	75,20	0,43	8,32	27,13	6
170	Bantul	1,39	12,92	13,50	0,42	26,78	73,77	0,19	9,63	18,32	6
171	Gunung Kidul	0,20	16,61	43,99	0,00	33,55	74,03	1,04	6,91	23,84	6
172	Sleman	1,73	7,41	12,95	0,22	18,38	74,77	0,10	10,69	-	6
	Jawa Timur										
173	Pacitan	0,44	13,67	37,14	0,11	31,39	71,77	1,20	7,35	-	6
174	Ponorogo	0,26	9,64	24,00	0,05	27,01	72,65	0,61	7,36	-	6
175	Trenggalek	0,52	10,98	28,89	0,00	40,39	73,59	0,75	7,35	26,78	6
176	Tulungagung	0,49	6,74	23,22	0,00	33,82	73,95	0,47	7,92	-	6
177	Blitar	0,49	8,94	20,38	0,08	31,35	73,39	0,89	7,53	-	6
178	Kediri	0,78	10,42	32,35	0,00	38,57	72,54	0,64	8,20	24,49	6
179	Malang	0,95	9,47	27,91	0,00	17,41	72,45	0,95	7,52	25,56	6
180	Lumajang	0,50	9,49	41,52	0,00	42,10	69,94	0,87	6,33	-	6
181	Jember	0,57	9,25	40,99	0,04	44,49	68,99	0,79	6,46	37,94	6
182	Banyuwangi	0,57	7,52	17,91	0,46	30,08	70,54	1,81	7,12	-	6
183	Bondowoso	0,43	13,33	53,37	0,00	38,04	66,55	0,79	5,80	37,22	5
184	Situbondo	0,42	11,20	44,23	0,00	35,33	68,97	1,64	6,03	-	6
185	Probolinggo	0,74	17,76	47,64	1,26	36,36	67,00	0,83	5,93	54,75	5
186	Pasuruan	0,75	8,68	33,20	0,00	37,49	70,17	0,66	7,42	29,27	6
187	Sidoarjo	1,78	5,32	14,23	0,00	9,97	73,98	0,12	9,58	8,96	6
188	Mojokerto	0,47	9,75	23,63	0,00	14,44	72,43	0,31	8,54	-	6
189	Jombang	0,51	9,22	31,66	0,00	25,93	72,27	0,33	8,62	-	6
190	Nganjuk	0,36	11,24	42,30	0,14	23,74	71,44	0,58	7,76	26,61	6
191	Madiun	0,27	10,54	31,25	0,05	15,48	71,22	0,75	7,92	-	6
192	Magetan	0,35	9,61	25,70	0,00	9,08	72,49	0,45	7,65	-	6
193	Ngawi	0,17	14,39	35,58	0,00	19,69	72,16	0,59	7,13	28,70	6
194	Bojonegoro	0,27	12,38	34,47	0,12	14,91	71,36	0,83	7,28	-	6
195	Tuban	0,25	14,58	32,46	0,00	13,11	71,26	1,11	7,03	-	6
196	Lamongan	0,22	13,21	28,04	0,10	11,64	72,27	0,56	8,12	27,70	6
197	Gresik	0,56	11,35	16,37	0,00	1,22	72,61	0,44	9,32	-	6

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
198	Bangkalan	0,51	18,90	49,08	0,09	38,94	70,11	0,44	5,77	22,37	5
199	Sampang	0,55	20,71	65,25	0,00	23,52	67,96	0,65	5,22	34,39	5
200	Pamekasan	0,86	13,95	52,20	0,00	25,79	67,45	0,38	6,62	27,13	5
201	Sumenep	0,37	19,48	54,57	1,14	36,88	71,22	0,85	5,60	30,48	5
	Banten										
202	Pandeglang	0,48	9,42	47,52	0,00	54,95	64,49	2,27	7,05	34,01	5
203	Lebak	0,64	8,30	57,73	1,18	62,59	67,04	1,40	6,27	32,96	5
204	Tangerang	2,54	5,14	32,25	0,00	19,53	69,79	0,24	8,05	18,42	5
205	Serang	0,79	4,08	43,67	0,00	26,96	64,47	0,78	7,49	39,43	6
	Bali										
206	Jembrana	0,84	4,88	36,23	0,00	24,40	72,21	0,98	7,83	-	6
207	Tabanan	0,50	4,21	14,72	0,14	12,74	73,53	0,53	8,41	-	6
208	Badung	1,37	1,78	4,11	0,00	1,98	74,99	0,16	10,29	-	6
209	Gianyar	0,93	3,88	2,62	0,00	5,67	73,56	0,22	8,16	6,42	6
210	Klungkung	0,81	5,40	19,28	0,24	14,60	71,06	0,26	7,69	-	6
211	Bangli	2,25	4,44	20,35	0,32	24,36	70,37	0,44	6,66	23,01	5
212	Karangasem	1,63	6,25	19,28	0,00	16,11	70,35	0,70	5,78	-	6
213	Buleleng	1,51	5,19	26,19	0,57	24,90	71,68	0,69	6,58	22,05	6
	Nusa Tenggara Barat										
214	Lombok Barat	0,78	15,17	27,92	0,00	23,15	66,64	0,84	6,89	36,30	6
215	Lombok Tengah	0,43	13,63	27,74	0,06	24,43	65,99	0,73	6,29	45,25	6
216	Lombok Timur	0,64	16,15	38,09	0,10	32,91	65,74	0,63	6,97	39,57	5
217	Sumbawa	0,13	13,90	22,94	0,45	21,75	67,31	2,72	8,08	28,99	6
218	Dompu	0,13	12,25	16,10	1,60	29,33	66,60	3,70	8,57	41,49	6
219	Bima	0,20	14,76	21,77	0,86	29,05	66,11	4,24	8,05	33,56	6
220	Sumbawa Barat	0,23	13,85	22,89	0,00	14,44	67,80	2,33	8,68	42,73	6
221	Lombok Utara	0,61	29,03	47,43	0,00	44,24	66,92	1,30	5,89	41,36	4
	Nusa Tenggara Timur										
222	Sumba Barat	0,51	28,29	66,12	24,84	45,33	66,98	1,59	7,18	48,39	4
223	Sumba Timur	0,46	30,02	47,05	4,43	42,49	64,94	14,11	7,77	37,02	4
224	Kupang	0,69	23,03	57,85	10,17	37,33	64,39	10,49	7,71	50,35	4
225	Timor Tengah Selatan	0,57	27,87	66,10	36,48	49,31	66,32	4,73	6,89	58,65	4
226	Timor Tengah Utara	0,57	22,45	70,24	14,52	27,84	66,86	3,44	7,91	50,80	5
227	Belu	0,68	15,54	45,25	11,51	33,88	64,35	1,59	7,69	46,09	5
228	Alor	1,06	21,59	62,20	12,48	42,92	61,29	2,55	8,27	37,77	4
229	Lembata	1,01	26,30	47,61	8,58	41,88	66,97	3,39	8,00	34,60	4
230	Flores Timur	1,45	10,90	56,90	3,73	28,84	65,10	2,40	7,77	36,28	5
231	Sikka	0,84	13,53	51,32	9,41	30,49	67,07	2,07	7,11	34,42	5
232	Ende	1,32	23,18	51,55	1,98	13,53	65,17	3,10	7,46	35,76	5
233	Ngada	0,37	12,48	44,03	6,95	20,17	67,96	19,09	8,90	17,06	6
234	Manggarai	0,62	20,55	54,69	8,39	23,30	66,77	1,42	7,45	45,46	5
235	Rote Nda	0,69	27,95	48,43	13,69	16,75	64,34	3,01	7,70	51,59	5
236	Manggarai Barat	0,36	18,01	47,92	21,65	34,36	67,12	3,69	7,18	56,80	5

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
237	Sumba Tengah	0,36	34,62	62,48	18,80	62,87	68,32	5,08	7,39	41,06	4
238	Sumba Barat Daya	0,62	28,06	82,71	31,02	77,51	68,43	4,97	6,04	46,42	3
239	Nageko	0,54	12,85	45,96	11,98	36,50	67,03	2,49	8,09	34,60	5
240	Manggarai Timur	0,50	26,49	78,26	24,53	36,74	67,98	2,86	7,17	42,73	4
241	Sabu Raijua	2,96	30,52	72,30	28,69	57,28	60,23	1,20	7,50	46,66	2
242	Malaka	0,48	16,12	58,73	9,86	45,59	64,89	1,61	7,17	51,00	5
	Kalimantan Barat										
243	Sambas	0,55	8,19	27,98	0,37	89,46	68,83	5,53	6,56	39,45	5
244	Bengkayang	0,35	6,96	33,97	5,71	44,08	73,67	5,27	7,04	-	6
245	Landak	0,43	11,47	40,21	16,64	68,54	72,70	10,22	6,70	-	5
246	Pontianak/ Mempawah	0,67	5,32	40,13	1,33	73,77	70,90	2,23	7,24	-	5
247	Sanggau	0,65	4,57	23,05	9,43	50,67	71,35	13,32	6,63	-	6
248	Ketapang	0,76	10,54	24,59	8,91	57,30	71,01	23,76	7,25	21,79	5
249	Sintang	1,43	9,65	23,06	3,99	44,70	71,62	20,91	7,08	26,07	5
250	Kapuas Hulu	1,40	9,62	34,89	3,98	48,58	72,44	34,49	7,43	34,65	5
251	Sekadau	0,59	6,11	35,91	11,37	57,17	71,65	10,28	6,45	-	6
252	Melawai	2,42	12,38	39,59	16,09	59,38	72,88	20,43	6,63	36,90	4
253	Kayong Utara	0,49	9,98	32,17	0,70	59,21	68,11	12,77	6,23	-	5
254	Kubu Raya	0,85	4,74	24,77	0,47	88,79	70,43	8,39	7,37	-	5
	Kalimantan Tengah										
255	Kotawaringin Barat	5,00	4,11	12,15	0,17	16,42	70,51	11,80	8,24	-	4
256	Kotawaringin Timur	1,15	5,90	15,67	3,67	29,45	69,80	13,89	8,01	39,87	6
257	Kapuas	0,32	5,09	36,40	1,26	50,92	68,69	10,16	7,91	42,37	6
258	Barito Selatan	2,38	4,39	31,94	2,97	39,47	66,99	12,10	8,76	33,90	5
259	Barito Utara	0,66	4,95	18,86	4,36	26,60	71,29	11,57	8,65	-	6
260	Sukamara	2,44	3,16	15,17	2,52	27,94	71,49	11,09	7,78	-	5
261	Lamandau	0,69	3,01	23,40	2,94	24,48	69,34	11,63	8,36	-	6
262	Seruyan	3,41	7,19	18,76	0,81	22,72	69,25	22,34	7,86	-	4
263	Katingan	0,68	5,02	30,26	1,75	27,18	65,70	23,51	8,32	-	6
264	Pulang Pisau	0,35	4,24	28,10	0,93	46,46	67,98	16,84	8,38	-	6
265	Gunung Mas	4,29	4,91	29,22	4,79	35,15	70,32	17,81	9,07	32,83	3
266	Barito Timur	1,23	6,32	22,67	0,90	44,05	68,14	6,63	9,22	38,53	5
267	Murung Raya	3,01	6,00	34,41	8,10	55,74	69,47	31,79	7,44	-	4
	Kalimantan Selatan										
268	Tanah Laut	0,30	4,51	17,66	0,27	46,18	69,31	3,13	7,68	-	6
269	Kota Baru	0,74	4,49	32,93	0,75	31,54	69,10	10,42	7,50	-	6
270	Banjar	0,44	2,72	26,18	1,11	43,36	66,97	2,74	7,29	-	6
271	Barito Kuala	0,20	4,63	31,39	0,61	42,40	65,88	4,03	7,38	-	6
272	Tapin	0,21	3,41	32,82	0,00	34,04	70,23	4,25	7,79	29,57	6
273	Hulu Sungai Selatan	0,34	5,33	36,25	0,35	42,72	65,82	1,87	7,67	-	6
274	Hulu Sungai Tengah	0,34	5,93	39,97	0,52	37,61	65,82	1,65	8,38	-	6
275	Hulu Sungai Utara	0,45	6,50	17,95	0,00	26,06	63,58	1,05	7,63	36,61	6
276	Tabalong	0,73	6,01	32,17	0,06	26,70	70,33	4,15	8,75	44,51	6

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
277	Tanah Bumbu	0,61	4,85	13,72	0,00	10,85	70,08	3,74	7,79	24,68	6
278	Balangan	0,32	5,55	32,57	2,55	24,90	67,59	2,65	7,33	-	6
	Kalimantan Timur										
279	Pasir	1,00	8,95	16,47	1,49	16,10	72,52	10,26	8,62	-	6
280	Kutai Barat	5,00	9,09	23,41	3,76	24,67	72,79	18,10	8,31	35,66	3
281	Kutai	0,96	7,20	8,95	0,58	9,55	72,21	13,21	9,17	36,51	6
282	Kutai Timur	2,57	9,48	13,32	0,32	7,91	73,03	25,02	9,09	39,35	5
283	Berau	0,93	5,04	11,14	0,21	6,55	71,94	19,77	9,32	-	6
284	Penajam Paser Utara	0,65	7,18	14,70	0,00	8,27	71,30	5,47	8,21	26,98	6
285	Mahakam Ulu	2,93	11,25	31,44	3,31	23,82	71,90	71,90	8,26	-	4
	Kalimantan Utara										
286	Malinau	2,18	6,96	13,24	0,15	29,17	71,42	61,41	8,05	31,01	5
287	Bulungan	1,59	8,78	12,85	0,27	25,85	72,60	17,37	9,05	29,23	6
288	Tana Tidung	5,00	4,72	13,94	0,34	43,38	71,38	21,89	8,48	-	3
289	Nunukan	1,44	6,11	27,63	0,72	24,97	71,30	15,60	8,01	27,71	6
	Sulawesi Utara										
290	Bolaang Mongondow	0,13	7,47	22,18	0,00	29,46	69,22	5,65	8,20	16,71	6
291	Minahasa	0,54	7,18	26,21	0,00	17,92	70,98	1,35	9,61	-	6
292	Kep.Sangihe Talaud	5,00	11,15	41,23	2,87	24,47	69,96	0,63	8,55	-	3
293	Kepulauan Talaud	0,80	9,86	31,14	0,00	30,69	70,04	2,96	9,62	-	6
294	Minahasa Selatan	0,47	9,26	37,47	0,14	19,36	69,80	2,03	9,16	-	6
295	Minahasa Utara	0,55	6,93	32,80	0,78	16,88	71,31	1,37	10,10	16,16	6
296	Bolaang Mongondow Utara	0,25	8,45	46,76	0,79	35,62	67,54	3,73	8,86	13,68	6
297	Kep. Siau Tagulandang Biaro	5,00	9,56	22,36	1,18	37,25	70,54	0,63	9,13	-	3
298	Minahasa Tenggara	0,36	12,78	32,49	0,33	27,97	70,07	2,92	9,15	-	6
299	Bolaang Mongondow Selatan	0,37	13,27	27,12	0,99	31,20	64,45	4,40	8,39	6,34	6
300	Bolaang Mongondow Timur	0,26	6,10	20,23	0,28	32,65	67,81	3,85	7,80	-	6
	Sulawesi Tengah										
301	Banggai Kepulauan	2,49	14,84	43,82	13,57	19,35	65,71	3,92	8,49	-	4
302	Banggai	0,31	7,80	16,25	1,75	19,97	70,61	5,34	8,06	29,96	6
303	Morowali	0,46	13,75	15,34	2,72	19,85	68,82	5,15	9,24	26,79	6
304	Poso	0,33	15,65	16,06	0,49	16,81	70,85	5,59	9,39	-	6
305	Donggala	0,74	18,40	41,68	4,99	51,02	66,85	4,73	7,93	-	5
306	Toli-Toli	0,52	13,09	25,80	3,78	24,54	65,30	3,18	8,77	-	6
307	Buol	0,62	15,19	39,72	4,48	21,73	68,17	6,07	8,98	-	6
308	Parigi Moutong	0,32	16,64	33,64	5,85	34,24	63,94	3,03	7,69	31,54	5
309	Tojo Una-Una	0,59	17,16	41,88	5,74	10,89	65,14	6,07	8,60	-	6
310	Sigi	0,49	12,91	39,33	1,22	46,69	69,57	7,61	8,80	50,53	5
311	Banggai Laut	4,95	15,34	36,25	8,71	26,92	64,79	1,21	8,61	-	2
312	Morowali Utara	0,61	15,08	29,03	5,50	24,43	69,19	16,10	8,67	-	6
	Sulawesi Selatan										
313	Selayar	3,72	12,83	24,15	1,17	9,54	68,34	1,25	8,40	32,71	4
314	Bulukumba	0,28	7,26	21,72	0,00	25,74	67,69	0,99	8,07	-	6

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
315	Bantaeng	0,27	9,03	24,88	0,77	4,94	70,42	0,42	6,76	-	6
316	Jeneponto	0,21	14,88	23,77	0,00	10,33	66,24	1,21	7,50	41,11	6
317	Takalar	0,37	8,70	18,82	0,19	23,94	67,01	0,77	7,77	25,54	6
318	Gowa	0,33	7,53	17,18	0,38	19,61	70,37	2,10	8,26	36,94	6
319	Sinjai	0,35	9,14	9,93	2,59	19,33	67,17	1,19	8,05	34,28	6
320	Maros	0,27	9,89	16,37	2,66	28,82	68,98	0,94	7,96	-	6
321	Pangkajene Kepulauan	0,50	14,06	24,72	2,62	20,18	66,49	1,56	7,99	34,51	6
322	Barru	0,23	8,57	9,99	1,78	15,07	68,91	1,42	8,25	-	6
323	Bone	0,14	10,06	14,98	1,30	25,47	66,88	1,60	7,30	33,02	6
324	Soppeng	0,12	7,25	18,24	1,50	21,76	69,43	2,05	8,18	-	6
325	Wajo	0,11	6,91	22,57	1,55	27,50	67,17	3,22	6,73	-	6
326	Sidenreng Rappang	0,10	4,79	22,01	0,24	22,46	69,59	2,22	8,19	-	6
327	Pinrang	0,11	8,46	30,62	0,27	34,01	69,39	1,93	8,11	27,60	6
328	Enrekang	0,31	12,33	28,54	0,89	34,84	70,83	3,48	8,77	43,71	6
329	Luwu	0,19	12,78	21,85	1,26	29,92	70,19	3,72	8,89	-	6
330	Tana Toraja	0,68	12,35	32,21	2,83	51,24	73,15	2,38	8,68	31,42	6
331	Luwu Utara	0,20	13,60	20,18	0,34	36,29	68,31	7,40	8,26	-	6
332	Luwu Timur	0,24	6,98	10,30	0,19	25,33	70,38	8,92	8,64	-	6
333	Toraja Utara	0,44	12,41	31,36	1,00	43,05	73,35	1,12	8,53	34,35	6
	Sulawesi Tenggara										
334	Buton	1,30	13,65	19,34	1,01	31,14	67,92	2,78	7,64	38,30	5
335	Muna	1,18	12,85	15,67	2,37	27,37	70,18	2,15	8,20	27,36	6
336	Konawe/Kab Kendari	0,25	12,34	11,38	0,86	26,98	70,02	3,93	8,95	-	6
337	Kolaka	0,74	11,92	15,05	1,13	21,49	70,72	4,80	9,11	36,01	6
338	Konawe Selatan	0,47	10,81	12,45	0,58	27,35	70,52	8,36	7,72	-	6
339	Bombana	0,47	10,56	19,00	2,68	8,75	68,54	3,39	8,13	-	6
340	Wakatobi	1,38	14,75	14,35	0,78	34,07	70,13	0,75	7,98	23,86	5
341	Kolaka Utara	0,67	13,19	24,50	3,11	19,60	70,15	6,00	8,67	-	6
342	Buton Utara	2,06	14,38	15,53	2,46	25,11	70,75	3,58	8,58	-	5
343	Konawe Utara	0,91	13,66	27,01	0,67	39,98	69,23	13,15	9,25	-	5
344	Kolaka Timur	0,22	13,71	15,24	1,59	16,20	72,33	7,62	8,68	37,36	6
345	Konawe Kepulauan	2,27	17,18	10,83	0,91	27,10	68,25	3,76	8,90	-	4
346	Muna Barat	0,75	13,84	14,12	2,62	27,11	70,16	1,93	7,16	-	6
347	Buton Tengah	1,91	15,77	9,40	0,21	13,25	67,50	1,34	7,55	-	5
348	Buton Selatan	1,19	14,66	12,18	4,57	52,47	67,50	1,45	7,88	46,08	5
	Gorontalo										
349	Boalemo	0,06	18,87	22,30	2,88	24,34	68,83	2,60	7,17	37,15	6
350	Gorontalo	0,26	18,06	10,83	0,70	22,67	67,45	1,58	7,91	37,25	6
351	Pohuwato	0,11	18,16	16,33	0,64	8,43	63,83	7,04	8,05	33,28	6
352	Bone Bolango	0,69	16,12	10,29	0,38	24,02	68,38	2,54	9,12	25,34	6
353	Gorontalo Utara	0,16	16,95	20,30	4,83	22,65	65,79	2,86	7,65	-	6
	Sulawesi Barat										
354	Majene	0,82	13,72	46,97	0,00	16,80	61,30	2,33	9,12	43,70	5

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
355	Polewali Mamasa	0,35	15,60	43,69	1,97	34,52	62,18	2,13	7,59	39,45	5
356	Mamasa	0,35	13,42	57,07	1,08	79,08	70,75	7,41	8,33	45,02	5
357	Mamuju	0,37	7,06	37,56	3,39	34,60	67,23	4,54	7,98	43,68	6
358	Mamuju Utara	0,80	4,28	23,96	2,29	26,03	65,91	7,71	8,60	-	6
359	Mamuju Tengah	0,21	6,87	17,16	1,92	30,26	68,06	11,41	7,77	32,14	6
	Maluku										
360	Maluku Tenggara Barat	5,00	27,25	41,51	7,15	27,78	63,34	14,58	9,76	-	2
361	Maluku Tenggara	5,00	22,75	13,21	4,88	24,27	64,95	1,60	9,35	35,21	2
362	Maluku Tengah	1,16	20,04	34,91	1,57	27,68	66,34	6,65	9,90	31,43	5
363	Buru	0,52	16,74	32,61	3,85	27,18	66,32	7,06	8,80	-	6
364	Kepulauan Aru	5,00	26,73	20,52	25,02	33,17	62,73	15,77	8,86	42,12	1
365	Seram Bagian Barat	2,54	25,16	26,80	2,60	51,38	61,48	8,21	9,15	-	3
366	Seram Bagian Timur	1,18	23,13	37,95	14,11	33,22	59,16	9,65	8,49	40,54	4
367	Maluku Barat Daya	0,89	29,43	21,51	12,70	36,40	62,16	11,51	8,46	29,16	4
368	Buru Selatan	3,00	16,13	39,37	11,90	38,21	66,13	7,66	8,30	-	3
	Maluku Utara										
369	Halmahera Barat	4,61	8,59	16,56	1,03	42,66	66,13	3,47	8,80	-	3
370	Halmahera Tengah	2,59	14,12	24,81	3,79	25,23	63,65	9,01	8,94	27,87	4
371	Kepulauan Sula	5,00	8,98	31,91	7,13	36,65	63,18	11,78	8,88	27,30	2
372	Halmahera Selatan	5,00	5,03	21,34	11,26	41,17	65,75	8,99	7,90	37,79	2
373	Halmahera Utara	1,12	4,55	21,13	2,31	40,64	69,47	6,21	8,42	-	6
374	Halmahera Timur	0,48	15,39	24,63	4,31	52,02	68,64	19,11	8,23	30,38	5
375	Pulau Morotai	0,79	7,27	30,37	1,76	42,00	66,99	9,22	7,55	-	6
376	Pulau Taliabu	5,00	7,53	30,27	19,67	58,31	61,95	9,26	7,86	-	2
	Papua Barat										
377	Fak-Fak	5,00	23,25	26,58	9,05	38,86	68,41	32,50	10,02	32,91	2
378	Kaimana	5,00	16,11	27,41	4,92	46,19	64,64	26,70	9,15	24,10	2
379	Teluk Wondama	5,00	32,42	44,41	12,10	66,41	59,93	23,38	9,07	26,03	1
380	Teluk Bintuni	3,42	30,57	33,52	2,70	33,18	60,60	58,38	9,62	37,02	2
381	Manokwari	1,75	21,06	7,58	0,26	11,28	68,56	3,74	9,76	13,47	5
382	Sorong Selatan	5,00	18,41	41,60	8,33	46,36	66,15	18,06	8,40	40,26	2
383	Sorong	1,50	28,61	13,89	2,16	42,57	66,02	10,37	9,05	26,93	4
384	Raja Ampat	3,80	17,16	27,29	11,30	36,05	64,70	24,86	9,09	32,25	3
385	Tambrauw	2,13	33,66	55,01	24,91	80,42	59,96	100,00	7,39	48,21	1
386	Maybrat	5,00	32,20	28,55	19,42	83,79	65,17	48,75	9,65	44,83	1
387	Manokwari Selatan	0,68	29,94	12,62	2,95	42,63	67,48	100,00	7,72	28,60	4
388	Pegunungan Arfak	5,00	34,83	26,53	43,24	63,37	67,18	100,00	5,85	31,33	1
	Papua										
389	Merauke	0,19	10,35	24,20	5,01	28,12	66,93	100,00	8,51	21,19	6
390	Jayawijaya	5,00	38,33	10,96	26,34	71,41	59,39	5,54	5,24	34,53	1
391	Jayapura	3,77	13,13	20,33	0,15	35,22	66,93	22,24	10,01	34,16	3
392	Nabire	1,87	24,81	23,27	4,67	27,10	67,97	7,22	9,89	29,08	4
393	Yapen Waropen/ Kep. Yapen	5,00	27,13	26,40	23,51	31,53	69,06	16,51	9,14	50,36	2

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
394	Biak Namfor	5,00	25,50	15,74	1,03	28,46	68,20	19,31	10,57	34,63	2
395	Paniai	5,00	37,16	10,04	61,45	89,26	66,27	96,17	4,28	34,44	1
396	Puncak Jaya	5,00	35,71	19,11	12,81	85,59	64,98	14,74	3,22	34,14	1
397	Mimika	5,00	14,54	9,96	11,66	14,02	72,27	1,62	9,83	23,99	3
398	Boven Digoel	5,00	19,66	28,82	13,48	35,80	59,64	100,00	8,66	34,97	1
399	Mappi	5,00	25,50	51,75	56,62	71,16	64,91	80,70	5,44	21,99	1
400	Asmat	5,00	26,60	55,48	35,11	91,49	57,53	100,00	4,80	46,70	1
401	Yahukimo	5,00	38,82	54,10	84,30	67,45	65,80	82,26	3,18	21,86	1
402	Pegunungan Bintang	5,00	30,51	85,30	18,09	79,63	64,34	62,12	3,85	35,87	1
403	Tolikara	5,00	32,90	86,54	14,76	96,24	65,58	29,01	1,99	49,56	1
404	Sarmi	5,00	14,41	46,42	9,08	40,73	66,26	43,80	8,10	27,36	2
405	Keerom	3,14	16,83	20,72	5,37	26,51	66,60	37,74	8,22	27,06	4
406	Waropen	5,00	30,95	37,79	11,70	53,50	66,24	42,35	9,05	32,11	1
407	Supiori	5,00	38,79	49,17	4,03	71,98	65,81	3,47	9,04	53,53	1
408	Membramo Raya	5,00	29,13	79,78	25,99	95,28	57,55	100,00	6,15	21,90	1
409	Nduga	5,00	38,24	41,96	50,13	99,71	55,12	100,00	2,31	3,18	1
410	Lanny Jaya	5,00	39,52	69,67	26,75	99,48	66,00	17,28	1,71	8,80	1
411	Mamberamo Tengah	5,00	36,93	82,71	19,44	100,00	63,44	82,56	3,07	14,26	1
412	Yalimo	5,00	34,52	52,99	14,09	81,54	65,34	30,75	3,61	8,65	1
413	Puncak	5,00	38,24	93,56	97,21	100,00	65,61	44,94	1,00	-	1
414	Dogiyai	5,00	31,12	42,99	95,99	96,91	65,60	100,00	2,56	65,99	1
415	Intan Jaya	5,00	42,92	36,25	10,75	95,47	65,51	94,30	1,88	28,01	1
416	Deiyai	5,00	43,65	9,73	27,07	100,00	65,11	83,07	1,49	-	1

Keterangan:

NCPR : Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia

Pov : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Food : Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran

Elec : Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Water : Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

Life : Angka harapan hidup pada saat lahir

Health : Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

School : Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

Stunting : Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar *(stunting)*

Lampiran 2. Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kota

No.	Kota	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
	Aceh									
1	Kota Banda Aceh	7,22	5,45	0,00	0,00	71,36	0,03	12,39	-	6
2	Kota Sabang	15,60	19,15	0,57	1,63	70,45	0,40	11,01	-	5
3	Kota Langsa	10,57	13,92	0,00	8,72	69,37	0,29	11,24	-	6
4	Kota Lhokseumawe	11,18	20,92	0,21	1,93	71,52	1,00	10,49	-	5
5	Kota Subulussalam	17,95	32,13	0,00	54,91	63,94	1,00	8,85	41,81	1
	Sumatera Utara									
6	Kota Sibolga	12,36	34,41	0,00	4,90	68,77	0,06	10,41	-	5
7	Kota Tanjung Balai	14,04	51,74	0,00	3,42	63,02	0,17	9,70	-	4
8	Kota Pematang Siantar	8,63	20,57	0,34	7,64	73,33	0,04	10,99	-	6
9	Kota Tebing Tinggi	9,94	20,39	0,00	26,68	70,76	0,02	10,27	-	5
10	Kota Medan	8,08	17,05	0,11	2,00	72,98	0,04	11,50	11,69	6
11	Kota Binjai	5,66	23,53	0,00	10,36	72,25	0,03	10,55	-	6
12	Kota Padang Sidempuan	7,26	24,99	0,37	38,88	69,15	0,10	10,94	-	5
13	Kota Gunung Sitoli	16,23	18,41	1,86	19,09	71,02	0,45	8,47	25,91	3
	Sumatera Barat									
14	Kota Padang	4,48	11,93	0,00	9,87	73,57	0,16	11,09	-	6
15	Kota Solok	3,24	23,94	0,00	1,71	73,45	0,10	10,54	-	6
16	Kota Sawah Lunto	2,17	21,24	1,27	15,22	69,87	0,67	10,13	-	5
17	Kota Padang Panjang	5,60	8,38	0,03	5,23	72,77	0,05	11,08	-	6
18	Kota Bukit Tinggi	4,60	6,45	0,00	2,88	74,22	0,02	11,30	-	6
19	Kota Payakumbuh	5,68	19,87	0,00	2,61	73,61	0,13	10,91	-	6
20	Kota Pariaman	4,76	23,86	0,28	17,51	70,15	0,12	10,59	-	6
	Riau									
21	Kota Pekan Baru	2,52	12,68	1,20	3,52	72,22	0,15	11,25	-	6
22	Kota Dumai	3,56	17,61	0,87	12,10	70,82	1,00	9,96	-	5
	Jambi									
23	Kota Jambi	8,12	21,41	0,00	8,57	72,57	0,05	10,89	-	6
24	Kota Sungai Penuh	2,81	26,79	0,21	10,56	72,01	0,73	10,24	-	5
	Sumatera Selatan									
25	Kota Palembang	10,90	16,56	0,15	3,44	70,54	0,06	10,37	22,91	6
26	Kota Prabumulih	11,61	16,68	0,00	29,88	70,09	0,15	9,62	-	5
27	Kota Pagar Alam	8,90	32,17	0,00	49,78	66,41	1,00	9,40	-	3
28	Kota Lubuk Linggau	12,95	15,84	0,13	38,30	69,04	0,44	10,14	-	4
	Bengkulu									
29	Kota Bengkulu	18,09	6,82	0,34	14,39	70,04	0,07	11,64	-	5
	Lampung									
30	Kota Bandar Lampung	8,71	16,62	0,09	15,57	71,28	0,06	10,58	-	6
31	Kota Metro	8,68	9,24	0,00	15,81	71,55	0,06	10,68	-	6
	Kep. Bangka Belitung									
32	Kota Pangkal Pinang	4,25	7,54	0,00	9,14	73,17	0,10	9,81	-	6

No.	Kota	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
	Kepulauan Riau									
33	Kota Batam	4,85	3,72	0,28	0,83	73,29	0,35	11,03	-	6
34	Kota Tanjung Pinang	9,03	5,57	0,00	6,24	72,02	0,12	10,16	-	6
	DKI Jakarta									
35	Kota Jakarta Selatan	2,73	8,84	0,00	22,82	74,03	0,01	11,37	-	6
36	Kota Jakarta Timur	3,12	15,98	0,00	19,73	74,37	0,01	11,25	18,43	6
37	Kota Jakarta Pusat	3,68	21,08	0,00	1,67	74,02	0,00	10,92	-	6
38	Kota Jakarta Barat	3,25	16,16	0,00	4,54	73,54	0,01	10,25	-	6
39	Kota Jakarta Utara	5,04	24,86	0,00	0,35	73,18	0,02	10,45	-	6
	Jawa Barat									
40	Kota Bogor	5,77	24,53	0,00	17,12	73,41	0,03	10,21	-	6
41	Kota Sukabumi	6,67	31,02	0,40	18,60	72,26	0,02	9,63	-	5
42	Kota Bandung	3,38	19,89	0,00	5,11	74,14	0,03	10,77	28,12	6
43	Kota Cirebon	8,41	22,72	0,00	2,84	72,13	0,01	9,30	-	6
44	Kota Bekasi	3,81	11,04	0,00	15,01	74,89	0,05	10,82	20,03	6
45	Kota Depok	2,07	8,85	0,00	21,53	74,31	0,05	10,57	16,09	6
46	Kota Cimahi	4,39	21,79	0,00	9,32	73,89	0,03	10,19	-	6
47	Kota Tasikmalaya	11,60	33,95	0,00	24,60	71,93	0,13	9,32	-	4
48	Kota Banjar	5,50	48,84	0,00	20,37	70,79	0,30	8,48	-	4
	Jawa Tengah									
49	Kota Magelang	7,46	14,63	0,00	5,54	76,75	0,01	9,80	-	6
50	Kota Surakarta	8,70	12,09	0,11	10,40	77,12	0,01	10,39	-	6
51	Kota Salatiga	4,76	11,73	0,00	7,43	77,22	0,05	10,13	-	6
52	Kota Semarang	3,98	10,47	0,02	7,21	77,25	0,05	10,07	-	6
53	Kota Pekalongan	6,60	22,57	0,00	30,16	74,28	0,03	8,85	-	5
54	Kota Tegal	7,47	23,01	0,00	0,61	74,34	0,02	8,30	-	6
	DI Yogyakarta									
55	Kota Yogyakarta	6,84	9,06	0,00	19,98	74,56	0,01	11,19	-	6
	Jawa Timur									
56	Kota Kediri	7,16	17,31	0,00	24,74	73,96	0,03	9,06	-	6
57	Kota Blitar	7,13	15,00	0,00	29,98	73,60	0,03	10,29	-	6
58	Kota Malang	4,07	8,68	0,00	8,48	73,15	0,03	9,96	-	6
59	Kota Probolinggo	6,91	6,86	0,00	13,97	70,19	0,06	8,62	-	6
60	Kota Pasuruan	6,46	34,77	0,00	13,22	71,40	0,04	9,07	-	5
61	Kota Mojokerto	5,15	9,94	0,18	11,92	73,21	0,01	10,57	-	6
62	Kota Madiun	4,35	9,47	0,00	5,13	72,75	0,02	10,85	-	6
63	Kota Surabaya	4,51	13,27	0,00	0,12	74,13	0,03	9,60	16,87	6
64	Kota Batu	3,81	11,38	0,00	18,04	72,54	0,18	9,41	-	6
	Banten									
65	Kota Tangerang	4,43	15,52	0,00	10,48	71,57	0,03	10,65	-	6
66	Kota Cilegon	3,03	24,82	0,00	11,41	66,60	0,17	9,49	-	5
67	Kota Serang	5,28	37,74	0,30	16,37	67,83	0,17	8,47	-	5
68	Kota Tangerang Selatan	1,68	6,84	0,00	21,75	72,41	0,05	11,32	-	6

No.	Kota	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
	Bali									
69	Kota Denpasar	2,10	2,97	0,00	1,46	74,68	0,02	10,95	-	6
	Nusa Tenggara Barat									
70	Kota Mataram	8,92	17,30	0,00	5,38	71,59	0,02	9,13	-	6
71	Kota Bima	8,60	14,18	0,00	16,32	70,20	0,45	10,48	-	5
	Nusa Tenggara Timur									
72	Kota Kupang	9,22	9,71	0,07	6,62	69,37	0,20	10,96	-	6
	Kalimantan Barat									
73	Kota Pontianak	4,88	16,91	0,30	55,79	72,80	0,07	10,31	-	5
74	Kota Singkawang	4,91	12,11	1,25	48,75	71,85	0,35	8,04	-	4
	Kalimantan Tengah									
75	Kota Palangka Raya	3,35	18,41	0,00	7,77	73,19	1,00	11,35	-	6
	Kalimantan Selatan									
76	Kota Banjarmasin	4,20	19,02	0,00	0,00	70,98	0,03	9,64	-	6
77	Kota Banjar Baru	4,30	11,51	0,00	25,15	71,87	0,37	10,67	-	5
	Kalimantan Timur									
78	Kota Balikpapan	2,42	3,66	0,00	1,22	74,41	0,20	10,46	-	6
79	Kota Samarinda	4,59	6,36	0,38	0,15	74,17	0,44	10,16	-	6
80	Kota Bontang	4,22	7,85	0,00	0,29	74,18	0,19	10,57	-	6
	Kalimantan Utara									
81	Kota Tarakan	6,00	7,18	0,00	5,86	73,92	0,32	10,00	-	6
	Sulawesi Utara									
82	Kota Manado	5,51	14,34	0,50	4,54	71,80	0,07	11,38	-	6
83	Kota Bitung	6,49	25,04	0,27	7,06	71,00	0,51	9,96	-	5
84	Kota Tomohon	5,62	9,94	0,00	14,26	71,79	0,15	10,91	-	6
85	Kota Kotamobago	5,71	10,97	0,00	9,24	70,33	0,15	10,19	-	6
	Sulawesi Tengah									
86	Kota Palu	6,83	6,40	0,00	5,24	70,68	0,23	11,51	-	6
	Sulawesi Selatan									
87	Kota Makasar	4,28	9,71	0,00	1,96	72,00	0,03	10,86	-	6
88	Kota Pare Pare	5,26	10,22	0,22	8,65	71,18	0,10	10,33	-	6
89	Kota Palopo	7,82	9,01	0,03	3,84	70,79	0,23	10,79	-	6
	Sulawesi Tenggara									
90	Kota Kendari	4,44	7,52	0,00	5,68	73,52	0,12	11,71	-	6
91	Kota Bau-Bau	7,27	8,67	0,15	6,54	70,95	0,38	10,87	-	6
	Gorontalo									
92	Kota Gorontalo	5,45	1,87	0,00	4,97	72,42	0,07	10,35	-	6
	Maluku									
93	Kota Ambon	4,57	5,62	0,38	14,27	70,35	0,22	11,74	-	6
94	Kota Tual	22,68	6,12	3,92	17,21	65,21	0,86	10,28	-	2
	Maluku Utara									
95	Kota Ternate	3,14	4,81	0,07	8,98	70,85	0,12	11,48	-	6
96	Kota Tidore Kepulauan	6,10	9,32	0,73	39,43	69,22	1,00	9,70	-	4

No.	Kota	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	*Stunting*	Prioritas
	Papua Barat									
97	Kota Sorong	15,45	8,43	0,08	5,13	70,46	0,84	10,68	15,75	5
	Papua									
98	Kota Jayapura	11,49	6,00	0,00	6,17	70,38	0,73	10,88	26,22	5

Keterangan:

Pov : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Food : Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran

Elec : Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Water : Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

Life : Angka harapan hidup pada saat lahir

Health : Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

School : Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

Stunting : Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar *(stunting)*

Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan
Jakarta 12550 Indonesia
Telp. (021) 7805035, 7805641
Fax. (021) 78846536